

Jurnal Sosiologi
Media Pemikiran Dan Aplikasi
Universitas Syiah Kuala

Volume 2, Nomor 2, Desember 2012

Pengarah

Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., M.Hum., Dr. Alamsyah Taher, M.Si
Dr. Ishak Hasan, M.Si., Drs. Zainal Abidin AW, SH., M.Si
Dr. Muhammad Saleh, Sjafei, SH., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Bukhari, M.HSc

Sekretaris Redaksi

Masrizal, MA

Dewan Redaksi

Prof. Bahrein T. Sugihen. Prof. Dr. Abidin Hasyim, M.Sc,
Drs. Zulfan, M.Si, Dr. Nurhayati, M.Si, Khairulyadi, M.HSc

Mitra Bestari

Prof. Heru Nugroho (Universitas Gadjah Mada)
Dr. Nirzalin (Universitas Malikul Saleh)
Mahmuddin, M.Si (IAIN Ar-Raniry)
T. Syarifuddin, M.Si (Universitas Iskandarmuda)

Sekretariat Pelaksana

Drs. Ibnu Jasad, Cut Herlina, SE, Purlina, SE

Sirkulasi

Rahmatillah, Supardi, A.Md.

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)-Universitas Syiah Kuala
Jln. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7555267, Fax (0651) 7555270
E-mail: Sosiologyusk@yahoo.co.id

Jurnal Sosiologi USK

(Media Pemikiran Dan Aplikasi)

Volume 2, Nomor 2, Desember 2012

DAFTAR ISI

Posisi Koperasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Agnes Sunartiningsih	1
Menelusuri Strategi Nafkah (Livelihood Strategies) Dan Diversifikasi Pekerjaan Nelayan Di Wilayah Bencana Mahmuddin	15
Persepsi Tokoh Informal Terhadap Aksi Balapan Liar Anak- anak Remaja Di Kota Banda Aceh Masrizal, Bukhari	41
Dampak Sosial Program Integrated Community Based Risk Reduction (ICBRR) Terhadap Masyarakat Korban Gempa & Tsunami Akmal, MA	57
Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Dr. Ishak Hasan, M.S.....	85

Posisi Koperasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Oleh :

Agnes Sunartiningsih

Abstrak

Ada keinginan dari pemerintah untuk membantu masyarakat Desa yang hidup dari sektor pertanian .Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah diluncurkan dan sebagian besar dari program tersebut pelaksanaannya dengan melakukan usaha bersama atau dengan mendirikan Koperasi karena hingga saat ini Koperasi masih dianggap sebagai lembaga yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam sejarah perkoperasian di Indonesia Pemerintah memainkan peran ganda yaitu fungsi regulatory dan development, karena kondisi yang ada menunjukkan bahwa masih perlunya bantuan pemerintah untuk mengembangkan Koperasi. Persoalan yang muncul kemudian adalah adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam mengembangkan Koperasi yang kemudian justru mengakibatkan Koperasi kehilangan swa dayanya.

Pada saat krisis ekonomi terjadi, Koperasi telah membuktikan bahwa ketika pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan Koperasi, justru terkuak kekuatan swadaya Koperasi. Namun demikian karakter Koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak ber-satu dalam suatu sistem Koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata. Untuk itu harus mulai disadari bahwa membangun Koperasi merupakan hal yang sangat mendasar, serta diperlukan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dan juga perjuangan yang keras serta ketulusan dalam berjuang. Mengingat posisi Koperasi yang masih lemah dalam persaingan usaha, menjadi penting untuk diupayakan perlindungan terhadap bidang usaha yang sudah berhasil dikembangkan oleh Koperasi agar tidak dimasuki oleh badan usaha lain.

Kata kunci : pembangunan, masyarakat desa, Koperasi

A. Memahami Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan masih berlangsung hingga era reformasi saat ini. Strategi pembangunan desa tersebut mengalami perubahan di dalam bentuk dan cakupannya dari kurun waktu yang satu ke kurun waktu berikutnya. Seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia, dikenal dengan adanya strategi pembangunan dengan nama Rencana Kesejahteraan Kasimo atau "*Kasimo Welfare Plan*" yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan memberikan percontohan pada lokasi – lokasi yang dipandang kritis untuk diselenggarakan *demonstration plot* dengan memberikan contoh teknik bertani yang baik. Diharapkan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya sehingga mempunyai efek yang semakin meluas. Strategi ini sebenarnya dipengaruhi oleh *Strategi Olie vlek* atau percikan minyak yang digunakan oleh pemerintahan pada masa kolonial. Sayangnya usaha ini kurang dapat berhasil dikarenakan kekurangan dana dan kekurangan tenaga ahli. (Moeljarto,1999 :1).

Sekitar tahun 1959 pemerintah mendirikan Departemen yang membidangi pembangunan desa yaitu Departemen Transkorpemada (Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Desa). Strategi pembangunan yang diterapkan pada waktu itu banyak diilhami oleh konsep *Community Development* di mana titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan berdasar atas tiga (3) azas yaitu : azas` pembangunan integral, azas kekuatan sendiri dan azas permufakatan bersama. Azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang dari semua aspek kehidupan masyarakat desa (pertanian, pendidikan , kesehatan, perumahan dll) sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan seimbang. Sedangkan azas kekuatan sendiri adalah bahwa setiap usaha utamanya harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri. Sementara itu azas permufakatan bersama mengandung arti bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan – lapangan yang benar – benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota – anggota masyarakat desa yang bersangkutan, dan keputusan untuk pelaksanaannya juga didasarkan atas putusan bersama dan bukan atas perintah atasan.

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Keadaan pada waktu itu mengharuskan untuk segera dilaksanakan konsolidasi, rehabilitasi dan stabilisasi dalam kehidupan ekonomi. Tidak banyak pilihan yang bisa ditempuh bagi pemerintahan orde baru untuk segera dapat melaksanakan pembangunan ekonominya, dan pilihan yang kemudian digunakan adalah mengacu pada paradigma pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan mengadopsi modernisasi dan mengutamakan pembangunan ekonomi dengan memasukkan investasi asing sebagai penggerak pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dibangun di atas prinsip paham kapitalisme bahkan berwatak neo liberal. (Susetiawan dalam Maryam

Fitrhiati : 2013 :44). Pada tingkat awal pembangunan mengutamakan stabilitas politik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Setelah stabilitas politik dapat dicapai maka pertumbuhan ekonomi merupakan urutan yang pertama dan pada periode berikutnya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang diutamakan yang dikenal dengan trilogi pembangunan . Untuk mencapai cita-cita ini masyarakat tradisional harus diubah menjadi modern , pertanian tradisional dirubah menjadi pertanian modern yang lebih berorientasi pada kepentingan pasar, demikian juga sistem produksi substitusi dirubah menjadi produksi komersial. Keberhasilan pertanian menjadi basis pembangunan industri yang tangguh untuk lepas landas menuju masyarakat konsumsi tingkat tinggi dan terhindar dari masalah kemiskinan.(Susetiawan dalam Maryam Fitrhiati 2013 :46)

Paradigma pembangunan pada tingkat makro tentu saja akan berpengaruh terhadap pembangunan pada tingkat mikro di pedesaan. Pendekatan pembangunan yang digunakan keudian lebih banyak bersifat *top down*. Bagi para petani di pedesaan mulai diupayakan pencapaian target produksi pertanian dengan program BIMAS. Perkembangan lain yang perlu dicatat bahwa pada bulan April 1971 pemerintah membentuk lembaga yang diberi nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Pembentukan lembaga ini dikaitkan dengan pelaksanaan program BIMAS dalam rangka pembangunan pertanian. Oleh karena ternyata kegiatan didalam Bimas tersebut cukup beragam dan menyangkut juga perekonomian maka disempurnakanlah menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Sejalan dengan program pembangunan yang pada waktu itu dilangsungkan maka pada masa Pembangunan Lima Tahun I, Koperasi mendapatkan sumber kekuatan baru dalam bentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi . Pembangunan pada masa Orde Baru yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya dan pemerataan pembangunan telah merubah pola pertanian yang kemudian memunculkan kapitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produksi guna kepentingan pasar yang lebih luas.

Memasuki era reformasi pembangunan desa mengalami pergeseran, berangkat dari kegagalan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan pertanian, muncul gagasan untuk melakukan perubahan paradigma kearah yang lebih manusiawi. Dengan Undang Undang No.2 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, setiap daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakatnya. Fungsi pemerintah kemudian bergeser bukan lagi sebagai provider tetapi sebagai enabler, yang fungsinya adalah memfasilitasi pembangunan yang telah diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri berdasar atas kemampuan dan kekuatan masyarakatnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Masyarakat telah berkembang dengan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Penguasaan teknologi se-

makin maju dan semakin modern, demikian juga ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat juga semakin tinggi, jaringan transportasi dan komunikasi telah mampu menembus batas isolasi masyarakat baik isolasi geografis maupun isolasi sosiologis. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial yang dihadapi juga semakin kompleks. Kondisi yang demikian ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan akan tetapi juga dialami oleh masyarakat desa yang hidup dari sektor pertanian. Seperti yang kita saksikan akhir –akhir ini dengan maraknya impor dan penyelundupan barang-barang hasil pertanian. Praktik kartel pangan yang dilakukan telah merusak sistem pertanian nasional dan menyengsarakan para petani. Pelaku kartel yang pandai memainkan harga pangan mengakibatkan struktur pasar menjadi timpang, monopolistik, dan oligopolistik. Yang sering terjadi kemudian adalah kelangkaan kebutuhan pokok yang membuat harga bergejolak tanpa penyebab jelas seperti kelangkaan bawang putih akhir –akhir ini misalnya. Demikian juga dengan kasus korupsi yang terjadi misalnya dengan kasus korupsi proyek pengadaan benih di Kementerian Pertanian periode 2008-2011 yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Belum lagi dengan kasus – kasus yang lain seperti yang menyangkut konflik agraria serta kasus penyelewengan pupuk bersubsidi misalnya, yang semakin menambah panjang persoalan para petani di pedesaan.

Sementara itu DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 1 butir (2) RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa perlindungan petani adalah segala upaya membantu petani menghadapi permasalahan prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Ini mengandung arti bahwa para petani harus dilindungi dari praktik usaha tidak sehat. Demikianlah yang terjadi dan dialami oleh masyarakat desa sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa marjinalisasi petani masih berlangsung hingga saat ini.

B . Koperasi Di Dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Berbicara mengenai Koperasi mengingatkan kita pada sejarah awal berdirinya Koperasi di Indonesia yaitu dengan berdirinya *Hulp en Spaar Bank* pada tahun 1896, jauh sebelum Indonesia merdeka. Lembaga ini didirikan di Purwokerto oleh R. Aria Wiria Atmadja yang mendapat dukungan dari Asisten residen Belanda, E.Sieburg dan dilanjutkan oleh Asisten Residen W.P.D.de Wolf van Westerrode. Bank Pertolongan dan tabungan ini lahir akibat keprihatinan para pejabat pribumi dalam birokrasi pemerintah kolonial, yaitu suatu usaha untuk melepaskan sesama pegawai pemerintahan dari cengkeraman petugas uang. Oleh karena itulah maka lembaga tersebut lebih dikenal sebagai Banknya priyayi. Pada perkembangan selanjutnya usaha diperluas tidak hanya meliputi kelompok priyayi, melainkan mencakup pula kelompok masyarakat umum, khususnya petani. Dari sinilah munculnya embrio Koperasi di Indonesia. Ada keinginan pada

waktu itu untuk mengadopsi jenis koperasi kredit model Raiffeisen, yaitu Koperasi Kredit Pertanian yang pernah didirikan oleh Frederich Wilhelm Raiffeisen di Jerman (Sunartiningih, 1998 :68). Koperasi model Raiffeisen adalah Koperasi kredit yang didirikan dan diperuntukkan bagi masyarakat desa yang hidup dari sektor pertanian. Modal dihimpun dari para anggota pada jangkauan wilayah tertentu untuk digunakan dalam kegiatan simpan pinjam. Usahanya lebih banyak bersifat ideal , artinya bukan mengutamakan keuntungan, tetapi lebih pada usaha untuk saling membantu diantara para anggotanya. Demikian juga halnya dengan para pengurus koperasi, mereka bekerja secara sukarela untuk kepentingan lembaga.

Periode berikutnya Koperasi mengalami perkembangannya bersamaan dengan munculnya gerakan kebangsaan di mana tokoh – tokoh pergerakan nasional memulai gerakannya seperti organisasi Boedi Oetomo yang mendirikan Koperasi konsumsi, disusul beberapa tahun kemudian dengan organisasi Syarikat Islam dan Syarikat Dagang Islam yang mengembangkan Koperasi produksi dan Partai Nasional Indonesia yang juga mengembangkan Koperasi konsumsi. Ada peran Koperasi yang cukup besar sebenarnya pada waktu itu bahwa koperasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk memajukan ekonomi rakyat, apabila gerakan kebangsaan kemudian diartikan sebagai gerakan emansipasi nasional. Karena melalui Koperasi gerakan secara ekonomi dimulai, yaitu dengan tujuan pemberdayaan kaum miskin atau golongan ekonomi lemah. Pada waktu itu perkembangan Koperasi justru terkendala oleh Undang Undang yang mengatur keberadaan Koperasi . Karena aturan yang sangat berat itulah maka lahirlah Koperasi- Koperasi liar. Koperasi liar yang dimaksudkan adalah Koperasi yang pendiriannya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Seperti yang terjadi pada tahun 1932, pada waktu itu terdapat sekitar 1.540 buah Koperasi liar dan 172 Koperasi yang disahkan menurut perundang – undangan Koperasi (Sukotjo, 1978 : 32). Beberapa hal yang patut kita catat dari perkembangan koperasi pada waktu itu, bahwa walaupun kebijakan pemerintah kurang mendukung terhadap perkembangan Koperasi, tetapi Koperasi justru betul – betul tumbuh dari bawah atau atas prakarsa dari masyarakat itu sendiri. Salah satu yang menjadi ciri dari Koperasi kebangsaan adalah bahwa gerakan Koperasi ini tumbuh dari bawah secara spontan, sejalan dengan gerakan kebangsaan yang di mulai pada tahun 1908 dengan berdirinya Koperasi – Koperasi dikalangan kaum pribumi. Koperasi juga banyak tumbuh di daerah perkotaan yang beranggotakan kaum pribumi yang berafiliasi dengan gerakan kebangsaan

Pada masa pendudukan Jepang kita dikenalkan dengan bentuk baru yang bernama *Kumiai* dan Ini merupakan Koperasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan cara membubarkan semua badan Koperasi yang sudah ada sebelumnya maka *Kumiai* adalah satu – satunya Koperasi yang ada waktu itu. Pendirian *Kumiai* ini atas perintah penguasa perang dimana semua penduduk harus menjadi anggota. Di wilayah perdesaan *Kumiai* bertugas untuk mengumpulkan hasil bumi bagi kepentingan pemerintah pendudukan Jepang, sedang *Kumiai* di

perkotaan berfungsi sebagai badan penyalur atau pembeli barang-barang konsumsi yang sangat langka pada waktu itu. Kumiai bukanlah sebenar – benarnya Koperasi, tetapi justru melalui Kumiai ini pengalaman ber Koperasi menjadi menyeluruh kesegnap lapisan masyarakat. (Sukotjo, 1978 : 32). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan model Kumiai ini maka sosialisasi tentang Koperasi dapat menembus sampai ke pelosok pedesaan dan pengalaman berkoperasi dapat menyeluruh kesegnap lapisan masyarakat, atau dengan kata lain dapat tersosialisasikan dengan baik namun dengan melihat tugas yang harus dilakukan oleh Kumiai pada waktu itu, maka bisa dikatakan bahwa Kumiai bukanlah sebenar-benarnya Koperasi.

Setelah Indonesia merdeka mulai terasa ada keleluasaan didalam mengembangkan Koperasi terutama dari aspek kebijakan yang berlaku saat itu, Pemerintah sangat mendukung adanya prakarsa gerakan Koperasi. Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas pada aspek regulasi tetapi juga yang berkaitan dengan upaya pengembangan Koperasi untuk menjadi wadah ekonomi rakyat. Pada waktu itu ditumbuhkan kelembagaan- kelembagaan Koperasi seperti: Kelembagaan Kongres Koperasi, Kelembagaan Dewan Koperasi, dan Kelembagaan Undang-Undang Koperasi yang pertama . Fenomena yang muncul pada waktu itu bahwa Koperasi - Koperasi yang sudah ada sebelumnya kemudian beralih kedalam bentuk atau tipe Koperasi Rochdale. Tipe koperasi ini menjadi pilihan karena disamping dianggap lebih lugas, prinsipnya juga jelas dan sudah mendapatkan pengakuan secara luas. Asas – asas Koperasi Rochdale berasal dari koperasi konsumen di kota Rochdale Inggris pada tahun 1844, dan telah dirumuskan kembali oleh International Co-operative Alliance (ICA). Di Indonesia prinsip tersebut kemudian dimasukkan kedalam sendi dasar koperasi di dalam Undang Undang Koperasi.

Perjalanan Koperasi pada periode berikutnya menjadi sangat berbeda karena Koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, setelah kemerdekaan kemudian diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi di dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan Koperasi (Noer Soetrisno, 2003). Dalam kurun waktu itu pemerintah sangat mendorong prakarsa dan keaktifan gerakan Koperasi, dan disamping itu diupayakan juga pembentukan Koperasi desa yang lebih banyak bergerak disektor pertanian. Koperasi pada waktu itu benar – benar dijadikan sarana untuk memajukan ekonomi rakyat. Dalam kaitannya dengan kedudukan Koperasi dijelaskan di dalam peraturan Koperasi no 179 tahun 1949 bahwa Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Di samping itu disebutkan juga bahwa asas dari Koperasi adalah kebersamaan dan suka rela.

Antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, Koperasi Indonesia memasuki babakan baru dimana keberadaan Koperasi menjadi salah satu bagian dari program pemerintah. Gerakan Koperasi berada dibawah satu komando, dan

pimpinan koperasi dipegang oleh pimpinan instansi yang menangani Koperasi.. Hal yang kemudian tampak jelas dengan adanya sistem komando ini adalah bahwa **Koperasi – Koperasi yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah** tampak dapat berkembang dengan pesat sementara Koperasi – Koperasi yang tidak mendapat fasilitas berkembang lebih lambat. Satu hal yang harus diingat bahwa perkembangan atau kemajuan Koperasi di sini bukan karena inisiatif dari bawah atau dari para anggota, tetapi karena prakarsa dan fasilitas dari pemerintah. Bukti bahwa kemajuan Koperasi karena digerakkan dari atas bisa dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah koperasi melonjak tajam. Apabila pada tahun 1961 jumlah koperasi sebanyak tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh (38.590), setahun kemudian (1962) meningkat menjadi lima puluh ribu seratus lima puluh delapan (50.158), tahun berikutnya (1963) berjumlah lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima (59.185), tahun 1964 meningkat lagi menjadi enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam (62.376), dan mencapai puncaknya di tahun 1965 sebesar tujuh puluh ribu empat puluh sembilan (70.049), (Chaniago, 1984 :120). Koperasi pada waktu itu bisa dikatakan lebih merupakan gerakan massa, dan keanggotaan Koperasi kemudian juga hanya dipandang sebagai massa politik semata-mata. Dalam keadaan inflasi dan tata ekonomi komando di waktu itu, Koperasi yang berkembang terutama adalah Koperasi distribusi dan Koperasi yang mendapatkan fasilitas jatah (Sukotjo, 1978 : 56). Sementara itu pada saat dihadapkan pada kondisi inflasi, banyak Koperasi yang mengubah diri menjadi koperasi serba usaha, ini dimaksudkan untuk mempermudah perubahan usaha yang dijalankan.

Kalau Pada masa orde lama kita mengenal adanya program swa semba da beras yang ingin menampilkan keberhasilan pemerintah dalam penyediaan komonditi beras sehingga harga beras menjadi murah, walaupun realitanya kita masih juga mengimport beras, demikian juga yang terjadi pada masa orde baru, pemerintah menciptakan lembaga yang berfungsi untuk mengendalikan harga beras seperti Bulog. Kemudian melalui Departemen Pertanian pemerintah memberi paket BIMAS, dan melalui BRI memberikan paket kredit pada petani. Petani mempunyai tanggung jawab untuk menanam padi yang sesuai dengan kehendak pemerintah. Petani juga harus menyesuaikan diri dengan patokan pemerintah tentang harga dasar gabah (Sunartiningsih, 1998 : 82). Keberadaan Koperasi di tingkat desa yang kemudian oleh pemerintah diseragamkan dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD), mau tidak mau harus tunduk kepada kebijakan pemerintah yang sifatnya lebih makro. Pemerintah dalam hal ini benar – benar memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengarahkan gerak Koperasi, **bukan hanya karena** kekuatan politik yang dimilikinya tetapi juga kekuatan ekonomi yang dijelmakan menjadi Bulog, Dolog dan Bank. Sejak saat itulah dikenal adanya dua (2) pola pengembangan Koperasi di Indonesia yaitu : *pertama*, Koperasi yang mengacu pada pola umum yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok perkoperasian no 12 tahun 1967 di mana Koperasi ini terdapat di wilayah perkotaan. dan *kedua* adalah Koperasi yang mengacu pada pola Koperasi Unit Desa (KUD), di mana

pola ini dikembangkan sejalan dengan pembangunan ekonomi pedesaan yang menjadi prioritas pembangunan pada waktu itu.

Kemunculan Koperasi Unit Desa (KUD) tidak didasarkan pada UU Pokok Perkoperasian tetapi berdasarkan pada adanya Instruksi Presiden (Inpres). beberapa Inpres yang mengatur tentang keberadaan Koperasi Unit desa diantaranya adalah :

- Inpres No 4 tahun 1973 tentang pembentukan BUUD dan KUD.
- Inpres No 2 tahun 1978 tentang BUUD / KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi pedesaan.
- Inpres No 4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD

Pada awalnya pemerintah berkomitment bahwa KUD yang dibinanya ini pada akhirnya akan menjelma menjadi Koperasi yang mandiri seperti yang terjadi pada Koperasi pada umumnya. Persoalan ini sebenarnya tidak akan menjadi terlalu rumit apabila pemerintah konsisten dengan kebijakan yang telah dibuatnya, misalnya dengan pentahapan yang telah ditetapkan bahwa pembinaan terhadap KUD akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu *pertama*, tahap ofisialisasi , dimana KUD diberi bimbingan, penyuluhan, bantuan usaha, manajemen dan modal. *Kedua*, tahap deofisialisasi, dimana pembinaan pemerintah diarahkan pada usaha – usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan KUD. Dan *ketiga* , tahap otonomi dimana pembinaan sudah diarahkan pada upaya untuk menjadikan KUD sebagai organisasi yang tangguh, yang akhirnya akan menjadi Koperasi mandiri sejajar dengan Koperasi yang mengacu pada pola umum. Realita di lapangan tidak begitu tampak hasil dari pembinaan pemerintah yang mengacu pada pentahapan tersebut, yang lebih tampak bahwa pembinaan Koperasi didominasi oleh warna KUD. Dan didalam kenyataannya tidak terlihat jelas implikasi operasional dari kebijakan pemerintah tersebut. Kondisi ini menjadi berbahaya ketika institusi – institusi yang berwenang membina KUD tetap memandang bahwa KUD sekedar badan yang dikendalikan pemerintah dan lepas dari kepentingan serta kebutuhan anggota Koperasi dan masyarakat, akibatnya kondisi KUD semakin jauh dari harapan untuk menjadi Koperasi yang mandiri.

Pengkaitan Koperasi dengan program pembangunan telah menimbulkan permasalahan dalam hal pembinaan. Pembangunan mempunyai irama dan tuntutan tersendiri yang kadang tidak sepenuhnya serasi dengan irama dan pandangan yang berkembang di dalam Koperasi. Pembangunan selalu terikat dengan target sehingga seringkali mengharuskan untuk mengambil keputusan secara cepat sehingga melahirkan struktur manajemen yang bersifat *top down*. Rupanya pemerintah hendak mengarahkan pembangunan Koperasi ini sejalan dengan program pemerintah di sektor – sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Menarik untuk disimak bahwa perkembangan koperasi yang menonjol pada waktu itu didominasi oleh Koperasi Unit Desa . Dari sejumlah 22.980 koperasi pada tahun 1976, Jumlah KUD mencapai 8.878 unit

dan Koperasi golongan fungsional mencapai 7.875 unit. Sementara koperasi yang dapat dikategorikan sebagai koperasi primer seperti produsen hanya meliputi 2.218 unit, koperasi konsumen sebanyak 1.060 unit dan koperasi simpan pinjam hanya 1.026 unit.

Pola pembinaan yang berbeda dari pemerintah terhadap Koperasi - Koperasi yang ada ini telah pula mengakibatkan perkembangan yang berbeda terhadap Koperasi – Koperasi di Indonesia. Sementara itu marjinalisasi di level masyarakat desa terjadi karena program-program dan kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan di level makro dari pada pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat desa itu sendiri. Seperti yang terjadi waktu itu bahwa KUD telah dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan yang terjadi selama Pembangunan Jangka Panjang I, yang menjadi ciri menonjol dalam politik pembangunan Koperasi dan telah menghambat Koperasi – Koperasi yang lain tidak memiliki akses yang cukup luas untuk mengembangkan diri mereka. Bahkan Koperasi Unit Desa secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, TRI dan lain – lain sampai dengan penciptaan monopoli cengkeh.

Seiring dengan bergulirnya reformasi, perkembangan Koperasi mengalami sedikit perubahan. Pada era reformasi pembinaan terhadap KUD menjadi surut dan ada upaya untuk mendudukkan kembali Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Pada tahun 1997 jumlah koperasi diperkirakan ada 42.000 unit, dan Koperasi non KUD berjumlah 33.000 unit. Perkembangan berikutnya Koperasi ditempelkan pada program – program lembaga pemerintah seperti yang terjadi pada program pembangunan pedesaan yang dikembangkan dengan menggunakan mekanisme pembentukan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Program Inpres Desa Tertinggal misalnya mempersyaratkan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai wadah kegiatan sosial ekonomi produktif yang dapat memberikan penghasilan yang berkelanjutan. (Sunartiningih dan Hempri Suyatno 2009 : 117). Disamping itu terdapat juga Lembaga Keuangan Mikro yang dimunculkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang penyelenggaraannya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Bentuknya Bank khusus (Bank Muamalat), Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan yang bukan bank terdiri dari Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang dikembangkan oleh organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah.

Banyaknya program yang dilakukan oleh banyak pihak diharapkan dapat lebih cepat memakmurkan masyarakat miskin, namun yang terjadi hasilnya sering kali justru kontra produktif. Dalam waktu yang bersamaan dari berbagai instansi yang berbeda telah memberikan program ke desa – desa dan dengan metode dan ketentuan yang berbeda pula. Tumpang tindih tidak dapat dihindari, pengulangan sering terjadi tetapi pada saat yang bersamaan banyak aspek yang dibutuhkan justru tidak dilayani (Bayu Krisnamurti : 2002). Harus diakui bahwa dalam be-

berapa kasus, kebijakan yang dilakukan lebih banyak membawa norma dan pemahaman dari luar dari pada mengakomodasi apa yang sudah teruji berkembang dalam masyarakat. Kebijakan pengembangan yang dilakukan cenderung bersifat ad-hoc dan parsial, akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalaupun ada kurang diberi tempat semestinya.

Namun demikian harus pula disadari bahwa melalui program-program tersebut pengalaman berkoperasi mulai menyebar luas kembali, utamanya untuk Koperasi Simpan Pinjam (Kredit). Noer Soetrisno mengungkapkan Memasuki tahun 2000 posisi Koperasi Indonesia pada dasarnya justru di dominasi oleh Koperasi Kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset Koperasi dan dilihat dari populasi Koperasi yang terkait dengan proram pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi Koperasi atau sekitar 35% dari populasi Koperasi aktif (Noer Soetrisno, 2003). Pada akhir – akhir ini posisi Koperasi dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian Koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi Koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian Koperasi (Noer Soetrisno, 2003).

C. Memfungsikan Koperasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Setelah pembangunan yang dilaksanakan dirasa kurang dapat membawa keberhasilan di bidang pertanian, pemerintah berkeinginan untuk tetap melaksanakan pemerataan pembangunan. Maka diturunkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat individual maupun yang dengan basis kelompok seperti :

- IDT (1993 – 1998) dilaksanakan pada pelita VI yang pada pelaksanaannya dana diturunkan langsung ke masyarakat tanpa birokrasi departemen dan pemerintah daerah.
- Program JPS (2002 ,P 4 K (proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil), KUBE (kelompok usaha bersama).
- TPSP-KUD (tempat pelayanan simpan pinjam koperasi unit desa).
- UEDSP (usaha ekonomi desa simpan pinjam).
- PKT (pengembangan kawasan terpadu).
- P3DT (pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal).
- PPK (program pengembangan kecamatan)
- P2KP (program penanggulangan kemiskinan perkotaan)
- PDMDKE (pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi.
- P2MPD (proyek pembangunan masyarakat dan pemerintah daerah).
- ASKESKIN (asuransi kesehatan untuk orang miskin)

- BLT (bantuan langsung tunai).
- PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri) (Susetiwawan dalam Maryam Fitrhiati : 2013 : 48).

Dari program – program yang diturunkan tersebut, sebagian besar pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk semacam Koperasi atau usaha bersama sebagai wadah kegiatan ekonominya.

Dari banyaknya program pengentasan kemiskinan tersebut tampak bahwa Koperasi mulai ditempelkan pada program – program pemerintah maupun non pemerintah. Kita sadari bahwa perkembangan Koperasi di Indonesia memang masih lambat, bahkan sering tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah. Namun demikian satu hal yang harus dipahami bahwa Koperasi sejak kelahirannya memang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama – sama, oleh karena itu dasar *self help and cooperation* atau *individualitet dan solidaritet* selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian Koperasi. Demikian juga asas kebersamaan dan kekeluargaan adalah dua asas yang menjadi satu kesatuan yang saling jalin menjalin. Antara asas kebersamaan dan asas kekeluargaan memang dua sejoli yang saling memiliki sentuhan nilai dan makna, namun sama sekali bukanlah suatu *tautology*, tetapi bahkan merupakan suatu *necessary redundancy*, yang mengukuhkan suatu soliditas pemaknaan ide yang tunggal (Swasono, 2002 : 40). Dasar ini tidak boleh dilepaskan dan senantiasa harus melekat pada gerakan Koperasi, terlepas dari pihak manapun yang hendak mengembangkan Koperasi.

Dasar yang ada di dalam Koperasi itulah sebenarnya yang bisa membuat Koperasi bertahan dalam segala situasi. Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan ternyata Koperasi mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro ditengah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif. Bahkan Koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh di atas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter Koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem Koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata (Noer Soetrisno : 2003). Demikian juga saat krisis ekonomi telah membuktikan bahwa ketika pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan koperasi, justru terkuak kekuatan swadaya Koperasi.

Pengalaman berkoperasi kita menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran ganda dalam pengembangan Koperasi yaitu fungsi *regulatory dan development*, Kondisi yang ada menunjukkan perlunya bantuan pemerintah untuk mengembangkan Koperasi. Apabila diyakini bahwa Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka semestinya Koperasi dikembangkan secara sungguh – sungguh, sikap – sikap mengambang

dalam mengembangkan Koperasi hendaklah mulai ditinggalkan, menjadikan Koperasi sebagai alat kepentingan politik sudah waktunya untuk dihentikan, karena hanya akan memperparah kondisi Koperasi yang memang masih lemah. Yang diperlukan adalah sikap yang tegas disertai rasa tulus ikhlas untuk berjuang mengembangkan Koperasi karena upaya yang setengah hati hanya akan menuai berbagai kekecewaan.

Sementara itu kita juga dihadapkan pada realita yang lain, persoalan yang kita hadapi sekarang ini menunjukkan bahwa koperasi belum bisa masuk ke dalam sistem ekonomi secara terintegrasi. Posisi koperasi masih sangat lemah bila dibandingkan dengan sektor swasta (konglomerasi) maupun negara. Bahkan kecenderungan kearah oligopoli, monopoli lebih - lebih konsentrasi ekonomi akhir – akhir ini membuat Koperasi semakin sulit untuk masuk ke dalam pasar. Memang dimungkinkan untuk membantu Koperasi dengan memberikan subsidi namun harus disadari bahwa ini bukanlah jalan keluar yang tepat, karena hanya dapat menolong untuk sementara saja karena bisa berakibat keberadaan atau eksistensi Koperasi hanyalah sebatas subsidi yang diterimaya dan setelah subsidi selesai Koperasi tidak memiliki kekuatan lagi.

Kondisi ketidak mampuan Koperasi yang demikian inilah yang kemudian memunculkan kemungkinan lain yaitu pengusaha – pengusaha yang kemudian mendirikan Koperasi. Dalam konteks ini subsidi bisa saja didapatkan dari perorangan ataupun kelompok yang memiliki modal sehingga ada keterjaminan penyediaan modal. Apabila hal ini yang terjadi maka pemilik modal akan dengan mudah mendominasi Koperasi, bahkan mungkin mendirikan Koperasi . Satu hal yang harus diperhatikan apabila kondisi yang demikian ini terjadi maka akan membelenggu kegiatan Koperasi, dan Koperasi akan kehilangan swadayaanya walaupun dari segi permodalan tercukupi. Akibat selanjutnya kegiatan Koperasi kemudian bersifat komplementer dengan hasil – hasil industri oligopolistik.

Mencermati persoalan –persoalan di atas maka sebenarnya yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana membuat Koperasi itu betul – betul dapat berfungsi (fungsional) sebagai lembaga ekonomi rakyat. Dan bagaimana kita bisa berbuat untuk Koperasi agar Koperasi dapat benar – benar bermakna sebagai wadah perekonomian rakyat. Untuk mewujudkannya perlu kerja sama dari berbagai pihak. Negara dengan fungsi regulatornya diharapkan dapat membuat regulasi yang berpihak atau yang memberikan angin segar terhadap sektor – sektor yang sarat dengan kepentingan rakyat termasuk di dalamnya adalah Koperasi. Demikian juga dengan peran developmentnya diharapkan pemerintah dapat mendewasakan Koperasi dan pada gilirannya nanti dapat memandirikan Koperasi. Begitu juga masyarakat hendaknya secara bersama – sama dengan sungguh – sungguh membangun Koperasi dan menciptakan iklim berkoperasi sesuai dengan kapasitas masing – masing.

Untuk itu perlu adanya upaya konkrit untuk mewujudkan Koperasi agar

dapat menjadi wadah ekonomi rakyat dimana didalamnya terdapat anggota – anggota Koperasi yang terdiri dari masyarakat lapisan bawah yang bekerja bersama – sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini diperlukan iklim yang mendukung untuk pengembangan Koperasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Koperasi hanya akan dapat tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki iklim Koperasi. Prof Sri – Edi Swasono memberikan alternatif bagi rakyat Indonesia untuk mengembangkan perekonomian yang sesuai dengan sumber – sumber yang tersedia. Sektor pertanian dan industrialisasi pertanian menjadi pilihan strategis karena posisinya yang berdasar sumber – sumber sendiri (*domestic resources – based*) dan bertitik sentral pada rakyat (*people centered*) dengan sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat (*putting people first*) (Swasono , Kedaulatan Rakyat, 2 Agustus 2002). *Domestic resources based strategy* akan lebih mampu menjamin kemandirian industri di dalam negeri agar tidak terlalu tergantung pada kebutuhan akan komponen luar negeri .

Oleh karena itu menjadi penting untuk diupayakan perlindungan terhadap bidang usaha yang sudah berhasil dikembangkan oleh Koperasi agar tidak dimasuki oleh badan usaha lain, mengingat posisi Koperasi yang masih lemah dalam persaingan usaha. Harus mulai disadari bahwa membangun Koperasi merupakan hal yang sangat mendasar, disini diperlukan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dan diperlukan juga perjuangan yang keras serta ketulusan dalam berusaha. Agar koperasi benar – benar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dan berakar dihati rakyat, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Koperasi, karena Koperasi hanya bisa tumbuh subur diatas pangkuan masyarakat yang bersemangat Koperasi. Perlu disadari pula bahwa Ini bukan pekerjaan yang mudah, diperlukan waktu, kesabaran dan lebih – lebih keyakinan.

Referensi

- Baswir, Revrisond , *Koperasi Dan Kekuasaan Dalam Era Orde Baru* , Kompas 1 Januari 2000.
- Chaniago, Arifinal : *Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1984.
- Hatta, Muhammad : *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta, Inti Idayu Press. 1987
- Kartasaputra dkk : *Koperasi Indonesia, Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985.
- Krisnamurti, Bayu : *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Mencari Format Kebijakan Optimal*, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun I Nomer 2 April 2002

- Noer Soetrisno, *Koperasi Indonesia : potret dan tantangan*, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II Nomer 5 Agustus 2003.
- Noer Soetrisno, *Koperasi Indonesia : Koperasi mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan : menjawab tantangan global dan regionalisme baru*, Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II Nomer 5 Agustus 2003.
- Maryam Fithriati & Nia Settyowati (ed) : *Jalan Menuju Kesejahteraan dari Wacana Hingga Realita*, Azzagrafika, Yogyakarta 2013
- Sukotjo, Wahyu : *Sejarah Perkembangan Permasalahan dan peranan koperasi*, Priasma, juli 1978.
- Sunartiningsih, Agnes, *Reorientasi Pembinaan KUD*, JSP. Vol 2, No 1, Juli 1998.
- Sunartiningsih, Agnes dan Hempri Suyatno : *Ekonomi Rakyat Dalam Pusaran Pasar Bebas*, Media Wacana, Yogyakarta 2009.
- Swasono, Sri Edi : *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2005
- Swasono, Sri Edi *Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Pasar*, Kedaulatan Rakyat, 2 Agustus 2002
- Swasono, Sri Edi, (ed) : *Koperasi Didalam Orde Ekonomi Indonesia*, Jakarta UI Press. 1987
- Tjokrowinoto, Moeljarjo, *Dimensi Sosial Suatu Bentuk Perencanaan Guna Mewujudkan Kemandirian Pembangunan Pedesaan*, makalah seminar Jurusan Ilmu Sosiatri. 1988,
- Undang-Undang Pokok Perkoperasian nomer 12 tahun 1967

Menelusuri Strategi Nafkah (Livelihood Strategies) Dan Diversifikasi Pekerjaan Nelayan Di Wilayah Bencana¹

Oleh : Mahmuddin

Abstrak

Perubahan mendasar yang dialami masyarakat dari imbas bencana tsunami beberapa tahun yang lalu tidak hanya menyangkut aspek psikologis namun juga menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya maupun politik. Salah satu persoalan yang kerap muncul dan masih perlu penanganan serius dari semua pihak menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, terutama masyarakat nelayan yang sebagai besar penduduknya mendiami wilayah sepanjang pesisir pantai yang merupakan daerah terparah dari bencana tersebut. Diversifikasi pekerjaan yang dilakukan nelayan merupakan salah satu proses mekanisme sosial sebagai salah satu bagian penting dari upaya perbaikan struktur ekonomi rumah tangga mereka. Dalam perspektif strategi nafkah (livelihood strategies) apa yang dilakukan para anggota keluarga atau nelayan tidak lain merupakan kebutuhan mendesak memunubi kebutuhan pokok dan upaya mengurai kemiskinan yang masih menjadi momok bagi masyarakat nelayan. Namun demikian, ragam peluang pekerjaan yang dilakukan nelayan sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan lebih terpusat pada upaya memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat subsistensi, dan bukan kebutuhan yang bersifat produktif.

A. Pendahuluan

Tsunami dan gempa bumi yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu telah mengubah Aceh untuk selamanya. Diperkirakan sekitar 300.000 orang di Propinsi Aceh kehilangan sumber mata pencarian utama. Bencana ini mengakibatkan: (a) jumlah korban manusia yang cukup besar, (b) lumpuhnya pelayanan

1. Tema ini diilhami dari reportase kisah nelayan di Aceh pasca Tsunami yang telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi kehidupan nelayan di daerah Krueng Raya Aceh Besar. Perubahan tersebut tidak hanya bermuara dengan masalah kondisi sosial, ekonomi namun juga ekologi dari pekerjaan para nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut. Pasca Tsunami yang berjalan beberapa tahun secara tidak langsung membawa perubahan pada pola nafkah dan sikap nelayan dari kondisi pasca konflik dan Tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu.

dasar, (c) tidak berfungsinya infrastruktur dasar, serta (d) hancurnya sistem sosial dan ekonomi. Bencana berdampak besar pada kondisi psikologis penduduk, lumpuhnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, serta kurang berfungsinya pemerintahan disebabkan oleh hancurnya sarana dan prasarana dasar dan berkurangnya sumberdaya manusia aparatur. Kegiatan produksi termasuk perdagangan dan perbankan mengalami stagnasi total dan memerlukan pemulihan segera. Sistem transportasi dan telekomunikasi juga mengalami gangguan yang serius dan harus segera ditangani agar lokasi bencana dapat segera diakses. Sistem sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat memerlukan revitalisasi untuk memulihkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Aceh.

Dampak tsunami tersebut juga membawa warna lain pada sistem kehidupan masyarakat pesisir di sepanjang garis pantai yang ada di Aceh. Perubahan tersebut tentunya tidak hanya karena menyangkut tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan dalam membangun kembali infrastruktur masyarakat nelayan, namun juga secara tidak langsung secara ekologi membawa iklim baru baru bagi bagi komunitas nelayan untuk dapat mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada sekarang ini. Kendatipun adanya rehabilitasi dan relokasi bagi para komunitas nelayan dengan berbagai program bantuan yang diberikan, tingkat kesejahteraan para nelayan memprihatikan. Tidak kurang tercatat sebanyak 61.789 dari 4,3 penduduk Aceh berprofesi sebagai nelayan (Serambi Indonesia, 19 Februari 2010).

Tahapan pembangunan ekonomi yang dilakukan secara kontiniu dengan berbagai program bantuan yang ada, seperti pendirian rumah yang baru, pemberian pelatihan, bantuan perahu dan kebutuhan untuk melaut hingga pemberian modal kerja bagi para nelayan yang ada di Aceh, namun semua suntikan pembangunan ekonomi tersebut tidak serta merta mampu mengangkat derajat kehidupan rumah tangga nelayan ke taraf yang lebih baik. Sehingga masih banyak para nelayan di Aceh masih hidup dalam garis kemiskinan. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri sebagaimana diilustrasikan Kusnadi (2002) bahwa tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan di mana pun berada. Tingkat kehidupan nelayan berada sedikit di atas pekerja migran atau setaraf dengan petani kecil.

Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, akses, dan jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan. Dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan dan sulitnya memperoleh hasil tangkapan secara maksimal. Beberapa studi tentang tingkat kesejahteraan hidup di kalangan masyarakat nelayan telah menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi atau ketimpangan

pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi nelayan, dan ini tidak mudah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang selalu melilit kehidupan nelayan saat ini.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, isu substansial yang selalu dihadapi keluarga atau rumah tangga nelayan adalah bagaimana individu yang ada di dalamnya dapat berusaha memaksimalkan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melakukan kegiatan tambahan mencari nafkah selain dari pekerjaan rutusnya sebagai seorang nelayan. Kegiatan-kegiatan ekonomi tambahan yang dilakukan oleh anggota-anggota nelayan merupakan sebagian dari strategi adaptasi yang harus ditempuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Ragam peluang pekerjaan yang bisa dimasuki sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia di daerah nelayan tersebut dan ini semua tidak lain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat subsistensi, bukan kebutuhan yang bersifat produktif.

Berangkat dari gambaran kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi nelayan saat ini, terutama di daerah-daerah bencana menunjukkan perubahan yang cukup signifikan tidak hanya menyangkut kebutuhan ekonomi, sosial namun juga bagaimana para nelayan harus melakukan diversifikasi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif strategi nafkah (*livelihood strategies*) apa yang dilakukan para anggota keluarga atau nelayan itu sendiri merupakan kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal mendesak harus dicermati menyangkut diversifikasi pekerjaan para nelayan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan permasalahan yang akan muncul dari pilihan diversifikasi tersebut.

B. Landasan Filosofis: Kemiskinan, Tindakan Ekonomi, dan Livelihood Strategies

Bila membaca format masyarakat agraris, tekanan kapitalisme seringkali melahirkan pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke non-pertanian yang kemudian berangsur-angsur sektor pertanian menjadi lemah dan diambil alih sepenuhnya oleh sektor lain seperti non-pertanian. Hal ini terjadi karena kemampuan daya tampung pertanian yang sangat terbatas, sedangkan sektor non-pertanian lainnya, seperti industri ataupun jasa jauh lebih besar menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Agak berbeda dengan masyarakat pesisir, yang sebagian besar adalah nelayan seperti di wilayah pesisir Aceh (daerah pantai) yang kegiatan penangkapan ikan di laut tetap menjadi sektor yang sulit tergantikan kendatipun pola sosial-ekonomi masyarakat nelayan jauh berbeda sejak pasca bencana Tsunami pada beberapa tahun yang lalu. Hal ini terkait dengan sifat laut yang *open access* dan *common property* tersebut, sehingga hampir setiap orang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang ada di laut. Sedangkan dalam masyarakat agraris

yang lebih dipresentasikan dengan petani, dimana masyarakatnya tergantung pada lahan yang sifatnya adalah *private property*, sehingga hanya yang memiliki lahan saja yang bisa memanfaatkannya.

Dalam konteks ini, kemudian terdapat perbedaan karakteristik antara komunitas pesisir nelayan dengan komunitas petani sawah. Komunitas nelayan dan komunitas nelayan dan komunitas pertanian menghadapi sumberdaya yang sama sekali berbeda. Pada komunitas pesisir nelayan menghadapi sumber daya yang sampai saat ini masih bersifat *open access*. Sumber daya tersebut mengharuskan para nelayan menjelajah hingga ke wilayah yang sangat jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Terlebih lagi, jumlah nelayan semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian beban resiko yang harus ditanggung oleh nelayan menjadi semakin tinggi. Kondisi sumber daya semacam ini menyebabkan iklim karakter yang lebih keras, tegas dan terbuka (Satria, 2002). Sedangkan pada petani tidak menghadapi masalah dengan sumberdaya yang sebagaimana pada nelayan. Petani berhadapan dengan sumberdaya yang relatif terkontrol, dengan mengelola lahan suatu komoditas dengan hasil yang dapat diperkirakan.

Tabel karakter sumberdaya masyarakat petani-nelayan

Unsur	Petani	Nelayan
Sumberdaya alam yang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada lahan - Dapat diperkirakan - Resiko kecil - Sifatnya permanen - <i>Private property</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada produktifitas laut - Sulit untuk diperkirakan - Resiko tinggi - <i>Common property</i>
Mobilitas	Rendah, karena sumberdaya yang dihadapi permanen	Tinggi, karena berhubungan dengan laut untuk memperoleh hasil yang maksimal

Diadaptasi dari beberapa sumber (Kusnadi, 2002; Yustika, 2003)

Kendatipun demikian, Firth (dalam Satria, 2002) tidak membedakan antara petani dan nelayan, dengan penjelasan bahwa sifat usaha mereka yang berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana. Sedangkan eksploitasi seringkali terjadi dengan kerjasama dan sebagai besar tergantung pada produksi yang bersifat subsisten. Dialektika ini menjadi pola tersendiri manakala persoalan sosial ekonomi masyarakat petani dan nelayan tidak terlepas dengan apa yang sering disebutkan sebagai bagian dari masalah kemiskinan yang menyebabkan dinamika kehidupan masyarakat nelayan dan petani selalu berubah dan bersifat subsisten. Petani akan tergantung antara petani berlahan luas dan petani berlahan sempit. Sedangkan dalam keluarga nelayan lebih mengacu pada penguasaan aset yang sangat kecil. Hal ini mengingatkan pada gambaran Smith (dalam Kusnadi 2002) yang menyebutkan bahwa masyarakat nelayan memiliki ciri rendahnya tingkat kehidupan masyarakatnya. Ciri-ciri kemiskinan sangat tam-

pak pada masyarakat nelayan. Hal ini bisa ditemukan pada pola hidup dan ketersediaan kebutuhan sehari-hari yang sangat memprihatinkan.

Bila menelusuri penyebab kemiskinan dalam komunitas nelayan dapat berpangkal pada tiga jalur (Kusnadi, 2001). Pertama, faktor fluktuasi musim penangkapan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Pada musim ikan, intensitas operasi penangkapan ikan meningkat. Karena hasrat untuk memperoleh hasil tangkapan sangat kuat, nelayan sering mengabaikan bahaya akibat kondisi iklim dan cuaca yang berubah. Tingkat penghasilan akan berkurang ketika mulai memasuki bulan musim kemarau. Pada musim ini tingkat penghasilan nelayan sangat minim dan seringkali tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Kedua, ketimpangan nisbah ekonomi antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Dengan pola sistem bagi hasil yang sering dilakukan nelayan akan sangat menguntungkan pemilik kapal dan merugikan nelayan buruh. Kesenjangan pendapatan antara pemilik kapal dan nelayan buruh akan semakin besar bila alat yang digunakan dan kapal yang dipakai semakin modern. Apabila kapal yang digunakan tidak terlalu canggih, biasanya sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan pola bagi tiga bagian, dimana pemilik sampan memperoleh dua bagian dan nelayan buruh mendapatkan satu bagian (setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya operasional). Bisa dibayangkan bila kemudian dalam relasi yang asimetris tersebut nelayan buruh selalu tertinggal dalam akumulasi kesejahteraan ekonomi sehingga posisi hidupnya selalu dalam iklim kemiskinan. Ketiga, walaupun nelayan biasanya memperoleh tangkapan yang relatif banyak, keadaan demikian belum tentu menjamin bahwa nelayan akan memperoleh nilai tukar yang memadai. Jaringan pemasaran ikan dikuasai oleh para pedagang perantara. Hubungan antara nelayan dan pedagang perantara sangat kuat dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nelayan menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang perantara untuk mengatasi kesulitan modal usaha dan memasarkan hasil tangkapan yang mudah menurun kualitasnya. Akan tetapi, dalam hubungan kerjasama tersebut nelayan selalu kurang diuntungkan. Sedangkan pada musim panen, penghasilannya habis untuk membayar hutang. Fakta inilah yang menyebabkan sepanjang tahun nelayan selalu berkeat dengan ketidakcukupan papan. Artinya seperti disebutkan Lewis (1981) dimana nelayan terperangkap dalam budaya kemiskinan. Hal yang sama pula disebutkan Sitorus (1999) keluarga nelayan lebih mengacu pada penguasaan aset yang sangat kecil. Sehingga aset produksi yang dimiliki dalam jumlah yang sangat minim dan terbatas.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Kondisi kemiskinan ini berkaitan erat dengan pendapatan rumah tangga. Menurut teori Marxisme, dalam masyarakat yang menganut ekonomi pasaran bebas, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Karenanya tidak mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk

angka-angka. Ini seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang saat ini masih menjadi perdebatan. Dengan kata lain, tidaklah mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan. Artinya kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kuantitas tetapi juga kualitas. (Usman, 2003).

Kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan di masyarakat nelayan merupakan hal yang krusial yang selalu dihadapi oleh komunitas nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil atau nelayan tradisional. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan nelayan. Faktor tersebut saling berantai dalam hubungan kausalitas yang kompleks sehingga tidak mudah memutuskan mata rantai kemiskinan tersebut. Dan memang harus disadari bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kehidupan telah membatasi akses ekonomi anggota keluarga nelayan. Selain itu dengan tingkat pergulatan hidup sangat menyita tenaga, pikiran para keluarga nelayan untuk mencari alternatif memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan hingga tidak sempat lagi memperhatikan kepentingan lingkungan masyarakatnya, karena harus memenuhi kebutuhan konsumtif sebagai kebutuhan mendesak. Karenanya tututan kemiskinan inilah yang menyebabkan diversifikasi pekerjaan menjadi pilihan dari masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dilihat dari sisi tindakan ekonomi, pelaku diasumsikan mempunyai kondisi yang tetap dan ditentukan oleh satuan pilihan dan alternatif tindakan untuk memaksimalkan profit. Tindakan ekonomi dilakukan dengan efesian yang berkaitan dengan sumber daya yang langka. Untuk tahap ini sosiologi mempunyai pandangan yang lebih luas sebagaimana disebutkan Weber, bahwa secara konvensional memaksimalkan "utility" dikatakan sebagai terminologi kuantitatif atau dianggap sebagai rasional formal. Dalam sosiologi juga dikenal dengan rasional substantif yang mengacu pada pengalokasian dengan sejumlah prinsip seperti loyalitas komunal atau nilai-nilai yang luhur. (Damsar, 2002).

Weber menjelaskan tindakan akan dikatakan berorientasikan secara ekonomi sepanjang sesuai dengan makna subjektifnya, yang difokuskan pada pemenuhan terhadap suatu kebutuhan atau *utility*. Juga disebutkan bahwa tindakan ekonomi adalah tindakan yang oleh aktor dianggap aman bagi kontrol aktor atas sumberdaya, terutama yang berorientasi ekonomi. Menurut Weber (Damsar, 2002) bahwa tindakan ekonomi adalah tindakan sosial, tindakan ekonomi selalu melibatkan makna dan tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Tindakan ekonomi diinspirasi oleh habit, norma dan interest, artinya tindakan ekonomi dapat berupa rasional, tradisinal dan spekulatif-rasional. Hal inilah yang membedakan dengan pendekatan ekonomi yang tidak memberi ruang bagi tindakan tradisinal. Tindakan ekonomi merupakan hubungan dua aktif atau lebih berorientasi satu sama lain, membentuk hubungan ekonomi. Hubungan tersebut dapat beragam ekspresi, mencakup konflik, kompetisi, dan upaya menguasai kekuasaan. Melalui analisis tindakan ekonominya Weber tersebut bagaimana se-

benarnya rumah tangga nelayan melakukan aktivitas ekonominya dalam rangka bertahan dan meningkatkan taraf hidupnya yang didasarkan oleh rasionalitas, tradisional dan spekulatif-rasional.

Dalam upaya memperjuangkan kehidupan ekonominya rumahtangga petani atau nelayan biasanya akan melakukan diversifikasi sumber nafkah yaitu proses yang dilakukan oleh keluarga pedesaan untuk melakukan berbagai aktivitas dan kemampuan dorongan sosial mereka dalam berjuang untuk bertahan hidup untuk meningkatkan standar hidup. Secara luas bahwa adanya diversifikasi nafkah tidak sekedar bertahan hidup yang dikonotasikan sebagai resistensi, artinya seolah-oleh tidak berkembang. Oleh karena itu strategi nafkah selain bertahan hidup tetapi juga berusaha memperbaiki standar hidup (Ellis, 1998; Redelift, 1986).

Menurut Ellis (1998) pembentukan strategi nafkah dibedakan menjadi 3 elemen, yaitu pertama berasal dari on-farm; merupakan strategi nafkah yang didasarkan dari sumber hasil pertanian dalam arti luas. Kedua, dari off-farm yaitu dapat berupa upah tenaga kerja pertanian, sistem bagi hasil, kontrak upah tenaga kerja non upah dan lain-lain. Ketiga berasal dari non-farm, yaitu sumber yang berasal diluar kegiatan pertanian yang dibagi menjadi 5 bagian. (1) upah tenaga kerja pedesaan bukan pertanian, (2) usaha sendiri diluar kegiatan pertanian, (3) pendapatan dari hak milik, (4) kiriman dari buruh migran yang pergi ke luar negeri dan (5) kiriman dari buruh migran yang pergi ke luar negeri. Namun dalam kenyataannya klasifikasi tersebut dibagi atas sektor pertanian dan sektor non pertanian.

Strategi nafkah atau yang lebih dikenal dengan *livelihood strategies* adalah berbagai kombinasi dari aktivitas-aktivitas dan pilihan-pilihan kegiatan nafkah yang dilakukan orang untuk mencapai kebutuhan dan tujuan kehidupan. Suatu bentuk strategi dicirikan dengan perbedaan secara geografis, lintas sektor, diantara dan di dalam rumah tangga dan di luar batas waktu.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya telah lama rumah tangga miskin di pedesaan Jawa umumnya berusaha melakukan pola pekerjaan ganda (White, 1980;). Pekerjaan tersebut seringkali merupakan pola kombinasi pekerjaan berbasis pertanian dan non pertanian. White (1990) memperlihatkan bahwa strategi nafkah ganda antara lapisan yang ada dalam masyarakat dapat berbeda satu sama lain, yaitu :

1. Lapisan atas, dimana pola nafkah ganda merupakan strategi akumulasi dimana surplus pertanian mampu membesarkan usaha luar pertanian atau sebaliknya.
2. Lapisan tengah, pola nafkah ganda merupakan strategi bertahan atau konsolidasi dimana sektor non pertanian dipertimbangkan sebagai potensi perkembangan ekonomi.
3. Lapisan bawah, merupakan pola strategi “utamakan keselamatan”

(survival strategy), dimana sektor non pertanian merupakan sumber ekonomi untuk menutupi kekurangan dari sektor pertanian.

Carner (1998) menjelaskan terdapat beberapa pola strategi yang dikembangkan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan antara lain:

1. Melakukan beraneka ragam pekerjaan untuk memperoleh penghasilan.
2. Jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih kurang memadai, penduduk akan berpaling kepada sistem penunjang yang ada di lingkungannya.
3. Volume bekerja lebih banyak meskipun tidak sesuai dengan pemasukan sebelumnya. Strategi yang bersifat ekonomis dapat dilakukan untuk mengurangi kebutuhan sehari-hari.
4. Alternatif lain dipilih jika ketiga alternatif di atas sulit dilakukan dan kemungkinan untuk bertahan hidup di desa sudah sangat kritis. Rumah tangga miskin harus menghadapi pilihan terakhir untuk meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota. Keputusan ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan berdasarkan pilihan rasional yang telah ada sebelumnya dari anggota keluarga yang sudah bekerja di kota.

Kajian mazhab Bogor juga menunjukkan bahwa strategi nafkah yang dibangun di atas dua basis nafkah rumah tangga petani di pedesaan (pertanian dan non pertanian), akan sangat ditentukan oleh sistem sosial setempat. Terdapat tiga elemen sistem sosial terpenting yang sangat menentukan dalam bentuk strategi nafkah yang dibangun oleh petani kecil dan rumah tangganya. Ketiga elemen tersebut adalah pertama infrastruktur sosial (*setting* kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku), kedua struktur sosial (*setting* lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, pola pemanfaatan ekosistem lokal, pengetahuan lokal); ketiga supra struktur sosial (*setting* ideologi dan sistem nilai yang berlaku) (Dharmawan, 2007). Pada titik inilah hubungan strategi nafkah dan kemiskinan menjadi penting untuk membaca kontribusi yang dilakukan nelayan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

C. Kerangka Teoritik-Konseptual : Strategi Adaptasi

Dalam rangka mempertahankan kehidupannya manusia dituntut untuk melakukan adaptasi. Dalam hal ini adaptasi menunjuk pada suatu proses timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari sudut pandang evolusi biologi, adaptasi dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemungkinan makhluk hidup bisa bertahan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya pada kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian adaptasi adalah produk dari seleksi alam. Sebaliknya dari sisi antropologi ekologi, adaptasi

didefinisikan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya untuk mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial (Kusnadi,2002). Kapasitas manusia untuk dapat beradaptasi ditunjukkan dengan usahanya untuk mencoba mengelola dan bertahan dalam kondisi lingkungannya. Kemampuan suatu individu untuk beradaptasi mempunyai nilai bagi kelangsungan hidupnya. Makin besar kemampuan adaptasi suatu makhluk hidup, makin besar pula kemungkinan kelangsungan hidup makhluk tersebut.

Dengan demikian, adaptasi merupakan suatu proses di mana suatu individu berusaha memaksimalkan kesempatan hidupnya. Aspek kebudayaan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan adaptasi manusia terhadap lingkungan adalah aspek-aspek kebudayaan yang berupa sistem teknologi mata-pencarian dan pola pemukiman. Keduanya dapat memperlihatkan usaha-usaha manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pengaruh lingkungan terhadap sistem kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara fungsional dan secara prosesual.

Perspektif ekologi fungsional maupun prosesual membedakan lingkungan sebagai unit analisis dalam dua kategori yaitu lingkungan fisik dan lingkungan alam. Keduanya dapat mempengaruhi pola-pola adaptasi dan jalannya proses kebudayaan. Perspektif fungsional, dengan berdasarkan pada teori sistem memfokuskan analisisnya pada penjelasan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap ekosistem untuk selalu berada dalam kondisi yang stabil. Interaksi antara setiap komunitas dengan lingkungannya dalam sebuah relung ekologi bertujuan untuk selalu menjaga kondisi sistem itu dalam keadaan stabil. Sedangkan perpektif prosesual melihat kaitan antara lingkungan dengan munculnya suatu pola adaptasi terutama dalam sistem kebudayaan. Karena berkaitan dengan proses, maka ekosistem tidak dianggap stabil tetapi selalu berada dalam keadaan dinamis. Kedua perspektif tersebut di atas melatarbelakangi pula penjelasan usaha-usaha penyesuaian dan respons manusia terhadap pengaruh lingkungan. Dengan kata lain, adaptasi manusia dapat dipahami secara fungsional dan prosesual. Adaptasi secara fungsional adalah respons dari suatu organisme atau sistem yang bertujuan untuk mempertahankan keadaan homeostatis, sehingga dalam hal ini istilah adaptasi mengacu pada fungsi yang terjadi pada dimensi waktu tertentu. Sedangkan adaptasi prosesual adalah sistem tingkahlaku yang terbentuk sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungan di sekitarnya.

Perilaku adaptasi ini bermula dari individu atau sekelompok individu yang kreatif dalam masyarakat. Mereka memberikan tanggapan terhadap masalah lingkungan yang timbul, baik dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Tanggapan ini berkesinambungan, kemudian tanggapan ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mereka. Pengambilan keputusan ini berdasar kemampuan penyesuaian diri secara rasional dan situasional dari pengalaman dan pengetahuan mereka tentang lingkungan yang berubah dengan masalah

yang ditimbulkannya. Persepsi manusia terhadap lingkungan dapat dibentuk dari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan lingkungan melalui rangsangan-rangsangan yang diterima; atau berupa tanggapan manusia terhadap lingkungan yang terdapat dalam pikirannya. Proses manusia memperoleh pengetahuan lingkungan ini ditentukan oleh faktor kebudayaan yang menjadi pedoman yang diikutinya sehingga membentuk pandangan yang bersifat individual. Peranan kebudayaan di sini bersifat menyaring terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar lingkungan.

Dengan demikian, pendekatan yang diambil dalam studi ini difokuskan pada kajian tentang pilihan-pilihan tindakan yang diambil dalam rangka pemanfaatan lingkungan sumber-daya. Suatu pilihan tindakan di dalam pemanfaatan sumberdaya dianggap tepat apabila tindakan tersebut dirasa menguntungkan dirinya. Hal ini didasarkan atas perhitungan rugi-laba dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan berjenjang yang dilakukan secara berulang-ulang. Pilihan-pilihan tindakan ini sangat tergantung pada bagaimana manusia membuat persepsi terhadap lingkungan. Proses adaptasi lingkungan dan evolusi budaya dapat berlangsung pada setiap komunitas yang hidup di setiap tipe ekosistem. Ekosistem persawahan dengan teknologi sawah irigasi membentuk pola interaksi yang spesifik antara komunitas petani dengan lingkungannya, demikian pula halnya dengan komunitas masyarakat pantai yang membentuk pola adaptasi dengan ekosistem lingkungan fisik laut dan lingkungan sosial sekitarnya. Proses adaptasi ini kemudian menentukan proses perkembangan atau evolusi budaya yang terjadi pada masing-masing komunitas tersebut.

Dalam hal ini Firth (dalam Iqbal, 2004) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan memiliki paling sedikit lima karakteristik yang membedakan dengan petani pada umumnya. Kelima karakteristik tersebut adalah: *Pertama*, pendapatan nelayan biasanya bersifat harian (*daily increments*) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti apakah ia sebagai juragan. Dengan pendapatannya yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan, dan sangat tergantung pada musim, maka mereka (khususnya nelayan pandega) merasa sangat kesulitan dalam merencanakan penggunaan pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk segera membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit untuk mengakumulasikan modal atau menabung. Pendapatan yang mereka peroleh pada musim penangkapan ikan habis digunakan untuk menutup kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan tersebut. *Kedua*, dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan pada umumnya rendah. *Ketiga*, dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk tersebut yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang. *Keempat*, bahwa bidang perikanan membutuhkan

investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. *Kelima*, kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada mata pencaharian menangkap ikan.

Kehidupan nelayan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam. Keeratan hubungan ini menciptakan ketergantungan nelayan pada lingkungan alam, terutama ketergantungan terhadap sumber daya hayati yang ada di lingkungan alam yang dapat memberikan sumber penghidupan bagi mereka. Hubungan ini bersifat timbal balik, lingkungan alam dapat mempengaruhi nelayan, begitu pula sebaliknya nelayan dapat mempengaruhi lingkungan alam melalui perilakunya. Di kalangan masyarakat nelayan, secara umum terdapat dua bentuk strategi adaptasi. Pertama adalah intersifikasi, yang merupakan strategi adaptasi yang tumbuh di kalangan nelayan untuk melakukan investasi pada teknologi penangkapan, sehingga hasil tangkapannya diharapkan akan lebih banyak. Untuk itu, melalui intensifikasi maka kegiatan penangkapan dapat dilakukan pada daerah yang semakin jauh dari tempat pemukiman, bahkan mungkin memerlukan waktu penangkapan lebih dari satu hari. Strategi adaptasi yang kedua adalah dengan melakukan diversifikasi pekerjaan. Diversifikasi merupakan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian yang dilakukan nelayan, baik di bidang perikanan maupun non perikanan.

Diversifikasi pekerjaan merupakan strategi yang umum dilakukan di banyak komunitas nelayan, dan sifatnya masih tradisional. Ragam peluang kerja yang bisa dimasuki oleh mereka sangat tergantung pada sumber-sumber daya yang tersedia di desa-desa nelayan tersebut. Setiap desa nelayan memiliki karakteristik lingkungan alam dan sosial ekonomi tersendiri, yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Ada desa nelayan yang tersedia peluang cukup besar untuk melakukan diversifikasi pekerjaan, sementara ada desa nelayan lain yang hampir tidak memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi pekerjaan, sehingga sektor kenelayanan menjadi gantungan utama seluruharganya.

D. Strategi Nafkah : Strategi Nafkah Ekonomi dan Strategi Sosial

Pada dasarnya setiap individu mempunyai naluri untuk mempertahankan hidupnya. Hal yang sama juga seperti dilakukan oleh komunitas nelayan dalam upaya mempertahankan hidupnya. Kekuatan ekonomi, sosial dan ekologi menuntut nelayan untuk mampu melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan sistem kehidupannya. Dalam hal ini Dharmawan (2001) mengklasifikasikan dua jenis strategi nafkah dalam keluarga petani (termasuk nelayan) yaitu : (1) strategi nafkah normatif; strategi ini dalam kategori tindakan positif dengan basis kegiatan sosial-ekonomi seperti kegiatan produksi, dan lain-lain yang sifatnya sesuai dengan norma yang berlaku. (2) strategi nafkah ilegal, strategi ini termasuk dalam kategori negatif dengan tindakan yang melanggar hukum.

Ditempat yang lain, strategi nafkah keluarga dibagi ke dalam tiga tingkatan (Dharmawan, 2001) yaitu :

1. Strategi nafkah rumah tangga petani srata bawah

a. Mengerjakan berbagai jenis pekerjaan (*the multiple employment strategy*).

Strategi ini juga dikenal dengan pola nafkah ganda, dan paling sering dipakai oleh rumah tangga petani miskin untuk bisa mempertahankan hidupnya, karena mereka hanya mempunyai tenaga, sedangkan modal dan keahlian yang dimiliki sangat terbatas.

b. Penyebaran tenaga kerja rumah tangga

Rumah tangga petani pedesaan pada umumnya mempunyai anggota keluarga yang besar, potensial tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan guna membantu ekonomi keluarga. Misalnya seorang nelayan bekerja di laut, sedangkan isterinya membuka warung kecil-kecilan.

2. Strategi nafkah keluarga petani menengah

a. Strategi persiapan pertumbuhan

Pada level ini strategi nafkah yang dilakukan bukan untuk sekedar mempertahankan hidup, tetapi juga lebih ditekankan pada bagaimana agat aset yang telah dimiliki semakin berkembang.

b. Strategi produksi rumah tangga

Dengan memiliki modal dan kemampuan untuk mengelola aset, para keluarga petani pada level ini bisa melakukan usaha yang dikelola oleh rumah tangga.

3. Strategi nafkah keluarga petani atas.

Strategi nafkah pada level ini sebenarnya lebih mengacu pada bagaimana mengembangkan aset besar yang sudah dimiliki agar semakin bertambah. Kelompok ini paling besar mempunyai akses ke sumber-sumber produksi disamping memiliki modal dan jaringan sosial yang luas.

Dengan melihat ke tiga level rumah tangga pada strategi nafkah rumah tangga miskin atau pada level bawah ini lah srata paling besar dari keluarga nelayan. Pada keluarga miskin sebenarnya tidak hanya strategi ganda dan penyebaran tenaga kerja keluarga, tetapi juga menggunakan strategi non produksi melalui kelembagaan kesejahteraan setempat. Strategi ini lebih dilihat sebagai strategi sosial dengan lebih mengembangkan unsur-unsur sosial yang ada di dalamnya. Seperti disebutkan Sitorus (1999) bahwa strategi tersebut sering dipakai oleh keluarga miskin, misalnya kelompok arisan dan lain-lain. Lembaga tersebut umumnya menjadi media interaksi sosial dan jaminan berlangsungnya keamanan

ekonomi masyarakat setempat.

Strategi nafkah sesungguhnya timbul pada level individu, tetapi bentuk akhirnya tindakan tersebut didefinisikan pada level rumahtangga karena dalam kerangka kerja pada level rumah tangga, individu tidak sepenuhnya bebas dalam mengambil keputusan, akan tetapi dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya. Dalam tahap operasionalnya, menurut Weber (dalam Dharmawan 2001) bahwa dalam perspektif tindakan ekonomi, strategi *survive* dilakukan pada level individu. Kaitannya dengan term di atas, individu dalam mengambil keputusan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh keluarga sebagai komitmen terhadap aturan dan norma yang diatur dalam masyarakat.

Scoones (1998) ada empat bentuk yang dibutuhkan dalam ekonomi rumah tangga agar strategi nafkah dapat dioperasionalkan ; ketersediaan modal alam dalam bentuk sumber-sumber alam, model ekonomi, ketersediaan sumberdaya manusia dan ketersediaan modal sosial (politik) dalam bentuk hubungan dan jaringan kerja. Dengan ketersediaan sumber tersebut akan sangat mendukung strategi nafkah dalam beragam bentuk, karena ini sangat didasarkan pada aspek kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda dalam sebuah keluarga.

Kondisi struktur ekonomi telah membawa perubahan dan dialektika ekonomi dalam ranah dualistik. Ini sangat terlihat dengan adanya dinamika perkembangan desa dan kota yang selalu tidak berimbang dan seringkali menyudutkan ekonomi desa yang lebih bersifat tradisional. Kehidupan yang serba dualistik ini secara tidak langsung membawa pengaruh yang cukup kuat dalam struktur keluarga hingga pada aras masyarakat. Hal ini baik yang menyangkut pola pendapatan, ataupun pola konsumsi. Dalam konteks ini keluarga nelayan termasuk dalam peta dualisme ekonomi, di tengah munculnya arus modal dan teknologi, kehidupan ekonomi para nelayan akan semakin terpuruk. Sehingga pada gilirannya untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat lapisan bawah harus memaksimalkan kesempatan dan potensi yang dimiliki.

E. Membaca Dari Kasus

Pekerjaan sebagai nelayan bagi masyarakat disekitar garis pantai di kawasan Aceh Besar tepatnya di daerah Krueng Raya merupakan pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh sebagian besar penduduk. Menurut penuturan kepala desa jumlah penduduk yang penghidupannya tergantung dari sektor kenelayanan jumlahnya sekitar 70 %. Nelayan di kawasan Krueng Raya Aceh Besar misalnya, secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yakni nelayan juragan/ pemilik perahu, buruh nelayan, dan nelayan perorangan. Nelayan juragan atau nelayan pemilik adalah pemilik alat tangkap, yaitu berupa perahu beserta peralatan tangkapnya seperti jaring. Buruh nelayan adalah mereka yang mengoperasikan alat tangkap bukan miliknya sendiri. Se-

dangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, yang dalam pengopersiannya tidak melibatkan orang lain. Dari ketiga kategori nelayan tersebut, yang terbanyak jumlahnya di kawasan ini adalah nelayan perorangan (Jalil, 1994).

Hal ini tentunya tidak jauh berbeda sebelum dan pasca Tsunami terjadi di Aceh, perubahan mendasar dalam tata kehidupan terlihat jelas setelah pasca tsunami. Kendatipun banyak nelayan yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari melaut, namun sekarang mereka juga telah melakukan berbagai kegiatan lainnya yang dapat menambah inkam perkapita rumah tangga mereka.

Gambaran Geliat Nelayan Aceh Pasca Tsunami

Banda Aceh, Serambi Indonesia, 2008.

Beginilah kegiatan nelayan pesisir Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam se usai kembali dari melaut. Mereka menjual ikan hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan Peunayung, Lampulo, Banda Aceh, setelah seminggu melaut. Sejak tsunami dan gempa bumi melanda bumi rencong, kehidupan nelayan sempat tak terdengar. Karena sebagian nelayan tewas dan hilang. Dari 400 ribu nelayan yang mendiami pesisir, kini tinggal sekitar 200 ribu nelayan saja yang kembali melaut. Selain trauma, nelayan di Aceh, umumnya tidak memiliki keahlian lain untuk menopang hidupnya. Sebagian nelayan mengandalkan hidup dari bantuan pemerintah, bantuan dari luar negeri dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Khairul Amri, Kepala Desa, karena para nelayan selamat dari tsunami dalam keadaan luka-luka sehingga tidak mungkin mereka langsung mencari rejeki. Namun dia yakin, lama-lama ketergantungan terhadap bantuan tersebut bisa hilang sendiri, seiring dengan berkurangnya bantuan yang datang. Kini setelah dua tahun peristiwa tsunami berlalu, kegiatan nelayan Aceh kembali bergeliat. Mereka meninggalkan barak pengungsian dan kembali ke perkampungan mereka di pinggir pantai. Denyut kehidupan nelayan ini sudah tampak di Desa Lambadalo, Aceh Besar. Penduduk di tempat ini kembali menjalani rutinitas yang telah mereka jalani sejak sebelum bencana tsunami.

Meskipun penduduknya telah berkurang hingga hanya tinggal sepertiganya. Sebelum terjadi bencana tsunami, jumlah penduduk desa ini mencapai 2.250 jiwa. Namun setelah bencana tsunami hanya tinggal 625 jiwa. Sulaiman Tripa, Staff Expert Lembaga Hukum Adat Laut NAD mengungkapkan, mereka kembali menjadi nelayan karena hanya itulah keterampilan yang mereka miliki. Kembalinya nelayan ke laut memberi berkah kepada para pembuat kapal. Seperti di kawasan Lampulo, Banda Aceh. Untuk kapal semacam ini dibuat selama 6 bulan dengan biaya sekitar 80 juta rupiah. Geliat juga tampak di tempat pembuatan perahu di Pantai Ulele, Banda Aceh. Untuk perahu kecil semacam ini dibuat dalam waktu dua minggu dengan biaya 2 juta rupiah. Bergairahnya kembali usaha pembuatan perahu ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dari pemerintah, dari luar negeri dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tidak kurang dari 200 unit perahu dan kapal bantuan, telah disalurkan kepada nelayan dan digunakan untuk melaut.

Namun pemberian bantuan semacam ini dinilai sebagian pihak tidak memberikan alternatif lain kepada nelayan untuk mencari nafkah. Padahal masih banyak potensi lain di pantai yang dapat dijadikan sumber mata pencarian apabila mereka memiliki keterampilan. Hal ini mengakibatkan secara ekonomi nasib para nelayan tidak mengalami banyak perbaikan dibandingkan sebelum bencana tsunami terjadi. Melayan memang tidak dapat dipisahkan dari laut. Karena tradisi melaut ini telah dilakoni sejak masa nenek moyang mereka. Namun perlu juga dipikirkan alternatif lain untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. Karena mencari nafkah bagi para penduduk di pesisir tidak hanya semata-mata harus pergi ke laut. Mereka juga dapat melakukan budi daya berbagai biota laut di pinggir pantai sehingga mereka mendapat nilai tambah yang lebih besar, yang sekaligus dapat meningkatkan penghasilan.

Rabu, 10 November 2010, Rakyat Aceh

Lebih Memilih Alih Profesi Dibanding Perbaiki Perahu

Aceh Timur-Bangkai perahu dan boat terhampar di sepanjang pinggir sungai di Aceh Timur. Tak jarang para nelayan menggunakan perahu yang apa adanya untuk mencari nafkah di laut. Yang pasti, dengan kenekatan yang dimiliki, para nelayan harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Perahu yang sudah rapuh itu pun selalu menemani mereka di kala suka maupun duka. Sekelumit untaian itu merupakan kisah kehidupan nelayan di Aceh Timur yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Sebab, selama ini, dikatakan kaum nelayan, perhatian pemerintah khususnya Pemkab Aceh Timur, sangat minim. Dengan keuntungan dan menyisihkan uang seadanya, mereka sedikit demi sedikit berusaha memperbaiki perahu teman pencari nafkah di tengah laut.

Menurut Ismail, nelayan Kuala Bagok, nasib nelayan di daerahnya bagaikan cacing kepanasan. "Hidup segan, mati tak mau," cetus Ismail. Hal itu disebabkan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib nelayan kecil sehingga banyak nelayan di daerahnya beralih profesi menjadi buruh bangunan, tukang ojek, dan sebagainya.

"Kami kaum nelayan sudah berupaya memperbaiki kehidupan dengan mencari ikan di laut ini. Tapi tak jua bisa diandalkan. Sedangkan pemerintah yang kami harapkan memberikan bantuan, seolah-olah diam. Yang kami harapkan pemerintah itu meningkatkan fasilitas alat tangkap dan rehab boat kami yang telah usang," ucapnya.

Makanya, urai Ismail, daripada tak mendapat keuntungan dari pekerjaan nelayan ini, kebanyakan kaum nelayan di Kuala Bagok lebih memilih alih profesi. "Untuk itu, seiring dengan apa yang dicanangkan Kemetrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, baik melalui kredit KKP yang tidak ada angsuran, ataupun bantuan lainnya dalam mengupayakan peningkatan produksi perikanan Indonesia dan perberdayaan nelayan kecil, kami seluruh nelayan kecil Kuala Bagok kecamatan Nurussalam, khususnya dan Aceh Timur pada umumnya, sangat mengharapkan perhataian pemerintah Aceh Timur melalui dinas terkait," harapnya lagi. Mungkin, lanjut Ismail, melalui kucuran anggaran rehab boat atau kredit tanpa angsuran, serta memberi perlindungan terhadap kelestarian laut, agar ekosistem laut terjaga sehingga hasil tangkapan nelayan kecil dapat meningkat. Terus terang, katanya lagi, dari dulu penghasilan menangkap ikan di laut merupakan pekerjaan turun temurun. Ditambah lagi masyarakat belum bisa membuka lapangan kerja dan dengan pekerjaan nelayan ini bisa menghidupi keluarga mereka. "Pertumbuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kelautan dan perikanan, di kabupaten pesisir pantai timur ini juga harus diberikan perhatian. Jangan sampai nelayan kecewa, alih profesi berkembang dan pasokan ikan menurun," tukasnya.

Amatan Harian Rakyat Aceh, Selasa (9/11) di sejumlah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Aceh Timur, terlihat sejumlah bangkai boat nelayan kecil di darat dan di pingiran sungai yang telah lapuk dan terlantar ditelan masa. Seperti terlihat di tempat mangkal boat nelayan kecil Kuala Bagok, Desa Teupin Pukat Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur. Perahu dan boat nelayan dibiarkan begitu saja hingga hancur. Lagi-lagi, keterbatasan modal maupun dana memperbaiki membuat nelayan patah arang dan lebih memilih menelantarkan perahunya begitu saja. Bahkan di daerah itu masih terlihat nelayan kecil dengan menggunakan boat yang tidak layak pakai lagi alias sudah tua. Hanya saja, masih digunakan melawan ganasnya gelombang laut dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. "Beginilah kondisi kami nelayan kecil. Meski boat kami sudah tua dan lapuk dimakan teritip (*Balanus Spp.*), namun perjuangan kami untuk merajut kelangsungan hidup keluarga terus kami paksakan, meski resiko nyawa kami pertaruhkan dalam mengarungi derasnya gelombang laut," lirik Husaini (36) salah seorang nelayan kecil Kuala Bagok. "Selama pendapatan nelayan menurun dalam beberapa tahun terakhir, borok-borok biaya rehab boat, untuk kebutuhan rumah tangga hari-hari saja hampir tak mencukupi, apalagi situasi laut kita beberapa tahun terakhir sering diobok-obok pukut harimau dalam dan luar negeri," ungkapkan.

Selain itu, pukut gol atau langee yang kerap beroperasi di kedalaman dua hingga empat meter atau lebih kurang satu kilo meter dari pinggir pantai, yang saban hari menyapu mulai ikan dewasa hingga ke bibitnya. Bahkan aktivitas mereka juga merusak habitat laut seperti terumbu karang tempat dimana ikan akan bersarang. "Ini sangat berakibat pendapatan nelayan kecil seperti kami iniberdampak menurun, dengan mengurangnya ikan di kawasan laut kita," ujar Husaini. Memang, diakui Husaini, banyak faktor lain yang berdampak terhadap mengurangnya

penghasilan nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya. Seperti dangkalnya sungai dan muara sehingga nelayan terpaksa menunggu pasang laut kala hendak pergi dan ketika pulang melaut. “Ini juga merupakan salah satu faktor pengahabat. Dan pastinya, kami selaku nelayan berharap pemerintah memberikan bantuan demi kehidupan dan penghidupan nelayan di masa akan datang,” akhiri Husaini.

Melihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.

Alat tangkap yang digunakan nelayan meliputi bermacam-macam dapat berupa alat pancing, bubu yang terbuat dari rangkaian lidi-lidi atau rautan bambu mempergunakan tali rotan atau tali ijuk untuk menjadi alat perangkap ikan. Jala yang terbuat dari bahan benang kapas dan benang samsi, kemudian juga ada yang dikenal dengan tempuling yang terbuat dari kawat yang diruncingkan dan diberi bertangkai kayu atau rotan gajah. Tempuling sering digunakan untuk menusuk ikan-ikan besar yang kelihatan di permukaan air. (Alfian, 1978). Mengenai jenis perahu yang digunakan nelayan pada dasarnya tidak ada perbedaan mendasar, paling dapat dilihat dari segi bentuknya saja ada perahu kecil, agak besar dan lebih besar. Perahu kecil biasanya diawaki oleh 2 orang, biasanya pemilik perahu itu sendiri dengan dibantu oleh seorang anak buah, bahkan kadang-kadang satu perahu hanya diawaki satu orang. Kedua, adalah perahu yang agak besar, yang biasanya diawaki oleh sekitar enam hingga delapan orang. Dan ketiga, adalah perahu yang lebih besar yang diawaki oleh sekitar 12 orang. Namun yang paling banyak digunakan adalah perahu kecil, yang mencakup sekitar 80 % nelayan. Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki nelayan, sebagian nelayan yang lain juga tidak memiliki perahu dan alat tangkap sendiri. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya, dengan menjadi buruh nelayan. Permasalahannya adalah selain rendahnya hasil tangkapan dengan alat tangkap sederhana, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para juragan cenderung kurang menguntungkan buruh nelayan.

Untuk pembagian hasil tidak ada keseragaman dalam sistem bagi hasil, tetapi umumnya dilakukan dengan sistem fifty-fifty, yaitu dengan cara uang perolehan hasil tangkapan, setelah dikurangi untuk biaya operasional, sisanya dibagi dua antara juragan dengan buruh nelayan. Setengah bagian pendapatan untuk

buruh nelayan tersebut harus dibagi lagi sesuai dengan jumlah anggota yang terlibat dalam operasi penangkapan. Jika dalam satu kelompok penangkapan terdiri dari enam orang anggota, maka pendapatan buruh nelayan kurang lebih hanya sekitar seperenam dari pendapatan juragan. Semakin besar jumlah anggota yang terlibat dalam penangkapan berarti ketimpangan bagi hasil antara buruh dengan juragan akan semakin besar. Hubungan antara pemilik dan buruh nelayan sebetulnya saling membutuhkan. Meskipun demikian, karena posisinya yang lemah, ada kecenderungan buruh lebih bergantung pada pemilik, terutama saat tidak musim ikan. Hal ini terbukti pada saat tidak ada hasil tangkapan, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, para buruh nelayan banyak yang meminjam uang kepada pemilik perahu. Dengan pinjaman itulah maka para pemilik mengikat buruh agar tidak lari kepada pemilik perahu lainnya.

Hal yang patut dicatat bahwa kekuatan adat dalam sistem kehidupan nelayan tidak terlepas dari adanya panglima laot, yang memiliki kewenangan dalam hal pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan sengketa laut. Secara garis besar tugas dan fungsi panglima laot dalam tata adat penelayanan dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laut.
- b. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut.
- c. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laut.
- d. Menjaga dan mengawasi pohon di tepi pantai untuk tidak ditebang.
- e. Sebagai badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah (Shobari, 2006).

Dalam upaya pilihan lokasi penangkapan seringkali bersifat spekulatif, karena jenis ikan berada di dalam/ dasar laut, nelayan tidak mudah mengidentifikasi keberadaannya.

Musim penangkapan ikan setiap tahunnya terbagi atas musim awal, musim panen dan musim paceklik atau musim tidak ada ikan. Musim awal terjadi pada bulan Oktober dan November, musim panen terjadi pada bulan Desember sampai Maret, sedangkan musim paceklik biasanya terjadi bersamaan dengan musim kemarau yaitu pada bulan April sampai September. Pemilahan musim ikan tersebut terkadang mengalami pergeseran, sesuai dengan pergeseran musim penghujan dan kemarau. Dengan demikian kurang lebih hanya empat bulan efektif, yaitu ketika musim hujan, nelayan memperoleh tingkat penghasilan yang relatif “baik”.

F. Diversifikasi Pekerjaan : Strategi mempertahankan kelangsungan Hidup

Berangkat dari data yang ada, kemiskinan di Aceh memang sebuah ironi. Apalagi jika dibandingkan dengan penerimaan dana pembangunan Aceh sedemikian besarnya. Fakta empiris menunjukkan, tingkat kemiskinan di daerah ini hampir tiga kali lipat dari rata-rata nasional padahal dana pembangunan pada tahun 2005 dan 2006 mencapai Rp. 28,4 trilyun (Serambi Indonesia, 26/12/2006). Menyikapi besarnya tingkat kemiskinan di Aceh, Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan, target penurunan prosentase orang miskin hingga 30 persen melalui RAPBD 2007 yang akan dibahas bulan febuari ini (Serambi Indonesia, 29/1/2007). Target kuantitatif ini sangat mulia sehingga perlu didukung oleh semua pihak. Namun target hanyalah akan menjadi tulisan indah di atas kertas jika tidak diikuti dengan tindakan pembangunan nyata dan efektif di lapangan.

Salah satu ide Pomeroy et al (2006) menyarankan prioritas rehabilitasi seharusnya diberikan pada bagaimana masyarakat membangun penghidupannya secara berkelanjutan. Karena itu perlu sebuah kerangka untuk memahami berbagai strategi masyarakat dalam mencari nafkah. Kerangka ini juga bertujuan untuk mengenali sumber-sumber kerentanan yang dapat membawa konteks kemiskinan itu kembali seperti bencana alam, hama, wabah penyakit dan konflik. Diantara banyak kerangka tersebut, ada sebuah konsep yang menarik. Konsep ini bernama sustainable livelihood. Ia merupakan hasil kajian Departement Pembangunan Luar Negeri Inggris (DFID) dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Kata "livelihood" bukanlah hal yang aneh di Aceh sekarang. Hampir semua pihak yang terlibat dalam proses rekonstruksi menggunakan istilah ini. Mungkin, livelihood bisa didefinisikan sebagai segala keahlian, aset dan kegiatan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep ini melihat, dalam mencari penghidupan, masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan yang didiaminya (pengunungan, pesisir, pedesaan atau perkotaan). Lingkungan ini juga menentukan strategi mata pencaharian, apakah bertani, melaut atau berdagang. Setiap tempat tersebut mempunyai kerentanan tersendiri terhadap kemiskinan seperti musim paceklik atau banjir bagi petani, musim gelombang besar bagi nelayan atau fluktuasi harga bagi pedagang. Namun, masyarakat mempunyai beberapa aset yang bisa digunakan untuk mencari penghidupannya sekaligus menghindari menjadi miskin. Aset tersebut berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sosial, fisik dan finansial. Livelihood dikatakan berkelanjutan apabila dapat bertahan dalam keadaan sulit sekalipun. Dengan kata lain, kebutuhan hidup masih dapat dipenuhi masyarakat walaupun dalam kondisi paceklik. Misalnya, dalam musim gelombang besar, nelayan praktis tidak dapat melaut. Salah satu opsi strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan mengkonversikan salah satu aset yang dimiliki (aset fisik) menjadi aset yang lebih likuid (aset finansial).

Gambaran diatas juga menyiratkan bagaimana pilihan diversifikasi sebagai salah satu strategi adaptasi yang dilakukan nelayan untuk mempertahankan

kelangsungan hidup adalah melakukan diversifikasi pekerjaan. Diversifikasi merupakan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian yang dilakukan nelayan, baik di bidang perikanan maupun non perikanan. Ragam peluang kerja yang bisa dimasuki oleh mereka sangat tergantung pada sumber-sumber daya yang tersedia di desa-desa nelayan tersebut. Setiap desa nelayan memiliki karakteristik lingkungan alam dan sosial ekonomi tersendiri, yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Untuk pengambilan keputusan melakukan diversifikasi pekerjaan di kalangan nelayan merupakan upaya pilihan rasional yang akan lebih menguntungkan kepentingan rumah tangganya dalam menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan. Sekalipun demikian, harus disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kendala kultural dan struktural yang akan dihadapi cukup menyulitkan. Dengan melakukan diversifikasi pekerjaan akan semakin memberikan keluasaan dan kebebasan kepada nelayan untuk memperoleh penghasilan dari beragam sumber dan peluang kerja. Dalam konteks diversifikasi tersebut, kegiatan kenelayanan tetap dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan (Kusnadi, 2002).

Dibandingkan dengan diversifikasi pekerjaan secara teoritik untuk kepentingan jangka panjang, konversi pekerjaan di kalangan nelayan sangat diperlukan guna mengurangi tekanan-tekanan penduduk terhadap sumber daya laut. Akan tetapi strategi ini pun belum tentu dapat mengatasi secara signifikan persoalan dasar yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di kalangan nelayan. Upaya memasuki pekerjaan di sektor kenelayanan ibarat patah tumbuh hilang berganti. Jika seorang nelayan meninggalkan pekerjaannya, maka masih banyak masyarakat lainnya yang mau menjadi nelayan sebagai pekerjaan dalam pilihan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dengan melihat letak wilayah yang tidak jauh dari pelabuhan laut, nelayan di daerah Krueng Raya Aceh besar mempunyai peluang untuk melakukan diversifikasi pekerjaan, terutama di sektor perdagangan maupun jasa cukup besar. Kegiatan di sektor tersebut memang telah dilakukan oleh sebagian warga, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Misalnya bekerja sebagai tukang becak, buruh bangunan, buruh serabutan, serta pekerjaan sebagai penjual makanan. Kesempatan kerja lain yang bisa dilakukan penduduk adalah sebagai petani atau buruh tani. Sebagian wilayah desa merupakan lahan berbukitan, ada juga sebagai masyarakat yang memanfaatkan untuk berkebun di daerah perbukitan sebagai petani, atau pedagang musiman. Pekerjaan lain adalah yang berkaitan dengan kegiatan kenelayanan, di antaranya sebagai pedagang ikan, usaha pengasinan / penga-wetan ikan, mencari kerang-kerangan dan tiram, pembuat perahu dan peralatan tangkap (jaring), dan sebagai pedagang yang menyediakan barang-barang kebutuhan nelayan seperti bahan bakar, es batu, dan perlengkapan melaut.

Dengan perolehan penghasilan yang tidak selalu kontinui, menuntut para nelayan untuk dapat memaksimalkan kebutuhannya yang tidak hanya diupayakan sebagai kebutuhan konsumtif namun juga sudah mulai memanfaatkan sebagai

penghasilan untuk membeli kebutuhan sekunder yang sifatnya dapat diuangkan dengan segera seperti membeli emas. Diversifikasi pekerjaan yang dilakukan keluarga nelayan tidak terlepas dari peran perempuan dalam menambah income rumah tangga. Dan pada umumnya ragam pekerjaan yang dilakukan masih terkait dengan kegiatan perikanan. Penghasilan yang diperoleh akan menambah keuangan rumah tangga karena tingkat pendapatan suami mereka belum mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan dalam rumah tangga nelayan miskin, kontribusi ekonomi perempuan yang bekerja sangat signifikan. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas mencari nafkah merupakan pelaku aktif perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan.

Kerentanan perolehan pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan yang masih terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah karena sifat ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap tingkat produksi ikan yang ada. Artinya, aktivitas dari ragam pekerjaan tersebut akan tetap berlangsung secara kontinui sepanjang jaminan bahan baku masih dapat ditemukan. Manakala produksi ikan menurun atau tidak ada sama sekali, aktivitas ekonomi dari pekerjaan-pekerjaan tersebut juga akan terhenti. Dengan demikian, kaum perempuan yang terlibat di dalamnya tidak akan memperoleh penghasilan karena pada umumnya penghasilan hanya dapat diperoleh jika mereka bekerja secara nyata. Artinya, pemilik industri rumah tangga tidak memberikan subsidi atau kompensasi ekonomi dalam bentuk apa pun terhadap pekerjaan, jika aktivitas ekonomi terhenti (Nabjib, 1993).

Selain isteri, anak-anak nelayan juga terlibat dalam beberapa pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ada sebagian anak laki-laki akan mengikuti orang tuanya pergi melaut mencari ikan ke tengah laut atau membersihkan perahu atau kapal yang baru kembali dari melaut. Sedangkan anak-anak perempuan, disamping membantu kegiatan domestik orang tuanya, juga membantu ibunya yang bekerja di pusat-pusat penyemuran ikan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, kegiatan-kegiatan ekonomi tambahan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga nelayan (isteri atau anak) merupakan bagian dari strategi adaptasi yang harus ditempuh untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga mereka. Untuk ragam kegiatan yang dilakukan sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia di daerah tersebut, demikian pula halnya yang berlaku di daerah wilayah desa nelayan Krueng Raya Aceh Besar. Karena yang patut dimaknai bahwa setiap nelayan memiliki karakteristik kondisi sosial-ekonomi yang berbeda satu sama lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota rumah tangga nelayan semata-mata tuntutan kebutuhan konsumtif yang bersifat subsistensi, dan bukan kebutuhan yang bersifat produktif. Bagi mereka yang penting dapat makan untuk hari ini dan akan berpikir lagi untuk esok harinya.

Sebagai masyarakat nelayan di Aceh dari beberapa studi ditemukan, disamping menangkap ikan di laut, juga bekerja sebagai petani dengan menggarap lahan pertanian yang tersedia di desanya. Sebagian dari nelayan memiliki tanah

pertanian dan perladangan yang bisa ditanami cengkeh, padi atau tumbuhan lainnya. Bila musim tanam tiba, mereka berhenti melaut untuk sementara waktu karena harus bertani. Hal serupa juga dilakukan ketika musim panen tiba. Kadang-kadang bila memungkinkan, setelah pulang dari melaut, nelayan akan mengerjakan segala kegiatan dilahan pertaniannya.

Namun demikian persoalannya adalah apakah masyarakat nelayan yang sudah terbiasa melaut bersedia melakukan kerja sampingan dan seberapa besar upaya yang dilakukan keluarga nelayan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan. masyarakat nelayan secara umum tergolong sebagai nelayan tradisional, dengan teknologi penangkapan ikan yang sederhana, sehingga ketergantungan terhadap keadaan alam amat besar. Hal ini mengakibatkan masa melaut tidak dilakukan sepanjang tahun. Menurut perhitungan mereka, musim “panen” ikan hanya berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan. Dalam kondisi semacam inilah nelayan seringkali menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, melakukan pekerjaan sampingan di saat mereka tidak melaut merupakan hal yang biasa dilakukan. Kemampuan dan kemauan nelayan untuk melakukan kerja sampingan guna terpenuhi kebutuhan hidupnya amat beragam. Ada nelayan yang memang telah terbiasa kerja sampingan yang dilakukannya di saat-saat tidak melaut. Namun demikian ada pula yang mengaku kesulitan atau enggan untuk mencari pekerjaan sampingan, karena memang tidak terbiasa melakukannya.

Keengganan nelayan melakukan diversifikasi terkait dengan adanya keterikatan mereka secara sosio-kultural dalam aktivitasnya sebagai penangkap ikan. Laut memang sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupannya sehingga tidak mudah ditinggalkan. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan diversifikasi pekerjaan amat ditentukan oleh kemampuan nelayan yang bersangkutan dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Keputusan melakukan diversifikasi pekerjaan merupakan upaya dan pilihan rasional dan ini terkait dengan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangganya.

Bagi nelayan untuk melakukan kerja sampingan biasanya dilakukan di saat mereka tidak melaut, yang diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan, misalnya dengan menjadi tukang becak, buruh tani atau menjadi kuli bangunan. Pekerjaan tersebut biasanya dilakukannya sekedar untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ketika kondisi laut memungkinkan, mereka segera meninggalkan kerja sampingan tersebut untuk melaut. Ragam pekerjaan lain yang rutin adalah kegiatan yang masih terkait dengan perikanan, misalnya sebagai pedagang ikan, mengawetkan/mengasinkan ikan, mencari tiram atau kepiting di pinggir pantai.

Menjadi pedagang ikan, merupakan salah satu pekerjaan yang juga sering dilakukan oleh isteri nelayan. Di antara mereka bahkan ada yang melakukan pekerjaan tersebut sepanjang tahun. Mengenai anggota keluarga yang terlibat dalam melakukan diversifikasi pekerjaan, secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh anggota keluarga yang telah mampu dilibatkan dalam berbagai

kegiatan yang bisa mendatangkan uang. Selain suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga, biasanya isteri nelayan dan anak-anak mereka yang dianggap mampu bekerja dilibatkan dalam upaya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Hal tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggota keluarga. Keterlibatan anak nelayan ada yang terkait dengan kegiatan kenelayanan. Anak laki-laki akan mengikuti orang tua atau kerabatnya mencari ikan ke laut atau membersihkan perahu yang baru tiba dari melaut. Sementara anak-anak perempuan biasanya membantu pekerjaan domestik orang tuanya atau membantu mengolah ikan dalam proses pengeringan/pengasinan ikan.

Bagi masyarakat nelayan, melakukan diversifikasi pekerjaan merupakan aktivitas yang penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan keterbatasan aktifitas melaut yang tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Karena itu umumnya mereka tidak hanya menandalkan kehidupannya dari hasil laut saja, sebab penghasilan dari melaut selama beberapa bulan tidak bisa menutup kebutuhan hidup sepanjang tahun. Karena itu untuk menutup kebutuhan hidup selama musim paceklik melaut, beragam pekerjaan yang dilakukan, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan kegiatan kenelayanan. Dengan melakukan diversifikasi pekerjaan, bagi keluarga nelayan memiliki makna yang sangat berarti bagi kelangsungan ekonomi rumah tangganya. Hal ini terkait dengan ketidakteraturan dan ketidakstabilan kegiatan mereka dalam kegiatan kenelayanan yang berakibat pada ketidakteraturan dan ketidakstabilan penghasilan dari hasil melaut terlebih lagi dengan kondisi geografis Aceh pasca tsunami memberi warna tersendiri dari pola strategi nafkah nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

G. Penutup

Berdasarkan kajian-kajian strategi ekonomi rumah tangga (livelihood strategies), nampak dengan jelas bagaimana pentingnya diversifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan. Dan aspek ekologi daerah bencana memberi dampak yang berbeda dengan kondisi masyarakat nelayan sebelum terjadinya bencana tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu. Salah satu strategi yang dilakukan nelayan dengan upaya mencari tambahan ekonomi rumah tangga nelayan sebagai wujud untuk tetap mereka bertahan hidup. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan, namun anggota nelayan juga ikut berperan serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Hal penting yang harus dicatat bahwa pendekatan livelihood strategies menjadi penting dalam pola melihat persoalan mendasar dari upaya memotong garis kemiskinan sebagai jargon pertumbuhan pembangunan yang selalu menjadi momok dalam siklus kehidupan masyarakat nelayan. Sehingga peran negara dan pemerintah ikut ambil bagian dalam format strategi nafkah nelayan menjadi pijakan penting dalam menjembatani berbagai permasalahan kehidupan nelayan saat ini.

Referensi

- Alfian, Ibrahim. 1978. Adat Istiadat Daerah Propinsi Istimewa Aceh. Banda Aceh.
- Carner, George. 1998. Kelangsungan Hidup, Saling Ketergantungan dan Persaingan di Kalangan Kaum Miskin di Philipina. Yayasan Obor. Jakarta.
- Damsar. 2002. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2007. "Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan : Pandangan Sosiologi Nafkah Mazhab Barat dan Mazhab Bogor". Sodality Vol. 01.No.02.
- , 2001. Farm Household Livelihood Strategies and Socio-economic Change in Rural Indonesia. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.
- Ellis, Frank. 1998. Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. The Journal of Development Studies. Vol 35/1.
- Lewis, Occar. 1981. "Kebudayaan Kemiskinan" dalam Andre Bayo Ala, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberty. Yogyakarta.
- Iqbal, Moch. 2004. Strategi Nafkah Rumah Tangga Nelayan : Studi Kasus di Dua Desa Nelayan Tangkap Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Tesis, S2 SPD IPB.
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam. LkiS. Yogyakarta.
- 2001. "Otonomi Daerah dan Konflik Berbasis Etnisitas". Majalah Ecpose 12.
- Jalil, M. Harun. 1994. Hambatan-Hambatan Pengembalian Kredit Nelayan. Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Syiah Kuala.
- Nabjib, Mochammad. 1993. Karakteristik Sosial Budaya dan Masalah Perkoperasian Nelayan, Masyarakat Indonesia.
- Shobari, Chairuddin. 2006. Kelembagaan Adat Propinsi NAD. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Cidesindo. Jakarta.
- Sitorus, MTF. 1989. Strategi Rumahtangga Nelayan Miskin. Dalam T.O Ihromi. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. YOI. Jakarta.

Redelift, M. 1986. Survival Strategies in Rural Europa : Continuity and Change. Sociological Ruralis XXVI.

Usman, Sunyoto. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

White, Benjamin N.F. 1980. Rural Household Studies in Antropological Perspective. Bunga Rampai : Rural Household Studies in Asia.

-----, 1990. Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan Transformasi Pedesaan, Sekindo Eka Jaya. Jakarta.

Yustika, Ahmad Erani. 2003. Negara VS Kaum Miskin. Pustaka Pelajar. Jakarta.

Penulis : Mahmuddin, PPs Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta. Staf Pengajar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Persepsi Tokoh Informal Terhadap Aksi Balapan Liar Anak-anak Remaja Di Kota Banda Aceh

(Studi Kasus di Kecamatan Baiturahman dan
Meuraxa Kota Banda Aceh)

Masrizal, Bukhari¹

Abstrak

Aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja di jalan raya pada Kecamatan Baiturahman dan Meuraxa kota Banda Aceh adalah masalah sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa persepsi tokoh informal masyarakat, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan pencegahan terhadap aksi balapan liar melalui kontrol sosial dari masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik sampling sampel bertujuan (purposive sampling), Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan empat cara yaitu: observasi, wawancara (interview), Fokus Group discution (FGD), dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh informal ikut terlibat dalam penanganan kasus balapan liar anak-anak remaja, hal ini dibuktikan dengan informasi bahwa tokoh agama dan tokoh pemuda ikut andil dalam pembinaan terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja. Disamping itu juga persepsi tokoh informal terhadap aksi balapan liar adalah karena kurangnya komunikasi yang intensif antara orang tua, Guru, dan stakeholder gampong, baik formal maupun informal yang mengakibatkan meningkatnya aksi balapan liar. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh tokoh informal dalam penanganan aksi balapan liar anak remaja adalah: Pertama, untuk kecamatan Meuraxa terjalinnya kerjasama antar gampong (Gampong Pie, Gampong Lambung dan Gampong Cot Lamkeuweuh), pemuda dan tokoh masyarakat serta keuchik membangun koordinasi dengan menurunkan semua pemuda membawa kayu ke seputaran jalan raya, Selanjutnya, menasihati remaja tersebut agar jangan mengulangi aksi balapan liar di jalan raya, serta membangun kerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan patroli diseputaran jalan raya. Sedangkan di Kecamatan Baiturrahman,

1. Dosen Sosiologi Fisip Unsyiah

pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya melakukan pembinaan terhadap anak-anak remaja yang terlibat aksi balapan liar dengan menyurati orang tuannya, dan melakukan patroli bekerjasama dengan kepolisian dan terakhir mengusulkan membuat qanun gampong tentang keamanan jalan raya. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah pertama, sebagian remaja yang melakukan balapan liar adalah anak dari TNI/Polri, kedua, trauma karena konflik yang mempengaruhi jiwa remaja untuk melakukan aksi balapan liar, ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak remaja yang mengakibatkan adanya balapan liar. Ke empat belum adanya qanun yang mengatur tentang larangan balapan liar di jalan raya.

Keyword: tokoh informal, pembinaan anak-anak remaja, balapan liar

A. Pendahuluan

1. Latar belakang Masalah

Realitas sosial menunjukkan bahwa pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat Aceh telah menyisakan trauma yang mendalam dan telah merusak tatanan kehidupan masyarakat. Berbagai macam bencana sosial dan bencana alam telah membuat banyaknya perubahan pada kehidupan masyarakat, Salah satunya adalah terjadi balapan liar di perjalanan yang dilakukan oleh anak-anak remaja Aceh pasca tsunami dan konflik (RI dan GAM). Namun masalah ini menyisakan berbagai macam persepsi masyarakat melihatnya, sehingga sangat dituntut pemecahan masalah (*problem solving*) untuk melihat apakah sumber masalah tersebut ada pada individu anak-anak remaja tersebut atau sumber masalah disebabkan oleh sistem.

Berdasarkan laporan dari media lokal di Aceh bahwa ada beberapa titik jalan yang digunakan oleh para remaja untuk melakukan aksi balapan liar tersebut. Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan salah satu lokasi yang menjadi sasaran bagi para remaja untuk melakukan aksi balapan liar yang sangat mengganggu jalannya arus lalu lintas. Menurut Armenyiah Thay, Balapan liar yang terjadi di Kota Banda Aceh sudah cukup meresahkan, bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, seperti yang terjadi seminggu lalu. Seorang ibu bersama bayinya meninggal di jalan setelah ditabrak oleh para pembalap liar. (Serambi Indonesia, Senin, 19 Desember 2011). Untuk menurunkan angka aksi balapan liar dijalanan yang terjadi telah banyak dilakukan penanganannya oleh kepolisian. Tetapi kebanyakan yang dilakukan hanya berkisar pada upaya-upaya pencegahan sesaat dengan tidak adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak terkait terhadap anak-anak remaja yang melakukan aksi balapan liar dijalanan. Sehingga inilah yang mendasari pentingnya dibuat penelitian tentang kenakalan remaja ini, agar aktifitas balapan liar ini bisa terpecahkan

secara bersama. Karena kalau tidak dicari akar masalahnya, maka penyakit sosial remaja tersebut akan terus berkembang sehingga generasi penerus di Kota Banda Aceh akan rusak secara moral

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah yang dibahas pada bab Pendahuluan, maka akan dirumuskan masalah penelitian dengan melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja, dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan pencegahan terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja di Kota Banda Aceh.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa persepsi tokoh informal masyarakat, dan hambatan-hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat gampong dalam memberikan pencegahan terhadap aksi balapan liar melalui kontrol sosial yang tinggi dari masyarakat setempat. Disamping itu juga penelitian ini juga sebagai sesuatu yang sangat penting sebagai evaluasi terhadap efektifitas proses pembelajaran yang selama ini telah dikembangkan oleh peneliti sebagai dosen yang mengajarkan matakuliah masalah-masalah sosial. Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ketahanan sosial masyarakat, dan juga menjadi masukan bagi pihak keamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan raya.

4. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Telah terdapat beberapa karya, baik itu dalam bentuk penelitian maupun buku, yang mengupas tema tentang berbagai macam masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja, tetapi penulis belum menemukan ada tulisan dalam bentuk karya ilmiah yang menjelaskan secara spesifik membahas tentang persepsi tokoh informal terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja, Hal ini yang membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini. Namun untuk memperkaya akan kajian pustaka dan landasan teori maka penulis melihat beberapa kajian yang relevan dengan penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja di kota Banda Aceh.

a. Pengertian Persepsi

Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan

dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Begitu juga Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Sedangkan dalam Pandangan yang sempit persepsi itu sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Hal inilah yang mendasari kenapa peneliti menginginkan bagaimana melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja.

b. Tokoh Informal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Junus Melalatoa, yang berjudul *Meneliti Pembangunan Masyarakat Gayo* di Kabupaten Aceh Tengah, dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, (1982), menjelaskan bahwa faktor kepemimpinan yang tak resmi (*informal leaders*) sangat menentukan situasi kemakmuran di masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan pada tokoh informal ini sangat menentukan arah pembangunan masyarakat, karena kepribadian dan kharismatik yang dimiliki oleh tokoh tersebut sangat membantu dalam mengembangkan kenakalan remaja di perkotaan. Berdasarkan kajian pustaka di atas, sangat bermanfaat untuk kawasan perkotaan di berbagai kabupaten yang ada di Aceh, karena rujukan di atas memiliki nilai kearifan lokal yang sangat sesuai dengan kondisi adat istiadat di Aceh yang menganut Syariat Islam.

Menurut Kartini Kartono, (1998:8), pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Pemahaman Kartini Kartono ini menerangkan bahwa kepemimpinan informal dalam peranan sosial di masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Profesor Kimbal Young, sosiolog terkenal di Amerika Serikat dalam Kartini Kartono, (1998:10) mengatakan bahwa tokoh informal itu bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan *akseptansi*/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Hal senada juga disampaikan oleh sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Soedjito, (1987), dalam bukunya yang berjudul *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, mengatakan bahwa pemimpin informal sangat menentukan keberhasilan suatu program di masyarakat, karena tokoh ini berperan penting dalam masyarakat.

Donald K. Emerson, (1984), mengatakan bahwa pemimpin informal di pedesaan sangat membantu dalam pemecahan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat untuk meningkatkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan Donald K. Emmerson ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari dukungan dari tokoh setempat dalam hal ini pemimpin informal di *gampong* (pedesaan).

c. Ciri- ciri Tokoh (pemimpin) Informal antara lain:

Menurut Kartini Kartono, (1998), ciri-ciri pemimpin informal adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin
2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
3. Dia tidak mendapatkan dukungan/*backing* dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara suka rela.
5. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
6. Apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.

Ciri-ciri yang disebutkan oleh Kartini Kartono di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat peran seorang tokoh informal (tokoh agama) sangat diperlukan dalam pembangunan kawasan wisata, dan tokoh ini tidak lahir dari proses demokrasi tetapi lahir dari individunya yang baik dan juga memiliki kemampuan lebih, dan tokoh ini juga dalam membantu masyarakat tidak mengharap balas jasa lebih kepada sukarela.

Hal di atas juga sependapat dengan Harun Nasution, (1995), mengatakan bahwa pemimpin informal sangat berperan dalam pembangunan masyarakat, khususnya tokoh agama, hal ini dicontohkan tentang figur seorang Kiai (ustadz/ tengku) masih mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Dalam mengubah sikap mental umat, dari sikap yang tidak menguntungkan menjadi sikap yang mendorong bagi pembangunan.

Harun Nasution menggambarkan bahwa kepemimpinan seorang Kiai (ustadz/tengku) masih sangat baik dalam mengajak masyarakat untuk menuju perubahan diri, baik itu dalam konteks memberikan pembinaan manusia secara spiritual keagamaan maupun pembinaan manusia sebagai fungsi sosial. Hal ini menurut pemahaman penulis juga sangat relevan dengan arah pemberdayaan masyarakat. Seorang kiai (ustadz) kegiatannya sehari-hari adalah di masjid. Lembaga masjid bisa dijadikan sarana untuk menggali potensi masyarakat dalam merubah keadaannya, karena masyarakat Provinsi Aceh sekarang menganut hukum Syariat Islam.

Pendekatan ini juga merupakan metode yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, dalam mengembangkan dakwahnya. Masjid Nabawi bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk beribadah tapi juga dijadikan sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan agama dan juga sebagai tempat dalam mengatur strategi politik. Tujuan dari seorang pemimpin informal adalah untuk mengatur masyarakatnya dengan baik dan menciptakan kemampuan masyarakatnya untuk peduli terhadap perkembangan pembangunan. Dalam hal ini kemampuan yang sangat dituntut dalam masyarakat untuk kemampuan untuk menjaga kelestarian dan ketertiban lingkungannya.

d. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Saini, (2005), Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Menurut Saifuddin Dhuri, dalam Sutoro Eko, (2007:146), mengatakan bahwa pembangunan di Aceh dengan konservasi kearifan lokal akan menjadi ruh dari semangat untuk mengembalikan peradaban besar. Salah satu prinsip yang dipegang dalam filosofi Aceh adalah berorientasi kepada tradisi dan masa lalu. Artinya masyarakat Aceh lebih kuat mengakarkan kehidupan pada tradisi dan masa lalu sebagai hasil kebanggaan. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat mesti digali, dikembangkan, guna dimasukkan dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, karena dalam pembinaan spiritual keagamaan di *gampong* (pedesaan) ketokohan dari seorang pemimpin informal (tokoh agama) itu yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Disamping itu juga Bambang Nugroho,(2005), melihat kearifan lokal biasanya dipersonifikasi pada seseorang yang secara kepribadian dinilai matang, konsisten, rela berkorban, tidak menang sendiri, memiliki wawasan yang luas tapi tetap mau menerima kritik orang lain dan mau menyalah. Hal ini yang sering disebut di masyarakat dengan orang bijaksana (arif),

dan dalam bahasa Inggris orang yang arif disebut *wise man*

e. Faktor- faktor Remaja Melakukan Balapan Liar

Berdasarkan hasil penelitian Gigih Bena Rendra, (2009), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi balapan liar oleh remaja adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Sedangkan kedua adalah faktor eksternal, yang merupakan faktor diluar individu yang berpokok pangkal pada lingkungan yang memiliki korelasi dengan kejahatan. Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga dituntut adanya peran serta kepolisian dan stakeholder lainnya dalam pencegahannya.

Selain itu juga penelitian Hendarayatna (2008), menjelaskan bahwa faktor penyebab utama maraknya kenakalan remaja adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga banyak orang tua memberikan kasih sayang hanya melalui materi semata. Hal ini banyak ditemukan dikota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Medan.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka di atas dapat dipahami bahwa pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang seorang orang tua dan tokoh masyarakat tersebut sangatlah penting dalam menjaga para remaja yang melakukan penyimpangan, maka apabila kurangnya control social, maka si remaja tersebut akan mencari tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk melakukan perbuatan balapan liar adalah dilingkungan teman sebayanya yang melakukan perbuatan menyimpang.

Dalam penelitian ini yang membedakan strategi yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti ini adalah kalau para peneliti ini hasilnya adalah melihat pada konteks praktis semata, tetapi penulis akan mengarahkan penelitian ini pada konteks teori yang dikemukakan oleh Eitzen (dalam Soetomo, 2009) yang menjelaskan bahwa apakah sumber masalah yang dilakukan oleh remaja itu datang dari individu sendiri atau dari sistem atau istilah lainnya disebut dengan *the person blame Approach and the System blame approach*. Disamping itu juga dalam konteks sosiologi peneliti akan melihat bagaimana pranata social itu berjalan, khususnya pranata keluarga, pranata pendidikan dan pranata agama dalam ilmu struktur social.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2005:60) penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif juga mempunyai dua tujuan yang utama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang persepsi tokoh informal dalam melihat aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja dalam mewujudkan kawasan kota yang bebas dari aksi brutal anak-anak remaja dijalanan, dan untuk kebenaran datanya ada proses uji keabsahan data, menggunakan triangulasi dengan sumber dan dan triangulasi dengan metode.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologis*. Penulis dalam penelitian ini berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. (Lexy J. Moleong, 1993: 9), Jadi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah aspek subyektif perilaku orang sehingga peneliti berusaha masuk dalam dunia subyek peneliti. Peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang diteliti, sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dengan tujuannya adalah agar peneliti bisa mengetahui kondisi informan dan bisa menggali informasi mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, , FGD, Dokumentasi dan wawancara. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebanyak dua kali Namun awalnya observasi telah peneliti lakukan sebelumnya, ketika peneliti melihat aksi balapan liar yang masuk kedalam lokasi penelitian. Observasi ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, partisipan (aktor yang terlibat) dalam pembinaan anak-anak remaja dalam wilayah kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman dan juga melihat kebijakan-kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melihat kenakalan remaja pada aksi balapan liar dijalan raya.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion dilakukan untuk menggali lebih dalam lagi persoalan yang dihadapi dalam pembinaan remaja yang melakukan aksi balapan liar di kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa. Melalui FGD informan diharapkan menjadi lebih leluasa mengungkapkan pendapatnya dan juga terjadi proses berbagai pengalaman di antara sesama informan. Kegiatan ini dilakukan pada tokoh informal di wilayah penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Dokumentasi yang penulis maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

c. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, maka informan yang dimaksud adalah tokoh informal di kedua kecamatan tersebut. Dan untuk melihat kebijakan yang diterapkan di tingkat kecamatan, maka akan dilakukan wawancara dengan muspika setempat, maka dilakukan wawancara dengan camat, Kapolsek dan keuchik yang terlibat dalam penanganan kenakalan remaja di wilayah penelitian tersebut.

Untuk jumlah informan kecamatan Baiturrahman 4 orang tokoh Informal, dan 2 tokoh formal, dan Kecamatan Meuraxa 6 orang tokoh informal ditambah 2 tokoh formal. Sehingga jumlah informan semuanya adalah 13 orang. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

d. Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan tidak berdasarkan prosentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya akan menjangkau sebanyak mung-

kin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan kedalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*). Tujuan dari semua wawancara adalah agar mendapatkan secara akurat data tentang proses penanganan terhadap aksi balapan liar remaja di kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa yang dilakukan oleh tokoh informal, Camat, Keuchik, Kapolsek, dalam mewujudkan remaja yang tertib dan patuh dalam menggunakan jalan raya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Tokoh Informal yang Terlibat dalam Penanganan Balapan Liar di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa

Tokoh Informal yang terlibat dalam penanganan balapan liar Anak Remaja di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa adalah tokoh agama dan tokoh pemuda dengan membangun kerjasama dengan aparat gampong (Keuchik dan aparaturnya). Adapun yang menjadi peran utama tokoh agama dan tokoh pemuda di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa dalam Penanganan Balapan Liar Anak Remaja adalah dengan mendidik anak Remaja untuk tidak lagi melakukan aktifitas balapan liar di jalan raya dengan memberikan peringatan secara tertulis secara simbolik di lokasi yang menjadi lokasi balapan liar dan memanggil satu persatu anak remaja yang terlibat balapan liar dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keselamatan jiwa sendiri dan pengguna jalan raya. Kegiatan sentral dari tokoh informal di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa dalam penanganan balapan liar tidak hanya berlangsung dua tahun yang lalu (2009-2010) tetapi juga tahun 2006 pasca tsunami telah dipraktikkan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ilyas, seorang tengku Imam di Gampong Pie, menerangkan kepada penulis bahwa:

“Balapan Liar yang terjadi di Gampong Pie kecamatan Meuraxa yang dilakukan oleh anak-anak remaja sudah berlangsung sejak 2006 lalu, sebagian besar mereka adalah anak dari TNI/Polri, namun untuk menjaga agar tidak berpengaruh kepada pemuda di gampong, maka kami sepakat dengan pak keuchik agar melakukan razia setiap sore hingga pukul 10 malam, khususnya malam minggu, dan kenapa ini masih kami jalankan sampai dengan sekarang, karena hanya itu kekuatan bagi kami dalam menjaga pemuda kami agar jangan terpengaruh dengan budaya balapan liar tersebut.”

Selanjutnya pernyataan Ijal, seorang Pemuda Gampong Pie yang ikut terlibat dalam penanganan balapan Liar di Gampong Pie menyatakan bahwa :

“Kami sangat berharap adanya kerjasama yang baik terbangun antara

pihak kepolisian dengan pemuda Gampong sehingga dalam menangani balapan liar ini bisa teratasi dengan baik. Dan tidak merugikan satu kelompok. Kenapa hal ini disampaikan karena pengalaman pahit yang diterima pemuda Gampong Pie saat tahun 2006 dimana beberapa pemuda dibawa ke kantor polisi karena memukul salah satu anak remaja yang melakukan balapan liar, padahal disatu sisi mereka mencegah adanya balapan liar tapi disisi lain mereka harus berurusan dengan hukum.”

Berdasarkan dari pernyataan di atas, masyarakat di Gampong Pie sangat peduli dengan perkembangan generasi penerusnya (anak remaja), sehingga ini membuktikan bahwa tokoh informal di gampong ini peduli dengan keberlangsungan remaja dimasa yang akan datang. Perkembangan remaja dalam penanganan Balapan Liar di Kecamatan Meuraxa berdasarkan pada hasil focus Group discussion (FGD) yang dilaksanakan di Gampong Lamkewueh yang dihadiri oleh 3 Gampong yakni Gampong Lambung, gampong Pie dan Gampong Lamkuweuh, didapatkan beberapa hal: pertama, Masyarakat mengharapkan terbangunnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian, kedua penting adanya control social yang baik dari masyarakat terhadap aksi balapan liar dan Ketiga, adanya pembinaan terhadap remaja yang melakukan balapan liar, khususnya remaja yang berdomisili dalam gampong tersebut. Dan keempat, diberikannya sanksi social pada remaja yang melakukan balapan liar.

Untuk kecamatan Baiturrahman tidak dilakukan FGD karena keterbatasan waktu dari tokoh informalnya sehingga penggalian informasinya melalui wawancara mendalam, didapatkan beberapa hal yang menjadi penanganan balapan liar bagi remaja: pertama penting adanya pembinaan terhadap remaja yang melakukan balapan liar, kedua pihak kecamatan membuat sebuah *reusam atau qanun*, peraturan camat dalam bentuk tertulis tidak membolehkan balapan liar dijalanan, karena sangat mengganggu ketertiban dijalan raya. Ketiga, pentingnya peningkatan patroli oleh pihak kepolisian.

Berikut kutipan Pernyataan pemuda Gampong Neusu Aceh, yang merangkakan bahwa:

“Di Gampong kami dulu pada tahun 2010 pernah ada aksi balapan liar yang dilakukan oleh remaja, tetapi itu tidak berjalan lama karena kami di gampong cepat musyawarah dengan pak keuchik agar segera mengusir mereka, karena sudah meresahkan masyarakat, dengan suara motor yang begitu keras membuat warga tidak nyaman, sehingga kami dengan beberapa orang pemuda dan orang tua turun kejalan dan menasihati anak-anak tersebut agar tidak mengulangnya lagi untuk balapan diseputaran gampong, akhirnya redalah tidak ada balapan lagi, kalau tidak kami turun kejalan maka akan banyak menimbulkan korban luka-luka, dan ada beberapa diantaranya warga kami juga yang ikut dalam balapan.”

Begitu juga pernyataan lainnya dari Pak Muhammad di Gampong Setui mengatakan bahwa:

“Anak-anak remaja yang balapan tersebut adalah anak dari orang kaya, anak china, polisi dan juga TNI yang balapan tersebut, awalnya kami tidak peduli tetapi karena sudah menjadi-jadi mereka yang mengakibatkan masalah bagi warga pengguna jalan maka kami sepakat dengan warga agar melaporkan mereka ke Kapolsek Baiturrahman, dan pada satu hari kami bersama tim kapolsek menangkap anak tersebut dan menangkap motornya (hondanya) sehingga setelah itu mulai berkurang tidak ada balapan lagi dilokasi kami, malah kami dengar sudah pindah ke Terminal batoh sekarang.”

Dari beberapa pernyataan di atas jelaslah bahwa tokoh informal dan tokoh formal pada dua Kecamatan (Meuraxa dan Baiturrahman) terlibat dalam memberikan arahan kepada remaja yang melakukan aksi balapan liar, sehingga ini jelas bahwa aksi balapan liar ini harus dihentikan karena sangat merugikan pengguna jalan raya, dan juga mempengaruhi budaya bagi remaja lainnya.

2. Strategi Penanganan Balapan Liar Anak-anak Remaja di Kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman

Strategi yang digunakan tokoh informal dalam penanganan aksi balapan liar anak remaja adalah: *Pertama*, untuk kecamatan Meuraxa, pemuda dan tokoh masyarakat beserta pak keuchik membangun koordinasi dengan menurunkan semua pemuda membawa kayu ke seputaran jalan raya, di antaranya pemuda gampong Lambung, Gampong Pie dan Cot Lamkuweuh. Selanjutnya, tokoh agama setelah menangkap mereka menasihati agar jangan mengulangi aksi balapan liar di jalan raya. Dan juga membangun kerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan patroli diseputaran jalan raya tersebut. Kedua, di Kecamatan Baiturrahman, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya melakukan pembinaan anak-anak remaja yang terlibat dalam aksi balapan liar dengan menyurati orang tuannya, dan melakukan patroli bekerjasama dengan kepolisian dan terakhir mengusulkan membuat qanun gampong tentang keamanan jalan raya.

Strategi di atas adalah metode tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya dalam penanganan aksi balapan liar di kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman, yang bertujuan mewujudkan remaja yang tertib di jalan raya dan siap dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi segala tantangan kebudayaan global yang sekarang sedang berjalan, dengan selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara tokoh agama dengan tokoh formal gampong dan kecamatan hingga ke kabupaten. Metode yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemuda di atas sesuai dengan kondisi sistem sosial masyarakat

Aceh yang memiliki budaya ke timuran.

Sebagaimana yang disampaikan Illiza Sa'aduddin Djamal, wakil walikota Banda Aceh, dalam pidato ringkasnya yang dikutip dalam Harian Serambi Indonesia, menerangkan bahwa ia sangat mendukung pihak kepolisian dan masyarakat dalam menangani balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja di wilayah yang dipimpinnya, khusus untuk kawasan yang mejadi titik balapan liar, beliau menginstruksikan kepada dinas terkait agar menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan raya, karena orang islam tersebut cinta dengan ketertiban dan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Namun perlu kita ketahui bahwa merubah remaja Aceh sangat sulit, karena konflik yang berkepanjangan telah menyisakan trauma yang mendalam dan telah merusak tatanan kehidupan masyarakat, setelah runtuhnya kerajaan Aceh pada masa penjajahan, kemudian bersama-sama Republik Indonesia melanjutkan perjuangan merebut kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan Darul Islam Indonesia (DI/TII) untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII), dan ditambah lagi dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) dari tahun 1973 yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan kepada pemerintah Republik Indonesia (RI), karena telah dianggap telah menjajah Aceh. begitu juga sebelum redanya trauma karena konflik, pada tanggal 26 desember 2004 Aceh mengalami musibah yang maha dahsyat dengan datangnya musibah gempa dan tsunami.

Perjalanan panjang konflik yang dialami masyarakat Aceh telah banyak menyita tenaga dan pikiran yang seharusnya dapat membangun Aceh secara bersama kearah yang lebih baik. Namun perjalanan panjang konflik tersebut akhirnya membuahkan hasil kesepakatan antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005, hal ini tidak terlepas dari rahmat tsunami yang membuat Aceh bangkit kembali dari keterpurukan karena konflik dan trauma tsunami.

Sejarah kelam tersebut telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk remaja yang ogal-ogalan di jalan raya. Pada saat Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 sampai dengan 1998 dan darurat militer di Aceh tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, kehidupan masyarakat Aceh menjadi tidak menentu, tidak boleh berkumpul-kumpul, setiap kegiatan yang dibuat oleh warga dicurigai, serta adanya kewajiban untuk jaga malam yang telah menyita waktu dan tenaga masyarakat untuk memikirkan kebutuhan keluarga.

Secara umum kehidupan anak remaja di Kota Banda Aceh pasca tsunami sangat memprihatinkan, dimana belum adanya aturan atau qanun yang tegas mengatur tentang larangan balapan liar di jalan raya membuat banyak remaja yang tidak patuh aturan dan lebih memilih melawan aturan, ini membuktikan telah lemahnya nilai control dari orang tua dan masyarakat sekitarnya terhadap perilaku yang dipertontonkan oleh remaja tersebut. Untuk itu sikap yang arief

perlu dinampakkan oleh orang tua, guru di sekolah dan masyarakat di gampong, agar memberikan nilai-nilai moral terhadap remaja agar pentingnya menjaga kenyamanan di jalan raya. Seharusnya Syariat Islam menjadi kekuatan bagi orang tua, guru dan masyarakat Aceh untuk menasehati anak yang berperilaku menyimpang, dan memajukan melestarikan budaya Islami, karena hanya satu-satunya di Indonesia yang memiliki kekhususan undang-undang peraturan daerah yang sudah diakui secara hukum di Indonesia. Dalam hal ini eksistensi budaya lokal dalam pemahaman ajaran islam harus ditegakkan karena memiliki kearifan tersendiri dalam mewujudkan daerah yang *Baladatun Thaiyibatun Warabbul Ghaful* (aman, damai dan sejahtera). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Masrizal, (2009) yang mengatakan bahwa tokoh informal (tokoh agama dan tokoh adat) sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh.

3. Hambatan yang dihadapi Tokoh Informal dalam Penanganan Balapan Liar di Kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman

Berdasarkan dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan pada tokoh informal di kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman di dapatkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala selama dalam penanganan balapan liar remaja, diantaranya: pertama, sebagian remaja yang melakukan balapan liar adalah anak dari TNI/Polri, kedua, trauma karena konflik yang mempengaruhi jiwa remaja untuk melakukan aksi balapan liar, ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak remaja yang mengakibatkan adanya balapan liar. Ke empat belum adanya qanun yang mengatur tentang larangan balapan liar di jalan raya.

Keempat masalah di atas menjadi perhatian khusus dari tokoh informal untuk menanggulangnya, sebagaimana yang diutarakan oleh pak Ali di Gampong Cot Lamkuweh kecamatan Meuraxa mengatakan bahwa: “warga kami kenapa sulit memberantas remaja yang balapan liar dikarenakan orang tua dari si remaja tidak mau peduli terhadap anaknya, setelah dibelikan Honda (sepeda motor) tidak pernah ditanyakan dipakai untuk apa Honda tersebut sehingga si Anak karena merasa tidak pernah diperhatikan, jadi sesuka hatinya dalam mengenderai Honda tersebut. Selanjutnya hal senada juga diutarakan oleh Ibnu warga, Nuesu Aceh, yang mengatakan kenapa banyak remaja yang mengambil jalan pintas untuk hobinya balapan liar, itu diakibatkan karena orang tua yang keluarganya broken home (keluarga yang kacau balau) sehingga si anak memilih jalan tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari pemaparan penelitian ini dapat ditarik beberapa pointer kesimpulan terhadap persepsi tokoh informal dalam penanganan aksi balapan liar anak-anak remaja di kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa, diantaranya:

1. Belum adanya peraturan tertulis yang dibuat melalui qanun gampong dan disosialisasikan kepada masyarakat dan pengguna jalan raya.
2. Trauma karena konflik dan gempa tsunami mempengaruhi sikap dan tingkah laku remaja dalam melakukan aksi balapan liar.
3. Tidak adanya koordinasi yang baik dari pihak kepolisian dan masyarakat sehingga aksi balapan liar tidak terkontrol.

2. Saran.

1. Pentingnya pencegahan terhadap Aksi balapan liar Anak-anak Remaja melalui sinergi antara orang tua, guru dan masyarakat, serta pihak kepolisian sehingga akan terwujud remaja yang peduli terhadap ketertiban dan keamanan di jalan raya
2. Perlu adanya qanun gampong (peraturan ditingkat desa) yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan di jalan raya.

Referensi

- Bambang Nugroho, tanpa tahun, dkk, *Tinjauan Tentang Kearifan Lokal*, Balatbang-sos-Depsos RI, Jakarta
- Donald K. Emmerson, 1984, *Metodologi Penelitian Pedesaan : Masalah-Masalah Besar Di tempat Kecil: Merencanakan Penelitian Pembangunan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- G. Sevilla Consuelo, dkk., 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Alimudin Tuwu, UI Press, Jakarta
- Harun Nasution, 1995, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, Penerbit Mizan, Jakarta
- Irawan, Elly, 1995, *Pengembangan Masyarakat*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Kartini Kartono, 1998, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, 1982, *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta
- Lexy J. Moelong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung

- Robbins, 2003, *Perilaku Organisasi*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jilid I Jakarta
- Sanafiah Faisal, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Prees, Jakarta
- Soedjito, 1987, *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sutoro Eko, dkk, 2007, *Bergerak Menuju Mukim Dan Gampong*, IRE Press Yogyakarta
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset
- Tay K Mc Namara and John B. Williamso, 2002, *Welfare State*, dalam David, J. Ekerdt (editor in chief), *Encyclopedia of Aging*, Volume 3, USA: Macmilan

Majalah/ Koran/ Internet/ Tesis/ Skripsi:

- Arindita, 2003, *Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah*, Fakultas Psikologi UMS, Surakarta, Skripsi
- Masrizal, 2010, *Peran Tokoh Informal Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi terhadap penanganan dampak gempa dan tsunami di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tesis
- Saini, KM, Kearifan Lokal di arus Global”, dalam *Pikiran Rakyat*, Edisi 30 Juli 2005
- Serambi Indonesia, 3 Juli 2010

Dampak Sosial Program Integrated Community Based Risk Reduction (ICBRR) Terhadap Masyarakat Korban Gempa & Tsunami

(Studi Program ICBRR-PMI Di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Syiah Kuala - Banda Aceh)

Oleh : Akmal, MA¹

Abstrak

Pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, Provinsi Aceh dilanda musibah yang mengakibatkan masyarakat tidak berdaya untuk bangkit, karena kelumpuhan dari segi fisik dan non fisik. Sehingga mengundang para pekerja kemanusiaan dari berbagai negara ikut berpartisipasi dalam memulihkan kembali Provinsi Aceh. Tidak hanya sektor formal (pemerintah) tapi juga nonformal (non pemerintah) ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan baru. Strategi yang digunakan dalam pemulihan itu adalah strategi pemberdayaan, yang mengupayakan masyarakatnya agar tumbuh menuju kemandirian. Terkait dengan penelitian ini, penulis melihat bagaimana dampak sosial program ICBRR terhadap masyarakat korban gempa dan tsunami di Gampong Lambaro Skep dan bagaimana partisipasi masyarakat pada program ICBRR. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik purposive yang sekaligus juga menggunakan teknik snowball, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi dan wawancara (interview). Analisis, yang digunakan adalah analisis kontekstual dan interpretatif, dimana yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengklasifikasian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial program ICBRR, salah satunya adalah telah menguatnya institusi lokal di Gampong Lambaro Skep, dimana PMI-ICBRR telah memberdayakan lembaga adat (tuha peut) untuk program pemberdayaan (program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat), kegiatan-kegiatan pengurangan risiko terpadu yang selama ini mereka laksanakan memberikan dampak positif terhadap rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Gampong, budaya gotong royong yang masih bertaban di Gampong Lambaro Skep. Partisipasi masyarakat Gampong cukup baik, tingkat partisipasi masyarakat pada program ICBRR paling tinggi baru dicapai sampai pada tahap keenam yaitu kemitraan Pada tahap ini masyarakat sudah memiliki kekuasaan atas pelaksanaan kegiatan, dimana pada tahap ini baru dirasakan

1. Akmal, MA, Alumni Pascasarjana Sosiologi UGM Yogyakarta.

dalam kegiatan: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, resiko/bencana, pembentukan CDMC, Pembentukan TIM CBAT, Sistem Peringatan Dini, pengelolaan dana kontigensi, dimana masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Dalam kegiatan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pemberi bantuan tingkatan partisipasi baru mencapai pada tahap penentraman (palcation), masyarakat telah diberi ruang partisipasi untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan. Proses pelaksanaan kegiatan masih dikendalikan oleh pihak PMI-ICBRR, masyarakat hanya sebatas pelaksana kegiatan.

Kata kunci : Dampak Sosial, Partisipasi, Manajemen Bencana, Pemberdayaan,

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, Provinsi Aceh dilanda musibah yang mengakibatkan masyarakat tidak berdaya untuk bangkit, karena kelumpuhan dari segi fisik dan non fisik. Sehingga mengundang para pekerja kemanusiaan dari berbagai negara ikut berpartisipasi dalam memulihkan kembali Provinsi Aceh. Tidak hanya sektor formal (pemerintah) tapi juga nonformal (non pemerintah) ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan baru. Strategi yang digunakan dalam pemulihan itu adalah strategi pemberdayaan, yang mengupayakan masyarakatnya agar tumbuh menuju kemandirian.

Dalam konteks penanggulangan bencana juga menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat menjadi pelaku utama/berpartisipasi dalam setiap program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat, fasilitator menjadi pendamping pada program-program yang dilaksanakan, program-program yang dijalankan tidak bersifat *top down* namun bersifat *bottom up*, Tujuan dari program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat adalah agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk memotivasikan dirinya untuk kembali dari kondisi bencana ke kondisi normal.

Provinsi Aceh sangat rawan bencana, terutama gempa dan tsunami, karena berada dekat dengan lempeng-lempeng yang saling berhubungan satu sama lain yang aktif, serta adanya gunung-gunung berapi yang juga aktif, jumlah korban tsunami lalu sangat tinggi, akibat dari karena pengetahuan tentang gempa dan tsunami sangat rendah, kesetiakawanan sosial rendah, tanggung jawab dan kerjasama masih rendah.

Peristiwa tersebut memberi pelajaran yang luar biasa bagi masyarakat Aceh untuk melakukan kepekaan terhadap alam dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan membangun gerakan kesiapsiagaan salah satunya adalah pro-

gram *Integrated Community Risk Reduction (ICBRR)* atau Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat (PERTAMA) yang di fasilitasi oleh PMI

Hasil pengamatan peneliti, program-program tentang pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat menjadi salah satu program sebagian NGO asing dan lokal yang ada di Aceh, namun terkadang program-program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat yang dilaksanakan, hanya sebatas pelatihan/workshop saja, keberlanjutan dinilai masih sangat minim, kondisi seperti ini dapat di nilai dari hasil survei dari DRR-A (pengurangan risiko bencana Aceh) dan UNDP yang dilaksanakan sejak Agustus-Desember 2010 di 11 kabupaten/kota di Aceh tentang kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. *Survei* tersebut menunjukkan bahwa masih banyak responden yang mengaku belum melakukan apa-apa untuk mengurangi risiko bencana. hasil survei tersebut selain pemerintah, media dan lembaga-lembaga donor, sektor swasta diharapkan turut andil dalam meningkatkan pengetahuan dan membantu masyarakat melakukan upaya-upaya PRB. Sebenarnya terdapat peluang bagi sektor swasta untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal penyampaian informasi dan akses terhadap upaya perlindungan harta benda yang mereka miliki. (Harian Aceh, 20 Februari 2011), diakses Tanggal 14 Agustus 2011.

Kegagalan program pengurangan risiko bencana lainnya, misalnya dalam upaya perlindungan hutan, seperti yang di ungkapkan oleh Direktur Eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar kepada *The Globe Journal* usai menghadiri seminar series Hutan Aceh: Menjaga Warisan Bersama, di kantor Bappeda, yaitu: program Aceh *Forest and Environment Project (AFEP)* tidak berhasil mengatasi kerusakan hutan di Aceh. Pasalnya begitu banyak dana yang telah dikeluarkan melalui *Multi Donor Fund (MDF)* tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Semakin hari hutan Aceh semakin gundul. Kegagalan yang pertama: program ini tidak berhasil meyakinkan masyarakat untuk upaya perlindungan hutan dimasa depan dan yang kedua: pemberdayaan masyarakat, misalnya selama ini para pelaku yang merambah hutan harus diberdayakan ekonominya agar mereka bisa mengubah aktifitas merambah hutan beralih ke aktifitas ramah lingkungan. (Bappenas) di akses tanggal 22 Agustus 2011.

Namun ada beberapa lembaga lain yang berhasil dalam misi program pengurangan risiko bencana, selain Palang Merah Indonesia, Pusaka Indonesia yang telah menjalankan program-program tentang kebencanaan di Simeulue, Aceh Jaya dan Nias Selatan, salah satunya bekerja sama dengan *Cordaid* dan *PDA*, terkait dengan pemberian beberapa pelatihan kebencanaan kepada sebagian besar siswa dan komunitas masyarakat. Diharapkan ke depan pelajaran manajemen bencana tidak hanya menjadi kurikulum muatan lokal tetapi masuk ke dunia pendidikan, karena masyarakat hidup di tengah bencana, entah itu gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, maupun letusan gunung merapi. Sebelum pelajaran manajemen bencana masuk dalam kurikulum pendidikan nasional, terlebih dahulu dapat dimasukkan menjadi ekstra maupun intrakurikuler. (Pusaka Indonesia) di akses

tanggal 22 Agustus 2011.

Selain itu, *TDMRC (Tsunami and Disaster Mitigation Research Center)* Universitas Syiah Kuala, lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya riset kebencanaan yang berkualitas, memberikan advokasi pada pemerintah dalam membuat kebijakan, mengumpulkan dan menyediakan data terbaik dengan mempercepat proses pengumpulan data yang tepat berkaitan dengan dampak dari bencana. ada beberapa program yang telah dilaksanakannya yaitu: di bentuknya sekolah siaga bencana di Banda Aceh, siaga bencana alam dalam konteks spritual, *Disaster Risk Management Information System (DRMIS)*, pusat informasi bencana Aceh dan berbagai kegiatan *research* tentang penanggulangan bencana dan kegiatan-kegiatan lainnya (www.tdmrc.org, tanggal 27 November 2010), diakses tanggal 14 Agustus 2011.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti tertarik meneliti di Palang Merah Indonesia khususnya cabang kota Banda Aceh, salah satu alasannya adalah keberadaan PMI sendiri yang sangat peka terhadap persoalan bencana, hal ini dapat peneliti amati ketika bencana alam pada akhir tahun 2004, PMI menjadi ujung tombak dalam menanggapi bencana. disisi lain juga terlihat PMI dapat membentuk Tim *CBAT (Community Based Action Team)*, dalam hal ini terlihat adanya *sustainable* dari program tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, masyarakat dapat menuju kemandirian.

Dampak yang terlihat sementara sangat dirasakan oleh masyarakat korban gempa dan tsunami di Banda Aceh, masyarakat telah diberikan pelatihan-pelatihan mengenai manajemen bencana dan setiap desa (*Gampong*) atau kecamatan telah dibentuk Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat/*Community Based Action Team (CBAT)* yang telah dilatih oleh PMI, apabila ada momen penting atau peringatan hari-hari besar, PMI bersama masyarakat melaksanakan simulasi mengenai bencana gempa dan tsunami, beberapa *stakeholder* terlibat dalam simulasi bencana ini, mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI dan NGO Asing dan Lokal.

Dampak lainnya yang dirasakan dari program ini adalah PMI tidak hanya berperan di masyarakat umum saja, namun juga memfasilitasi Komite Sekolah, Palang Merah Remaja dan Komunitas Sekolah (guru, staf dan murid) dalam memahami manajemen bencana atau pengurangan risiko bencana berbasis sekolah.

Berangkat dari fenomena di atas, kebiasaannya yang muncul pasca implementasi suatu program pemberdayaan yang dilakukan oleh NGO lokal maupun asing adalah menyisakan bencana baru yang dinamakan dengan bencana sosial, terjadinya perubahan sosial yang sangat mencolok. Dimana masyarakat pada saat sebelum adanya program-program pemberdayaan terlihat rajin dan mempunyai rasa sosial dan rasa kebersamaan yang tinggi namun berubah menjadi masyarakat yang manja dan masyarakat yang suka mengharapkan bantuan asing, seperti halnya yang terjadi di Aceh pada umumnya pasca gempa dan tsunami, masyarakat telah dimanjakan oleh bantuan NGO lokal dan asing, berdasar-

kan fenomena yang terjadi, maka peneliti mencoba untuk melihat dampak sosial dari program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh PMI melalui program ICBRR selanjutnya juga melihat bagaimana partisipasi masyarakat pada program ICBRR.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sangat strategis dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Terlebih lagi apabila hal ini dikaitkan dengan adanya musibah gempa dan tsunami yang melanda provinsi Aceh, yang menyebabkan infrastruktur rusak, roda perekonomian masyarakat menurun dan mengalami perubahan sosial dan budaya.

Najiyati (2005: 51), Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Meskipun istilah pemberdayaan berkonotasi adanya “pemberdaya” (subjek) dan “pihak yang diberdayakan” (obyek), apa boleh buat, baru pada tingkat itu pemahaman yang dapat dibangun. Namun, yang terpenting ialah adanya kesadaran bahwa pemberdayaan merupakan proses perubahan berkelanjutan secara bersama antara sang pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan. Hal-hal yang menjadi sasaran kerja bersama tidak dalam kerangka membawa masyarakat menuju tingkat wawasan yang telah dimiliki oleh sang pemberdaya. Selain tidak perlu, juga tidak ada yang menjamin bahwa tingkat kesadaran sang pemberdaya lebih baik daripada mereka yang diberdayakannya.

2. Pengurangan Risiko Bencana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam Panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat

(2007, p.xv) dijelaskan bahwa, pengurangan risiko bencana adalah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen-elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan.

Kerangka kerja pengurangan risiko bencana terdiri dari bidang aksi sebagai berikut: diawali dengan memahami kesadaran dan pengkajian risiko, termasuk analisis bahaya dan analisis kerentanan atau kapasitas pengembangan pengetahuan, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan informasi komitmen publik dan kerangka kerja institusional, termasuk aksi kelembagaan, kebijakan, perundangan dan komunitas penerapan langkah-langkah, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan tata kota, perlindungan fasilitas penting, penerapan sains dan teknologi, kemitraan, jejaring dan instrumen finansial. Sistem peringatan dini termasuk peramalan, penyebaran peringatan, tindakan-tindakan kesiapsiagaan dan kapasitas untuk memberikan reaksi.

3. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat (2007, p.10), menjelaskan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat (2007, p.10), menjelaskan beberapa alasan pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat:

1. Penanggulangan bencana adalah tanggungjawab semua pihak, bukan pemerintah saja.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas martabat, keselamatan dan keamanan dari bencana.
3. Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat.
4. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya.
5. Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.

6. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana.
7. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap menghadapi kondisi akibat bencana.

4. Peran dan Potensi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Pada saat kritis, masyarakat setempatlah yang mengatasi dampak bencana pada keluarga dan tetangga dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Dalam tahap pemulihan yang seringkali membutuhkan waktu panjang dan sumber daya yang banyak, masyarakat memerlukan dukungan karena sumber daya mereka menipis atau habis. (Panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat 2007, p.10),

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Peran dan potensi masyarakat adalah: *Pertama*, Masyarakat, masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. *Kedua*, Swasta, Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. *Ketiga*, Lembaga Non-Pemerintah, Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana. *Keempat*, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian, Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmupeng- etahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. *Kelima*, Media, Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggu- langannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. *Keenam*, Lembaga Internasional, Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengembangan Institusi Lokal

Nugroho (2001: 200-201), Problema kemiskinan tidak hanya dipahami sebuah kondisi ekonomi semata-mata, namun problema kemiskinan juga bersumber dari tata politik yang timpang. Tanpa adanya pemberdayaan politik bagi kelompok miskin, mekanisme tetesan kebawah (*trickle down mechanism*) yang selama ini diharapkan, tidak akan berjalan dengan baik. Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memberdayakan orang untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, sosial dan politik. Alternatif untuk menanggulangi problema kemiskinan dan ketidakberdayaan melalui pendayagunaan peran institusi-institusi mediasi yang telah ada dalam masyarakat.

Nugroho (2001: 202), dalam istilah sosiologis Berger dan Neuhaus institusi-institusi mediasi disebut sebagai "*mediating structures*", merupakan lembaga-lembaga sosial yang memiliki posisi diantara wilayah kehidupan individu yang bersifat privat dengan lembaga-lembaga sosial makro yang berhubungan dengan kehidupan publik. Dalam kehidupan kultur politik liberal, institusi-institusi mediasi merupakan sarana untuk pemberdayaan individu-individu agar mereka tidak mengalami keterasingan dalam menghadapi realitas makro.

Esman dan Uphoff (dikutip oleh Soetomo, 2008: 456-457) institusi pada tingkat lokal merupakan saluran penghubung antara sektor privat dan sektor publik, dapat diklasifikasikan enam macam, yaitu:

1. Administrasi lokal merupakan perwakilan departemen pemerintah pusat pada tingkat lokal
2. Pemerintahan lokal mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pembangunan dan membuat regulasi yang dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat
3. Asosiasi lokal yang keanggotaannya bersifat sukarela, yang dikembangkan untuk berbagai tujuan
4. Koperasi yang merupakan alat kerjasama anggota untuk memperoleh keuntungan ekonomis
5. Organisasi pelayanan lokal yang mewadahi warganya dalam saling membantu secara timbal balik
6. Usaha ekonomi perorangan dibidang manufaktur, perdagangan atau jasa

Uphoff (dikutip oleh Soetomo, 2008: 457). Kategori administrasi lokal dan pemerintahan lokal diklasifikasikan sebagai sektor publik, asosiasi lokal yang bersifat sukarela dan koperasi diklasifikasikan sebagai sektor sukarela, kemudian organisasi pelayanan lokal dan usaha ekonomi perorangan diklasifikasikan sebagai sektor privat.

Sektor sukarela yaitu bentuk institusi yang tumbuh dalam masyarakat lokal dengan keanggotaan bersifat sukarela. Sektor sukarela ini berada diantara institusi lokal yang termasuk sektor publik dan sektor privat. Institusi seperti ini dapat memfasilitasi berbagai tindakan bersama berdasarkan inisiatif lokal yang diputuskan bersama dan atas tanggungjawab bersama pula. Sehingga tidak dikontrol, dikendalikan atau tergantung dari program-program pemerintah. (Soetomo, 2008: 457)

Institusi lokal merupakan sarana pemberdayaan masyarakat dan berupa asosiasi sukarela yang tumbuh dari masyarakat sendiri dan cukup mengakar dalam kehidupan, sehingga biasanya cukup efektif sebagai sarana untuk memfasilitasi tindakan bersama, namun suatu institusi yang efektif sebagai sarana memfasilitasi tindakan bersama tersebut belum tentu efisien, oleh sebab itu dalam hal tertentu dibutuhkan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan. Sehubungan dengan upaya perubahan tersebut cara yang direkomendasikan adalah melalui proses belajar sosial. Proses belajar sosial tersebut menggambarkan kemampuan manusia dan kelompok manusia sebagai makhluk belajar yang berperilaku demi mengubah dan merencanakan kembali perilaku tersebut. Proses belajar sosial ini berlangsung terus menerus atau berkesinambungan, yang di dapatkan melalui pengalaman dalam kehidupan bersama, bukan melalui pendidikan formal (Soetomo, 2008: 458-459)

6. Social Impact Assesment

Dampak Sosial adalah perubahan yang dirasakan oleh suatu komunitas atau masyarakat yang berlangsung lama setelah implementasi suatu program berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Benson, Twigg & Rossetto, evaluasi program adalah sebuah penilaian yang sistematis dan seobyektif mungkin atas suatu program yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan atau atas suatu kebijakan, rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasilnya. Selanjut evaluasi juga bermakna kegiatan analitis yang berfokus pada keluaran (*output*) atau hasil langsung yang dicapai dalam suatu program dan terutama hasil (*outcome*)/ dampak program atau dengan kata lain perubahan signifikan atau perubahan yang berlangsung lama yang dihasilkan oleh suatu program. (Benson, Twigg & Rossetto, 2007)

Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi program, mengumpulkan informasi atau data untuk di jadikan bahan bagi penyempurnaan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada saat program berakhir, tetapi juga dapat dilakukan pada saat program sedang berjalan. (Soetomo, 2008)

Menurut Burdge dan Vanclay (1996;59) dikutip oleh Barrow (1997, 226), dampak sosial mencakup semua konsekuensi sosial dan budaya bagi populasi manusia yang mengubah cara dimana orang hidup, bekerja, bermain, berhubun-

gan dengan orang lain, berorganisasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan berusaha sebagai anggota masyarakat.

Menurut Barrow (1997: 232) Penilaian dampak sosial adalah suatu alat perencanaan dan dapat memantau dan menilai proyek atau program atau rencana atau perubahan kebijakan yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Banyak dari apa yang telah dikatakan mengenai lingkungan berlaku untuk penilaian dampak sosial, perlu diintegrasikan lebih baik pada perencanaan dan pengambilan keputusan, harus dilakukan awal dalam perencanaan dan harus berfungsi sebagai suatu proses pemantauan, bukan suatu studi sekilas. Ada literatur yang tumbuh mengenai penilaian dampak sosial dan perencanaan. Bila dua hal itu terpisah, bukannya terintegrasi, tampak ada tahap yang sama dalam proses penilaian dampak lingkungan dan sosial.

Penilaian dampak sosial berusaha untuk menilai apakah pembangunan yang diajukan mengubah kualitas kehidupan dan rasa *well-being* dan seberapa baik komunitas beradaptasi pada perubahan yang disebabkan oleh pembangunan. Untuk melakukannya, indikator yang sesuai harus diidentifikasi, dipantau dan dinilai. Indikator itu bisa tunggal atau kompleks, gabungan, seperti United Nations Development Programme Human Development Index (UNDP, 1991) atau indeks kualitas kehidupan atau penjelasan *well-being* sosial (Fitzsimmons et al, 1978 dikutip oleh Barrow, 1997).

Seperti halnya dalam penilaian dampak lingkungan, mungkin bagi penilaian dampak sosial untuk memfokuskan pada komponen lingkungan sosial atau sosio-ekonomi yang diketahui rentan; misalnya, orang miskin, orang tua, anak, pengangguran, wanita, minoritas etnis, kelas sosial bawah. Komunitas adalah satu unit yang dapat dipantau untuk perubahannya dengan menggunakan data demografi, ketenagakerjaan dan *well-being* manusia, dan model pembangunan masyarakat adalah pendekatan yang paling sering dipakai. Kadang fokus adalah kelompok target, umumnya investasi orang dianggap membantu. Juga mungkin untuk memfokuskan pada indikator sosial. Juga telah ada minat dalam menerapkan penilaian dampak sosial pada area atau melalui pendekatan sistem atau melalui pendekatan berorientasi issue. Ketika pendekatan regional diadopsi, mungkin untuk membuat penilaian pedesaan cepat dan metode penilaian pedesaan partisipatori (Barrow, 1997).

Penilaian dampak sosial sering menggunakan data kualitatif dan menghadapi lebih banyak hal tak berwujud dibanding penilaian dampak lingkungan, dan telah menarik kritik bahwa ini bersifat *soft* dan tidak tepat. Beberapa bidang yang dihadapi penilaian dampak sosial sulit diukur dan dikuantifikasi; mereka mencakup rasa memiliki, kohesi komunitas, gaya hidup, perasaan keamanan, kebanggaan lokal, persepsi ancaman dan kesempatan dan distres psikologis. Kuantifikasi hal tak berwujud terakhir ini telah diperiksa oleh Egna (1995). Penilaian dampak sosial mendasarkan pada indikator sosial, tetapi ini tidak sempurna. Ini masih

perlu untuk menjawab masalah bagaimana mendapatkan ukuran dampak sosial yang kredibel dan layak. (Barrow, 1997)

Menurut Barrow (1997: 235-236), Teknik dan metode yang digunakan dalam bidang ini meliputi survey sosial, kuesioner, wawancara; penggunaan statistik yang tersedia seperti data sensus, data status gisi dan temuan dari dengar pendapat publik; riset operasi; analisa sistem; analisa biaya-manfaat sosial; teknik Delphy; informasi pemasaran dan konsumen; laporan dari sumber sosial, kesehatan pencegahan kejahatan dan kesejahteraan dan riset lapangan oleh ilmuwan sosial. Dari ini, data sensus dan demografi cenderung menyajikan tantangan dan masalah yang paling sedikit. Psikolog perilaku sering terlibat dalam penilaian dampak sosial untuk memastikan berbagai hal seperti persepsi, reaksi, apakah stres telah atau akan diderita, apa yang merupakan rasa *well-being*.

Finsterbusch (1990) dikutip oleh Barrow (1997:237) mengakui dua aspek penilaian dampak sosial: evaluasi proses, menetapkan apakah tugas penilaian dampak sosial yang direncanakan atau dijanjikan dijalankan dan evaluasi dampak yaitu menilai dampak positif dan negatif. Selanjutnya Burdge (1994) dikutip oleh Barrow (1997:237) menjabarkan suatu pendekatan sebagai dasar untuk memprediksi dampak masa depan dari pembangunan yang diusulkan. Pendekatan lain adalah mengusahakan serangkaian pandangan potret dan mencoba untuk mengisi diantaranya. Juga, penilaian dampak sosial dan lingkungan menggunakan pendekatan matrik.

Penilaian dampak sosial sering menggunakan evaluasi sosial, evaluasi pembangunan sosial, analisa sosial dan analisa biaya manfaat sosial untuk mengumpulkan informasi dan menilai bagaimana berbagai hal dinilai. Evaluasi pembangunan sosial dijelaskan oleh Marsden dikutip oleh Barrow (1997:237) sebagai suatu proses pembelajaran, yang biasanya retrospektif dan interpretif, sering mendasarkan pada indikator holistik. Pendekatan ini memberikan sedikit penilaian *ex ante*, selanjutnya Marsden menyatakan bahwa penilaian dampak sosial dan analisa biaya manfaat sosial tidak mampu secara akurat dan memadai merefleksikan dinamika perubahan yang terjadi dalam pembangunan sosial. Mereka merasakan bahwa evaluasi pembangunan sosial dapat mengadopsi fokus berorientasi orang untuk memungkinkan pemahaman yang akan penting jika pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tujuan. Penekanan adalah pada evaluasi dari perspektif evaluasi yang menjelaskan masalah penilaian (misalnya, bias orang luar). Evaluasi pembangunan sosial mungkin membantu penilaian dampak sosial untuk meningkatkan pendekatannya pada evaluasi dan khususnya jika penilaian dampak sosial bersifat partisipatoru, dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembangun dan penerima.

7. Partisipasi Masyarakat

Brannstom (dikutip oleh Soedibyo dan Fachrul Husain Habibie, 2005:

266) partisipasi masyarakat adalah suatu proses sosial yang berlangsung dalam suatu daerah tertentu, dimana para penduduknya menangani keperluan-keperluannya melalui partisipasi aktif dalam praktek maupun dengan mengambil bagian dalam penentuan keputusan

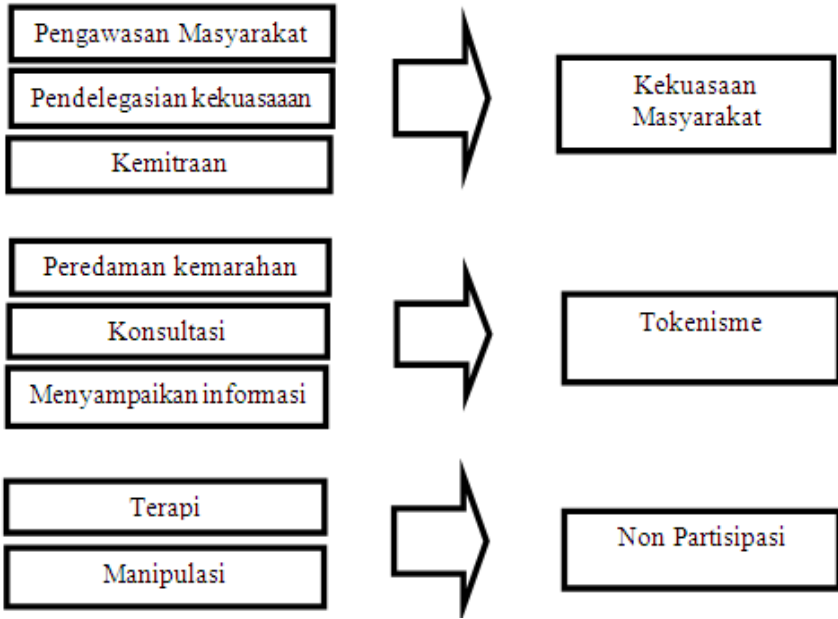
Pemberian peranan dan partisipasi yang lebih besar kepada suatu masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan, akan sangat memberikan dampak positif, karena masyarakat tidak menjadi tergantung kepada program-program pemerintah yang bersifat menunggu instruksi atau *top down*. masyarakat yang sifatnya tergantung, hanya akan melaksanakan kegiatan pembangunan apabila masih ada program dari pemerintah, setelah program pembangunan berakhir, masyarakat tidak lagi melaksanakan kegiatan pembangunan dan program akan berhenti dan tidak berkelanjutan. (Soetomo, 2009: 354-355)

Bracht (dikutip oleh Soedibyo dan Fachrul Husain Habibie, 2005: 267) menyatakan bahwa untuk mengukur hasil-hasil keterlibatan atau partisipasi masyarakat adalah mungkin dilakukan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan partisipasi itu sendiri, yaitu:

1. kesempatan pengambilan keputusan serta memberi saran,
2. besarnya dan lamanya waktu yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada sasaran,
3. perwakilan penduduk dan kumpulan-kumpulan pimpinan yang terbentuk,
4. tahap kepemilikan sosial yang dicapai,
5. kepuasan atas proses-proses partisipasi,
6. penilaian pencapaian maupun pengaturan sasaran-sasaran jangka panjang.

Menurut Marisa B. Guaraldo Chougil (dikutip oleh Arif Wahyu Kristianto, 2008: 3) ada delapan tangga partisipasi masyarakat di negara-negara yang kurang berkembang yaitu: Pemberdayaan (*Empowerment*), Kemitraan (*Partnership*), Mendamaikan (*Conciliation*), Dissimulasi/Pura-pura (*Dissimulation*), Diplomasi (*Diplomation*), Memberikan Informasi (*Informing*), Konspirasi (*Conspiration*), *Management* Diri Sendiri (*Self Management*).

Gambar 3,
Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (Arnstein 1969 dalam Fegence, 1977 dikutip oleh Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:)



Arnstein mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat, dari tangga pertama hingga tangga delapan, dengan logika sebagai berikut:

1. tangga pertama adalah manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk di dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Keterlibatan masyarakat dalam suatu program yang tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut, masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi objek program yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. Masyarakat dilibatkan hanyalah untuk mendapatkan dukungan publik semata
2. tangga ketiga pemberian informasi, dilanjutkan tangga keempat konsultasi dan tangga kelima penentraman, adalah merupakan suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat, untuk sekedar meredam keresahan, oleh karena itu ketiga tangga ini kemudian masuk dalam kategori tokeisme. Sesungguhnya penyampaian

informasi adalah merupakan suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat, agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang telah dicanangkan, pada prinsip tidak terjadi diskusi melainkan komunikasi *top down*. Sedangkan konsultasi disampaikan dalam suatu forum hanyalah merupakan usaha untuk mengundang ketertarikan publik dan mempertajam legitimasi publik, bukan untuk memperoleh pertimbangan atau mengetahui keberatan dari publik. Dan tangga kelima adalah peredaman, ketiga tangga ini seolah-olah masyarakat telah diberi ruang partisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran, keberatan, namun sesungguhnya hanya sekedar formalitas semata, selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.

3. Tangga keenam baru dapat terjadi apa yang dikatakan dengan kemitraan dengan masyarakat, masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Dan pada tangga ketujuh telah terjadi pelimpahan kewenangan oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir tangga kedelapan masyarakat telah mampu melakukan kontrol. Ketiga tangga tersebut termasuk dalam kategori tingkat kekuasaan masyarakat

Memperhatikan taksonomi Arnstein tersebut, sebuah kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat hendaknya sampai menyentuh tangga 6,7, dan 8. Artinya jika benar-benar ingin mewujudkan masyarakat menjadi mitra kerja pemerintah, maka pemerintah memosisikan diri bukan sebagai dinamisator, tetapi sebaliknya pemerintah beranjak dari dinamisator dengan melakukan pergeseran yang rasional menuju peran katalisator dan secara berangsur-angsur berperan sebagai fasilitator, jika hal ini dapat dilakukan, maka secara serta merta telah menempatkan masyarakat sebagai mitra sebagaimana dikehendaki Arnstein pada tangga ke enam dan secara berangsur-angsur terjadi pendelegasian kewenangan serta terbentuk kemampuan kontrol oleh masyarakat, pada tangga ke tujuh dan delapan.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial program ICBRR dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada program ICBRR di *Gampong Lambaro Skep*. Lokasi penelitian di *Gampong Lambaro Skep*, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat *Gampong Lambaro Skep* dan pihak-pihak lainnya yang dianggap penting demi kelengkapan data penelitian yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* yang sekaligus juga menggunakan tehnik *snowball*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik ana-

lisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kontekstual dan interpretatif. Dalam analisis kontekstual dan interpretatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu pengklasifikasian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan data.

Pada proses analisis data, penelitian ini dilakukan juga proses komparasi. Komparasi dilakukan dengan cara membandingkan dan menguji kembali antara data yang diperoleh dilapangan dari hasil observasi dan berbagai data atau keterangan ilmiah lainnya yang relevan. Keterangan ilmiah tersebut diperoleh dari berbagai referensi pustaka yang sempat dikaji dengan data yang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Proses ini bermanfaat sebagai cross-check data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sempat diteliti. Selanjutnya keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik. Triangulasi dengan sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Terkait dengan penelitian ini, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke masyarakat penerima program ICBRR dan pelaksana program ICBRR, data dari sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis, menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya peneliti meminta kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Terkait dengan penelitian ini, data yang diperoleh dengan hasil wawancara, lalu peneliti mencoba cek kembali dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi, apabila ada data yang berbeda-beda, maka peneliti mendiskusikan lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang benar. Misalnya mengenai mengenai partisipasi masyarakat pada program ICBRR, peneliti telah mendapatkan data melalui wawancara, contohnya ada informan yang menjawab partisipasi masyarakat bagus atau kurang bagus, namun peneliti tidak hanya menerima jawaban begitu saja, karena mungkin saja mereka memberikan jawaban yang tidak objektif, tetapi peneliti menggunakan teknik observasi yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana keterlibatan masyarakatnya, selanjutnya juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu melihat kembali daftar hadir masyarakat pada saat kegiatan, apabila peneliti menemukan data yang berbeda-beda, maka peneliti mendiskusikan kembali dengan informan tersebut, untuk selanjutnya baru dapat ditarik kesimpulan, begitu juga mengenai dampak sosial, data yang telah peneliti dapat melalui wawancara, kembali peneliti menggunakan teknik observasi yaitu mengamati kembali keadaan

masyarakat setelah implementasi program *ICBRR*, bagaimana perubahan sosial masyarakatnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan setelah implementasi program *ICBRR*,

Selanjutnya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu melihat kembali daftar-daftar agenda kegiatan *CBAT*, *CDMC* bersama dengan masyarakat, apabila menemukan data-data yang berbeda, maka peneliti kembali mendiskusikan dengan informan untuk selanjutnya baru ditarik kesimpulannya, begitu juga dengan data-data yang lainnya.

D. Dampak Sosial Program ICBRR di Gampong Lambaro Skep

Fenomena yang terjadi di *Gampong Lambaro Skep*, pada saat terjadi gempa dan tsunami tahun 2004 khususnya di *Gampong Lambaro Skep*, masyarakat telah memperlihatkan bahwa banyak diantara mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan jika terjadi bencana, hal ini dikarenakan sebelumnya masyarakat tidak pernah mendapatkan pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana, bahkan untuk gempa bumi berskala kecil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sering sekali merasa sangat ketakutan dan mengantisipasi bencana selanjutnya. Di sisi lain akibat kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dari komunitas tersebut tidak terlindungi dari bermacam resiko seperti: banjir dadakan, tanah longsor, kebakaran, resiko kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu kehadiran program *ICBRR* fokus pada membangun kemampuan dari komunitas yang menjadi target sehingga komunitas itu sendiri dapat memberikan respons segera terhadap berbagai macam resiko dan bencana alam yang menimpa mereka, asumsinya masyarakatlah yang paling awal menerima dampak ketika terjadi bencana

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Lambaro Skep, tentang bahaya, resiko/bencana, mudah terkena serangan dan tindakan-tindakan pencegahan atau untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana, maka pada tahun 2006, PMI melalui staf program *ICBRR* dan relawan PMI telah memfasilitasi dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang pengurangan risiko bencana, seperti simulasi, drama jalanan, pertandingan masyarakat, perlombaan-perlombaan, pendidikan dan bahan-bahan informasi tentang bencana yang dibuat dan di distribusikan untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan ini diisi dengan materi-materi tentang pengurangan risiko bencana, alasannya terkadang masyarakat tidak semuanya suka membaca buku atau brosur mengenai pengurangan risiko bencana, ada sebagian dari masyarakat diduga menyukai kegiatan olah raga, seni tari dan sebagainya, selain itu terkait dengan simulasi manfaatnya adalah untuk melatih masyarakat agar mereka dapat mengimplementasi pengetahuannya tentang pengurangan risiko bencana, asumsinya apabila masyarakat hanya menerima materi kelas, membaca, dan mendengarkan masyarakat tidak akan mendapatkan pengetahuan sepenuhnya tanpa di adakan simulasi mengenai pengurangan risiko bencana, dampak yang dirasakan adalah masyarakat dapat memahami tentang

materi-materi dan praktik tentang penanggulangan bencana.

Desain/format untuk melihat dampak sosial program ICBRR ini, penulis mencoba mengacu pada teori yang dikeluarkan oleh Owen dan Rogers (dikutip oleh Suharto, 2006: 125-126) yang dinamakan *impact evaluation* (evaluasi dampak) yaitu: *Pertama*: tujuan dan orientasi evaluasi, yakni, evaluasi dilakukan untuk menaksir dampak dari suatu pelayanan sosial, dalam konteks penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial pasca program ICBRR, tujuan evaluasi difokuskan pada tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan respon bencana di tingkat komunitas/masyarakat, berapa banyak masyarakat yang sudah terlihat peningkatan kapasitasnya dan pengaruh-pengaruh tidak langsung.

Kedua, yaitu isu-isu penting yang sejalan dengan masing-masing tujuan, yakni meliputi apakah program yang di implementasikan sudah sesuai dengan rencana? Tujuan program telah dicapai? Apakah kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ingin dipenuhi oleh program ini telah tercapai? Apa pengaruh-pengaruh tidak langsung dari program ini? Apakah strategi-strategi yang diterapkan telah mengarah pada hasil-hasil yang ingin dicapai? Bagaimanakah perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan telah berpengaruh terhadap hasil-hasil program? dan yang ketiga adalah pendekatan-pendekatan umum dalam melaksanakan evaluasi, meliputi evaluasi berbasis tujuan (*objective based evaluation*), yakni: penilaian program berdasarkan tujuan.

Selanjutnya studi proses-hasil (*process-outcomes studies*) evaluasi yang dilakukan tidak hanya hasil-hasil program, namun juga proses atau tingkat penerapan dari program tersebut, selanjutnya evaluasi berbasis kebutuhan (*need-based evaluation*) ialah penilaian program berdasarkan tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat/komunitas yang mampu dicapai oleh suatu program. selanjutnya adalah evaluasi tujuan bebas (*goal-free evaluation*) yakni mengevaluasi dampak tidak langsung dari suatu program, artinya evaluasi diarahkan bukan pada tujuan program, namun pada hasil dari suatu program, dan yang terakhir adalah audit kinerja (*Performance Audit*)

Untuk mengukur/mengevaluasi suatu program sosial, maka di perlukan indikator, indikator dapat didefinisikan sebagai suatu alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu kondisi dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Indikator dapat menyangkut fenomena sosial, ekonomi, penelitian, proses suatu usaha peningkatan kualitas, indikator dapat berbentuk ukuran, angka, atribut, atau pendapat yang dapat menunjukkan suatu kondisi. (Suharto, 2006: 126)

Indikator dapat dikelompokkan dalam dua kategori, pertama: indikator kinerja, yaitu: mengindikasikan kondisi masukan dan proses pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dan aktor-aktor terkait, kedua: indikator keluaran, yaitu: menunjukkan hasil langsung (*output*) ataupun tidak langsung atau dampak (*outcome*) dari suatu kegiatan pelayanan/program. (Suharto, 2006: 128)

Pemilihan indikator yang tepat adalah suatu hal yang penting dalam perancangan dan evaluasi program. Indikator adalah cara obyektif untuk memperlihatkan bahwa program benar-benar mencapai kemajuan. Indikator dapat digunakan untuk menilai kemajuan dan *output*, *outcome* dan *impact*. Indikator dapat mengukur perubahan secara langsung, atau apabila ini tidak mungkin, mengukur hal-hal yang mewakili atau mendekati. (Benson, Twigg & Rossetto, 2007)

Kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana dapat diukur dengan menggunakan indikator keluaran yang lebih spesifik yang relevan, misalnya, disahkannya undang-undang manajemen bencana; dilaksanakannya percontohan/pilot investasi-investasi skala kecil di bidang pengurangan risiko bencana; jaring pengaman sosial kebencanaan terintegrasi sepenuhnya ke dalam strategi penanggulangan kemiskinan; atau penguatan kesadaran publik akan risiko-risiko bencana. (Benson, Twigg & Rossetto, 2007)

Memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan keberhasilan suatu program, maka harus menentukan terlebih dahulu indikator-indikator yang relevan, termasuk beberapa indikator untuk setiap tujuan program dan tujuan antara yang berkaitan dengan bencana. menjelaskan nilai-nilai dasar yang ada dan nilai-nilai yang menjadi sasaran. Indikator-indikator harus jelas menunjukkan tingkat keberhasilan yang diperlukan untuk meraih pencapaian yang diharapkan. Indikator harus spesifik dan nyata, terukur secara kuantitatif dan kualitatif, terikat waktu dan tempat. Indikator kuantitatif digunakan untuk menilai kemajuan dalam mencapai target-target tertentu, misalnya, jumlah tim tanggap bencana komunitas dan para anggotanya yang telah menerima pelatihan dan telah diberi perlengkapan, jumlah rumah tahan bahaya yang telah dibangun atau bangunan-bangunan publik yang telah diperkuat dan jumlah rencana-rencana peredaman bencana yang telah disusun serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka merealisasikan rencana-rencana tersebut. Indikator kualitatif sangat luas digunakan dalam evaluasi program pengurangan risiko bencana, misalnya untuk menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam mengelola risiko bencana. Data kualitatif biasanya berisi pandangan-pandangan para pemangku kepentingan yang dikumpulkan melalui lokakarya-lokakarya, diskusi-diskusi kelompok terfokus dan wawancara semi terstruktur. (Benson, Twigg & Rossetto, 2007)

Manfaat dan dampak kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana mungkin tidak terukur secara langsung, upaya mengukur pencapaian kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana menimbulkan tantangan tersendiri karena kejadian bahaya yang dipertimbangkan dalam rancangan program, belum tentu terjadi selama masa implementasi program, Tantangan ini terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketangguhan terhadap bahaya-bahaya geofisik seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami. Dalam hal ini dibutuhkan indikator-indikator antara atau indikator proses yang setidaknya akan dapat memperlihatkan adanya kemajuan dalam pencapaian tujuan-tujuan program, misalnya, jumlah sekolah tahan gempa yang

dibangun.

Indikator proses adalah menilai kualitas proses dan mempertanyakan ke mana proses ini akan menuju. memberikan penilaian mereka pada semua tingkat, misalnya kegiatan, keluaran, hasil, dampak. Indikator-indikator proses seringkali harus digunakan sebagai indikator pendekatan dalam mengukur dampak intervensi-intervensi pengurangan risiko bencana, terutama untuk bahaya-bahaya yang tergolong jarang terjadi misalnya, gempa bumi dan tsunami. Dalam program kesiapsiagaan komunitas terhadap bencana, misalnya, indikator-indikator prosesnya dapat berupa: perekrutan tim, pelatihan dan pembentukan tim penanggulangan bencana dari komunitas yang menjadi target, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan masyarakat untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman dan keluarga-keluarga yang paling rentan, pembangunan struktur-struktur terkait, simulasi rutin. (Benson, Twigg & Rossetto, 2007)

Berdasarkan dan mengacu pada beberapa teori di atas, adapun yang menjadi indikator dan dampak sosial program ICBRR adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya, resiko/bencana mudah terkena serangan dan tindakan-tindakan pencegahan atau meningkatnya kapasitas penanganan bencana.

Telah diadakan pelatihan dan simulasi mengenai pengurangan risiko bencana di *Gampong Lambaro Skep*, pembagian brosur-brosur tentang penanggulangan bencana atau manajemen bencana. diadakan drama, tari-tarian, perlombaan-perlombaan, olah raga dan ceramah-ceramah agama yang di isi dengan materi-materi tentang penanggulangan bencana

Kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon bencana dapat dinilai salah satunya ketika terjadi gempa dan air pasang, saat terjadi gempa masyarakat melalui *CBAT* menghubungi RAPI melalui radio HT, karena anggota *CBAT Gampong Lambaro skep* ada juga yang bergabung di RAPI. Setelah ada info dari RAPI, masyarakat akan menggunakan microphone dari mesjid untuk di umumkan kepada masyarakat umum

2. Berfungsinya komite penanggulangan bencana masyarakat (*community disaster management committees /CDMC*)

Telah terbentuknya Komite Penanggulangan Bencana Masyarakat (*Community Disaster Management Committees /CDMC*) yang berperan melakukan penerimaan para relawan, pelatihan dan memperlengkapi para relawan dan juga berfungsi sebagai pengarah, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan manajemen bencana,. Tim relawan ini yang disebut dengan Tim Aksi Berbasis Masyarakat (*Community Based Action Team/ CBAT*), dibentuk, dilatih dan diberikan perlengkapan untuk menanggapi keadaan darurat/bencana. *CBAT* akan bekerja dibawah arahan *CDMC*, tetapi akan

memiliki hubungan langsung dengan Cabang PMI Kota Banda Aceh.

CDMC ini beranggotakan dari *Tubapeut* yang ada di *Gampong Lambaro Skep*, *Tuba peut* ini adalah salah satu dari lembaga adat yang ada di Aceh pada umumnya. Dalam hal ini PMI-ICBRR memberdayakan lembaga-lembaga lokal dalam melaksanakan program pemberdayaan khususnya program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, hal ini sesuai dengan konteks pemberdayaan, dimana institusi-institusi lokal adalah sarana pemberdayaan masyarakat

3. Telah terbentuknya Tim Relawan Tanggap Cepat (*rapid response volunteers team/CBAT*) di *Gampong Lambaro Skep* atau tersedianya tim pertolongan pertama yang siap dan tanggap dalam menangani korban bencana

Tim *CBAT* beranggotakan masyarakat *Gampong Lambaro Skep*, yang direkrut melalui proses testing, anggota *CBAT* berjumlah 60 orang yang dibagi dalam 3 tim, yaitu 20 orang untuk setiap tim, masing-masing tim mempunyai ketua tim yang akan mengkoordinir anggotanya, Tim *CBAT* akan menjadi ujung tombak dalam menangani persoalan pengurangan risiko bencana di *Gampong Lambaro Skep*. satu orang tim *CBAT* diharapkan dapat mengkoordinir minimal 10 kepala keluarga. Tim *CBAT* ini akan bekerja dibawah arahan CDMC tetapi mempunyai hubungan langsung dengan PMI Cabang Kota Banda Aceh

Untuk peningkatan kapasitasnya Tim *CBAT* diberikan pelatihan-pelatihan mengenai manajemen bencana atau pengurangan risiko bencana, dan pelatihan-pelatihan mengenai pertolongan pertama

4. Telah dilakukan pemetaan *Gampong Lambaro Skep* dan tersedianya informasi kawasan rawan bencana

Mengidentifikasi dan membuat pemetaan tentang berbagai resiko, bahaya, dan rawan bencana, dan juga kemampuan mendasar di dalam masyarakat untuk mengurangi dan meringankan dampak dari berbagai bencana di masa yang akan datang. Peta yang digambarkan oleh masyarakat dengan menggunakan *GPS* yang didampingi oleh *Swiss Red Cross*

5. Telah ada Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System /EWS*) di *Gampong Lambaro Skep*

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System/EWS*) juga menjadi bagian yang integral dari program ICBRR. Untuk *Gampong Lambaro Skep*, PMI telah memberikan bantuan sirine tangan dan megaphones yang dapat digunakan pada saat bencana, namun ada sedikit kendala, karena hingga saat ini, PMI Cabang Kota Banda Aceh melalui program ICBRR, belum menyediakan alat komunikasi radio seperti yang pernah mereka janjikan pada saat program sedang berjalan, mengenai penggunaan alat komunikasi radio

mereka sudah pernah diberi pelatihan dan juga sudah sering sekali diadakan simulasi.

6. Adanya dana kontingensi masyarakat yang dikelola oleh masyarakat

Menfasilitasi kegiatan dana kontingensi untuk *Gampong Lambaro Skep* senilai Rp 10 juta. dana kontingensi ini dapat di pergunakan ketika ada bencana atau menanggapi keadaan *emergency*, sebelum tibanya bantuan dari luar. *CDMC* yang bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Selama masa keadaan *emergency*, masyarakat akan dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli beberapa barang bantuan keadaan darurat bagi anggota masyarakat yang paling parah terkena dampak bencana. Selain itu, dana ini juga bisa digunakan untuk mendukung rumah tangga dalam inisiatif pemulihan berskala kecil, seperti perbaikan rumah, pembelian bibit dan sebagainya.

Kemudian dana ini benar-benar diperuntukkan bagi respon keadaan darurat bencana. mengenai pengelolaan keuangan masyarakat telah diberikan pelatihan mengenai akuntansi yang sederhana untuk *Gampong Lambaro Skep*. Dana Rp.10 juta sebagai dana stimulus bagi masyarakat *Gampong lambaro skep*, selanjutnya masyarakat/yang memiliki usaha dagang sendiri yang mengumpulkan tergantung kesepakatan mereka misalnya setiap satu bulan Rp. 2000, atau tergantung kesepakatan. Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan *Gampong* yang sifatnya mendesak atau darurat, mengenai pengelolaan dana dimusyawarahkan oleh masyarakat sendiri. Sistem akuntansinya bersifat terbuka. Program seperti ini dinamakan dengan *Community Contingency Fund*. hingga saat ini pengelolaan ini masih dijalankan dan di kelola oleh *CDMC* bersama masyarakat sendiri

Program *Community Contingency Plan* ini menjadikan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama, tanpa harus berharap pada lembaga lembaga donor apabila terjadi bencana, selain itu masyarakat juga telah memahami bagaimana mengelola keuangan yang ideal atau sesuai dengan sistem akuntansi yang sederhana untuk *Gampong Lambaro Skep*.

7. koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga pemberi bantuan dan juga PMI.

Membangun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, serta lembaga donor baik lokal maupun nasional. Staf program *ICBRR* menfasilitasi dan mendukung *CDMC* dalam pertemuan formal maupun informal dengan lembaga-lembaga tersebut dengan harapan bahwa masyarakat benar-benar diakui dan didengar di dalam struktur pemerintahan.

Masyarakat juga di ajarkan bagaimana dalam membuat rencana aksi *Gampong (Community Contingency Plan)* atau program kerja untuk *Gampong* mereka sendiri. Program yang dirancang itu dapat mencakup penganggulangan bencana,

sosial dan ekonomi, untuk program-program penanggulangan bencana akan di fasilitasi langsung oleh PMI sendiri melalui program *ICBRR*, sedangkan program-program sosial dan ekonomi lainnya PMI akan menjadi fasilitator untuk diarahkan ke lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini PMI akan mendampingi, sekalipun PMI hanya fokus di program penanggulangan bencana.

8. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan bencana

Partisipasi masyarakat *Gampong* dapat dikatakan bagus, hal ini dapat diukur atau diamati ketika ada kegiatan, rapat dan simulasi penanggulangan bencana. disamping itu masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, misalnya PMI hanya membantu material, sedangkan tenaga kerjanya dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga aktif membersihkan *drainase* yang telah mereka bangun. Selain itu masyarakat juga berpartisipasi membantu saudara-saudaranya ketika terjadi kebakaran rumah di *Gampong* pada beberapa waktu yang lalu, masyarakat memberikan bantuan berupa uang atau bantuan lainnya, kegiatan ini di fasilitasi oleh tim *CBAT*

Partisipasi pada saat pemetaan *Gampong* yang dilakukan oleh *Swiss Red Cross*, yang melibatkan masyarakat sendiri, pemetaan *Gampong* menggunakan *GPS*, hasil pemetaan *Gampong* tersebut sekarang berada di *Gampong*, pada saat pemetaan *Gampong*, masyarakat sendiri yang melakukannya dan di dampingi oleh fasilitator dari *Swiss Red Cross*. Partisipasi pada saat Simulasi di *Gampong* Gano, Lampulo, Lamdingin dan Lambaro skep tentang puting beliung, menggabungkan seluruh *CDMC/CBAT* dan perwakilan masyarakat, masyarakat dinilai sangat antusias melakukan kegiatan simulasi

Partisipasi masyarakat saat perekrutan anggota *CBAT*, peminat untuk menjadi anggota *CBAT* sangat tinggi, ada sekitar 100 orang, namun kapasitas *Gampong* lambaro skep yang terdiri dari 5 dusun, jumlah anggota yang diminta oleh PMI, hanya 60 orang, melihat keinginan dan antusias dari masyarakat maka PMI bersama masyarakat melaksanakan sistem rekrutmen dengan melakukan tes untuk anggota *CBAT*, lokasi tes berada di gedung SD *Gampong* Lambaro Skep, masyarakat yang ikut dari berbagai elemen, remaja mesjid, ibu-ibu, dan pemuda lainnya, setelah proses rekrutmen, maka tim *CBAT* akan diberikan pelatihan selama 7 hari, materi yang diajarkan adalah manajemen bencana, pertolongan pertama, pemetaan *Gampong*, dalam hal ini masyarakat telah menyadari betapa penting pengetahuan tentang penguurangan risiko bencana padahal tidak ada insentif (uang) untuk para anggota *CBAT*.

9. Terwujudnya budaya gotong royong dalam rangka pemulihan pasca bencana di *Gampong* Lambaro Skep

Kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang selama ini mereka

laksanakan memberikan dampak positif terhadap rasa kebersamaan dan rasa memiliki, dinilai selama beberapa tahun yang lalu, masyarakat sering berkumpul bersama ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI-ICBRR menjadikan masyarakat dekat antar sesamanya, sebelumnya masyarakat di *Gampong* tidak semuanya saling mengenal, karena masyarakat *Gampong* Lambaro Skep sangat heterogen, banyak pendatang dari berbagai kabupaten bahkan pendatang dari luar provinsi Aceh sendiri, salah satu contoh dari rasa kebersamaan dan rasa memiliki adalah kegiatan gotong royong yang sering dilaksanakan setiap pagi Jum'at, membersihkan lingkungan mesjid, sekolah, *drainase*, dan rumput sekitar rumah penduduk, biasanya mereka laksanakan pada jam 08.00 hingga jam 10.00 pagi. Padahal menjadi sebuah kebiasaan dari suatu masyarakat setelah implementasi suatu program-program pemberdayaan di suatu komunitas/*Gampong*, menjadikan masyarakat manja dan malas untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, karena masyarakat sering dibayar untuk membersihkan *Gampong* mereka sendiri, seperti programnya *Cash For Work* pada saat Aceh masih dalam status *emergency*, namun dalam hal ini *Gampong* Lambaro Skep menjadi sangat unik, masyarakat masih bertahan dalam melaksanakan kegiatan gotong royong.

10. Tersedianya jalur evakuasi dan *escape building* di *Gampong* Lambaro Skep

Telah di pasang jalur-jalur evakuasi untuk tsunami yang menuju ke *escape building*, untuk *Gampong* Lambaro Skep *escape building* tidak dibangun secara khusus seperti yang dibangun di *Gampong* Ulee Lheu, untuk *Gampong* Lambaro Skep yang menjadi *escape building* berada di Dayah/Pesantren Terpadu Inshafuddin, bentuk bangunannya berlantai tiga. Gedungnya di bangun oleh *Swiss Red Cross*. Asumsinya disaat terjadi bencana masyarakat *Gampong* Lambaro Skep yang mengambil posisi atau peran dalam penanggulangan bencana dalam hal ini *CBAT* dan *CDMC* menjadi ujung tombak dalam menanggulangi bencana tanpa harus berharap pada relawan PMI.

11. Informasi dan komunikasi yang akurat, lancar dalam proses penanganan pasca bencana dan terwujudnya rasa kebersamaan dan saling membantu ketika ada bencana

Terwujudnya komunikasi, koordinasi, rasa kebersamaan, dan saling membantu antara *CBAT*, *CDMC* dan masyarakat ketika terjadinya bencana di *Gampong* Lambaro Skep, hal ini dapat di amati ketika penanggulangan bencana kebakaran di *Gampong* Lambaro Skep, mereka dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, padahal sebelumnya mereka belum pernah bekerjasama, karena masyarakat *Gampong* Lambaro Skep sangat heterogen, masyarakat disibukkan dengan kegiatan masing-masing.

Perubahan-perubahan kearah positif sangat banyak dirasakan oleh masyarakat *Gampong* Lambaro Skep, rasa kepedulian terhadap sesama dan rasa kebersamaan, misalnya ketika terjadi kebakaran, angin puting beliung,

dan ketika rekonstruksi drainase, mereka dapat bekerjasama dan berpartisipasi tanpa harus dibayar malahan mereka menggunakan fasilitas mereka sendiri, misalnya alat berat (beco). Ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

E. Partisipasi Masyarakat Pada Program ICBRR

Ife dan Frank Tesoriero (2008: 331), Partisipasi merupakan suatu proses dan meliputi banyak tingkat dan dimensi perubahan: perubahan dalam kapasitas organisasi, komunitas dan individu; perubahan sikap dan perilaku; perubahan dalam akses kepada sumberdaya; perubahan dalam keseimbangan kekuasaan; perubahan dalam persepsi para pemangku kepentingan.

Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam program *ICBRR*, penulis mengacu pada bukunya Ife dan Frank Tesoriero (2008:331-332), dan telah penulis sesuaikan dengan konteks penelitian ini, adapun indikatornya adalah:

- a. Indikator kuantitatif mencakup:
 1. Perubahan-perubahan positif dalam layanan-layanan di masyarakat
 2. Jumlah pertemuan dan jumlah peserta
 3. Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat
 4. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program
 5. Jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan
 6. Jumlah masyarakat yang memegang peranan dalam program
- b. Indikator-indikator kualitatif mencakup:
 1. kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi
 2. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat
 3. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam materi-materi pengurangan risiko bencana, manajemen program dan keuangan
 4. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan
 5. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi
 6. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat yang mengelola organisasi
 7. Meningkatnya jaringan dengan program, masyarakat dan organisasi

lainnya

Berangkat dari fenomena diatas penulis akan melihat partisipasi menurut teori (Arnstein 1969 dalam Fegence, 1977 dikutip oleh Ambar Teguh Sulistiyani, 2004) Berikut Arnstein mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat, dari tangga pertama hingga tangga delapan, dengan logika sebagai berikut:

- a. tangga pertama adalah manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk di dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Keterlibatan masyarakat dalam suatu program yang tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut, masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi objek program yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. Masyarakat dilibatkan hanyalah untuk mendapatkan dukungan publik semata
- b. tangga ketiga pemberian informasi, dilanjutkan tangga keempat konsultasi dan tangga kelima penentraman, adalah merupakan suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat, untuk sekedar meredam keresahan, oleh karena itu ketiga tangga ini kemudian masuk dalam kategori tokeisme. Sesungguhnya penyampaian informasi adalah merupakan suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat, agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang telah dicanangkan, pada prinsip tidak terjadi diskusi melainkan komunikasi *top down*. Sedangkan konsultasi disampaikan dalam suatu forum hanyalah merupakan usaha untuk mengundang ketertarikan publik dan mempertajam legitimasi publik, bukan untuk memperoleh pertimbangan atau mengetahui keberatan dari publik. Dan tangga kelima adalah peredaman, ketiga tangga ini seolah-olah masyarakat telah diberi ruang partisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran, keberatan, namun sesungguhnya hanya sekedar formalitas semata, selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.
- c. Tangga keenam baru dapat terjadi apa yang dikatakan dengan kemitraan dengan masyarakat, masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Dan pada tangga ketujuh telah terjadi pelimpahan kewenangan oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir tangga kedelapan masyarakat telah mampu melakukan kontrol. Ketiga tangga tersebut termasuk dalam kategori tingkat kekuasaan masyarakat

Memperhatikan taksonomi Arnstein tersebut, sebuah kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat hendaknya sampai menyentuh tangga 6,7, dan 8. Artinya jika benar-benar ingin mewujudkan masyarakat menjadi mitra kerja pemerintah, maka pemerintah memposisikan diri bukan sebagai dinamisator, tetapi

sebaiknya pemerintah beranjak dari dinamisator dengan melakukan pergeseran yang rasional menuju peran katalisator dan secara berangsur-angsur berperan sebagai fasilitator, jika hal ini dapat dilakukan, maka secara serta merta telah menempatkan masyarakat sebagai mitra sebagaimana dikehendaki Arnstein pada tangga ke enam dan secara berangsur-angsur terjadi pendelegasian kewenangan serta terbentuk kemampuan kontrol oleh masyarakat, pada tangga ke tujuh dan delapan.

Apabila dilihat berdasarkan 8 (delapan) tingkatan partisipasi yang diuraikan di atas, tingkat partisipasi masyarakat pada program ICBRR paling tinggi baru dicapai sampai pada tahap keenam yaitu kemitraan. Pada tahap ini masyarakat sudah memiliki kekuasaan atas pelaksanaan kegiatan, dimana pada tahap ini baru dirasakan dalam kegiatan: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, resiko/bencana, pembentukan CDMC, Pembentukan TIM CBAT, Sistem Peringatan Dini, pengelolaan dana kontigensi, dimana masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Selanjutnya dalam kegiatan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pemberi bantuan tingkatan partisipasi baru mencapai pada tahap penentraman (*pacation*), dimana masyarakat telah diberi ruang partisipasi untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan. Namun proses pelaksanaan kegiatan masih dikendalikan oleh pihak PMI-ICBRR, masyarakat hanya sebatas pelaksana kegiatan.

F. Penutup

Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi masyarakat *Gampong Lambaro Skep* dan kampanye mengenai pengurangan risiko bencana, terbentuknya komite penanggulangan bencana masyarakat (*community disaster management committees /CDMC*) dan Tim Relawan Tanggap Cepat (*rapid response volunteers team/CBAT*) di *Gampong Lambaro Skep* atau tersedianya tim pertolongan pertama yang siap dan tanggap dalam mengangani korban bencana, telah dilakukan pemetaan *Gampong Lambaro Skep* dan tersedianya informasi kawasan rawan bencana, telah ada Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System /EWS*) berupa sirine tangan dan *megaphone*, Adanya dana kontigensi masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, adanya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga pemberi bantuan dan juga PMI, tersedianya jalur evakuasi dan *escape building* di *Gampong Lambaro Skep*, terwujudnya budaya gotong royong dalam rangka pemulihan pasca bencana di *Gampong Lambaro Skep*, adanya Informasi dan komunikasi dalam proses penanganan pasca bencana dan terwujudnya rasa kebersamaan dan saling membantu ketika ada bencana.

Tingkat partisipasi masyarakat pada program ICBRR paling tinggi baru dicapai sampai pada tahap keenam yaitu kemitraan. Pada tahap ini masyarakat sudah memiliki kekuasaan atas pelaksanaan kegiatan, dimana pada tahap ini baru dirasakan dalam kegiatan: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, resiko/bencana, pembentukan CDMC, Pembentukan TIM CBAT, Sistem Per-

ingatan Dini. pengelolaan dana kontigensi, dimana masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Selanjutnya dalam kegiatan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pemberi bantuan tingkatan partisipasi baru mencapai pada tahap penentraman (*palcation*), dimana masyarakat telah diberi ruang partisipasi untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan. Namun proses pelaksanaan kegiatan masih dikendalikan oleh pihak PMI-ICBRR, masyarakat hanya sebatas pelaksana kegiatan.

G. Saran

Pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan program-program pengurangan risiko bencana dengan menggunakan konsep pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi).

Pihak PMI Cabang Kota Banda Aceh untuk selalu mendampingi dan menjaga hubungan komunikasi, koordinasi dengan masyarakat *Gampong* Lambaro Skep, sekalipun program ICBRR telah berakhir, agar keberlanjutan program di masyarakat dapat berjalan.

Pihak PMI Cabang Kota Banda Aceh diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengadakan radio komunikasi dan mobil *ambulance* untuk *Gampong* Lambaro Skep

Perangkat *Gampong* Lambaro Skep (*Keuchik*), diharapkan untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PMI-ICBRR atau NGO lainnya, harapannya agar masyarakat dapat menuju kemandirian

Masyarakat *Gampong* Lambaro Skep diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan PMI, *Gampong* tetangga, lembaga terkait lainnya dan selalu berkoordinasi mengenai manajemen bencana atau program-program lainnya. dan diharapkan untuk mengadakan simulasi di *Gampong* mengenai manajemen bencana, agar ilmu yang sudah didapatkan, untuk dapat di implementasikan di masyarakat *Gampong* sendiri khususnya.

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

(Studi Kasus Warga KAT Desa Batee Meutudong Kecamatan Panga,
Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat)

Oleh:

Dr. Ishak Hasan, M.Si¹

Abstrak

KAT merupakan kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar dan berpindah-pindah ataupun menetap. Kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, kondisi geografis, yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumberdaya alam setempat dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Warga KAT tinggal di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Aceh. Pemberdayaan terhadap mereka relatif masih sangat terbatas dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kesiapan sumberdaya manusia yang peduli terhadap nasib warga KAT sangat sedikit. Penelitian dilakukan di lokasi dengan melakukan observasi dan, wawancara langsung dengan semua kepala keluarga. Masing-masing di Desa Batee Meutudong 43 KK dan di Alue Bilie 38 KK. Strategi pemberdayaan yang dilakukan dengan melakukan penyerapan aspirasi tentang kebutuhan mereka, baik dari aspek sosial maupun dari aspek ekonomi, dan kemudian menyusun skala prioritas pemberdayaan. Pada tahap awal akan dibangun rumah layak huni sebanyak jumlah KK yang ada di dua lokasi tersebut. Rumah berbentuk semi permanen, pemberian biaya hidup beserta dengan berbagai fasilitas sosial lainnya selama masa 2 tahun. Selanjutnya dilakukan pendampingan sampai dimungkinkan mereka mandiri secara sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial Ekonomi, Kemiskinan, KAT

1. Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

A. Pendahuluan

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam pembangunan. Mereka sering mendapat perlakuan yang kurang adil dari pengambil kebijakan. Makanya tidak heran apabila kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat ini relatif masih amat terbatas dilakukan. Hal ini ditandai dari akses pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sangat terbatas diperoleh oleh mereka. Dengan demikian mereka selalu tertinggal dalam setiap derap pembangunan.

KAT merupakan kelompok sosial dan budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpecah dan berpindah-pindah ataupun menetap. Kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, kondisi geografis, yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumberdaya alam setempat dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Kondisi yang demikian disebut dengan komunitas yang belum diberdayakan, dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah (Nasir Abdullah, 2006:5).

Pemberdayaan KAT oleh pemerintah memang telah dilakukan, akan tetapi mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas maka pemberdayaan tersebut juga belum begitu terasa bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat bawah ini. Oleh karena itu dalam setiap kesempatan kita perlu memberikan perhatian secara terencana antar berbagai sektor guna memperbaiki kondisi kehidupan mereka di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Aceh.

Wilayah Aceh yang luas terdiri dari wilayah pesisir, wilayah pedalaman dan wilayah kepulauan. Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat merupakan desa di pedalaman. Kedua desa ini berada di Wilayah Pantai Barat Aceh. Hampir semua penduduk di dua desa tersebut merupakan Suku Aceh. Wilayah ini bertopografi dataran tinggi, sebagian kecil dataran rendah.

Sebelum gempa dan tsunami melanda Aceh wilayah ini dapat ditempuh dengan transportasi darat yang sangat lancar. Akan tetapi setelah gempa dan tsunami menghancurkan prasarana jalan dan jembatan wilayah ini seperti kembali ke masa silam, terisolir dan sangat terkebelakang bila dibandingkan dengan wilayah dan masyarakat lain di Aceh. Saat ini perbaikan jalan dan jembatan di wilayah pantai barat terus dipacu walau setelah lebih 5 tahun tsunami, transportasi ke wilayah ini sampai saat ini relatif belum lancar. Diharapkan dengan lancarnya transportasi, maka mobilitas penduduk dan sumber-sumber daya alam lainnya bergerak melewati batas-batas wilayah kedua kabupaten tersebut.. Adanya berbagai program pembangunan di daerah tidaklah berarti secara otomatis dapat

menuntaskan isolasi fisik dan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung kondisi yang dihadapi oleh kedua desa tersebut.

Kedua desa ini terletak diperbukitan dan lembah Gugusan Bukit Barisan yang terhampar di pantai Barat Aceh. Daerah ini menjadi tempat mengadu nasib, dan tempat berusaha menghidupi anak cucu mereka. Desa ini relatif sudah lama ditempati penduduk jauh sebelum kemerdekaan. Keadaan masyarakatnya masih sangat tertinggal dalam segala hal. Dalam situasi seperti di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat beradaptasi dan mempertahankan hidupnya terhadap perubahan lingkungan alam dan sosial ekonomi serta budaya yang semakin pesat. Khususnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Selain itu perlu pula dicari model pembinaan yang sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi masyarakat yang mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, (2) Menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial, (3) Tersusunnya model pembinaan dan rencana pemberdayaan yang tepat.

B. Metode Penelitian

Fokus komunitas yang menjadi wilayah penelitian adalah Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan dan penetapan desa ini sebagai objek pengkajian ditetapkan oleh Dinas Sosial Aceh berdasarkan usulan Pemda kedua kabupaten tersebut. Tim peneliti melakukan studi kelayakan di lapangan untuk memperoleh data akurat yang mendukung pencapaian tujuan penelitian di atas. Penelitian lapangan dilakukan selama 2 (dua) bulan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, sebagai mana disajikan dalam laporan ini.

C. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Desa Batee Meutudong

Desa Batee Meutudong mempunyai luas lebih kurang 1000 Ha, terdiri atas lahan perladangan dan pertanian, semak belukar, sawah serta pemukiman penduduk. Selebihnya merupakan areal hutan Negara yang belum dimanfaatkan oleh penduduk.

Batas Desa Batee Meutudong sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Gampong Alue Thoe
- Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Pande
- Sebelah Timur dengan Gampong panton Krueng
- Sebelah Barat dengan Gampong Kabong

Desa Batee Meutudong bertofografi dataran rendah dan sebagian besar dataran tinggi. Ketinggian Desa ini dari permukaan laut berkisar 50 hingga 150 meter. Curah hujan relatif tinggi, musim penghujan dimulai sejak bulan September hingga Juni setiap tahunnya. Struktur pemilikan tanah di Desa Batee Meutudong sebagian besar merupakan tanah negara dan sebagian milik masyarakat. Secara geografis desa ini sangat layak sebagai sebuah pemukiman, karena disamping tanahnya yang subur, desa ini dilalui sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan memenuhi standar kesehatan. Letak pemukiman yang berada di lembah perbukitan menjadikan udaranya bersih dan sejuk, karena hutan alamnya yang masih asri.

b. Desa Alue Bilie

Luas Desa Alue Bilie lebih kurang 850 Ha, terdiri atas lahan perladangan dan pertanian, semak belukar, sawah serta pemukiman penduduk. Selebihnya merupakan areal hutan Negara yang belum dimanfaatkan oleh penduduk.

Batas Desa Alue Bilie sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kebun Gampong Alue Bilie
- Sebelah Selatan dengan Gampong Pasi Janeng
- Sebelah Timur dengan Gampong Peuniyoh Rambong
- Sebelah Barat dengan Gampong Alue Eumpek

Desa Alue Bilie bertofografi sebagian besar dataran tinggi Ketinggian desa ini dari permukaan laut berkisar 150 hingga 300 meter. Curah hujan relatif tinggi terutama pada musim angin barat, dimulai sejak bulan September hingga Juni setiap tahunnya. Pemilikan tanah di Desa Alue Bilie sebagian besar merupakan tanah negara dan sebagian milik masyarakat. Secara geografis desa ini sangat layak sebagai sebuah pemukiman, karena disamping tanahnya yang subur, desa ini dilalui sebuah sungai yang airnya sangat jernih dan memenuhi standar kesehatan. Letak pemukiman yang berada di lembah perbukitan menjadikan udaranya bersih dan sejuk, karena hutan alamnya yang masih asri.

Aksesibilitas dengan ibukota kecamatan sejauh 8 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Jalannya hanya jalan tanah. Jarak dengan ibu kota kabupaten 25 Km, dan jarak dengan ibukota propinsi 178 Km dengan menggunakan transportasi bus umum. Mengingat kondisi lapangan maka rencana pembinaan dilakukan juga secara insitu. Lokasi desa ini sangat cocok ditanami jenis tanaman padi, coklat, sawit. Selain itu juga dapat ditanami dengan

berbagai tanaman palawija lainnya, seperti sayur-sayuran. Desa Alue Bilie belum ada sarana perekonomian seperti pasar. Kebutuhan sehari-hari penduduk di datangkan dari desa tetangga.

2. Kondisi Demografis dan Kegiatan Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Batee Meutudong berjumlah 126 jiwa, terdiri 59 laki-laki, 67 perempuan. Sedangkan penduduk Alue Bilie berjumlah 58 jiwa, 24 laki-laki 34 perempuan. Pada umumnya penduduk kedua desa mempunyai mata pencaharian sebagai petani padi sawah, pertanian lainnya, dan buruh tani. Lahan yang mereka garap pada umumnya milik sendiri. Namun ada juga sebagian penduduk yang mengusahakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Usaha tani yang dominan adalah usaha tani karet, coklat, dan sawit rakyat. Hanya sedikit yang menanam padi. Sedangkan jenis tanaman pangan yang ditanami adalah sayur-sayuran. Hasil dari usaha pertanian dan perkebunan tersebut pada umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan potensi sumberdaya lahan sangat subur. Kebutuhan beras dan kebutuhan lainnya, baik kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan sandang sehari-hari di datangkan dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten.

Pola pemukiman penduduk kedua desa ini bersifat terpusat pada lokasi pemukiman yang telah dihuni sejak lama. Bentuk bangunan rumah pada umumnya terbuat dari kayu, beratap rumbia dan sebagian besar berlantai tanah. Ada sebagian berbentuk rumah panggung dengan lantai papan. Sumber air yang digunakan masyarakat, baik untuk mandi, mencuci, maupun untuk kebutuhan air minum digunakan air sungai. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air untuk berbagai keperluan. Sebagian besar rumah tangga belum memiliki jamban keluarga. Umumnya penduduk membuang kotoran langsung ke sungai atau ke jamban umum yang juga dibuang ke saluran air. Usaha tani dikerjakan secara tradisional dengan peralatan yang relatif sederhana, seperti cangkul, parang dan alat produksi pertanian tradisional lainnya. Produksi hanya untuk sekedar dikonsumsi sendiri, bukan usaha komersial yang mendatangkan pendapatan.

3. Pembangunan

Secara umum pelayanan publik masih sangat memprihatinkan. Di kedua desa ini hanya memiliki masing-masing satu buah rumah ibadah (meunasah yang terbuat dari kayu/papan) dibangun dari hasil swadaya masyarakat sendiri tanpa ada bantuan pemerintah. Jalan menuju desa keduanya belum beraspal, dan saat ini sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Di desa ini belum ada pos pelayanan kesehatan. Sehingga kalau ada penduduk yang sakit terpaksa harus mencari pelayanan kesehatan ke tempat yang lebih jauh, khususnya ke ibukota kecamatan. Anak-anak usia sekolah terutama usia SD sebagian ada

yang tidak bersekolah karena SD sangat jauh letaknya. Sedangkan sebagian kecil anak usia SD bersekolah di desa tetangga.

D. Kondisi Sosial Budaya

1. Sejarah Singkat Desa

Nama Desa Batee Meutudong dan Desa Alue Bilie telah menjadi nama yang diterima secara kolektif oleh penduduk setempat sejak lama. Tidak diketahui secara pasti kapan pertama sekali nama kedua desa ini muncul. Namun diperkirakan oleh sebagian warga generasi tua, kedua desa ini sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Nama ke dua desa ini berasal dari masyarakat pendatang yang membuka lahan pertanian di kawasan ini. Pada mulanya kedatangan mereka untuk mencari dan membelah kayu, kemudian mereka membangun pemukiman dan bercocok tanam. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia, sehingga dalam waktu yang singkat mereka betah dan menetap di sana. Asal mula penduduk yang berdomisili di desa ini merupakan kaum pendatang yang berasal dari beberapa kecamatan dan kabupaten yang bertetangga, terutama dari Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Besar, Pidie dan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah ada penduduk menetap, masing-masing desa semakin ramai dikunjungi para pendatang baru yang berasal dari luar desa.

2. Sistem Keekerabatan dan Interaksi Sosial

Penduduk yang mendiami kedua desa ini seluruhnya berasal dari suku Aceh. Tidak ada penduduk yang bermigrasi dari luar Aceh secara permanen dan dalam jumlah yang besar ke desa ini. Kecuali bagi beberapa orang yang diikat oleh hubungan perkawinan dengan warga setempat. Kehidupan keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal. Selain itu juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, sumber dan tingkat pendapatan, biaya hidup, besarnya keluarga, pola hubungan keluarga, serta keharmonisan hubungan perkawinan.

Sebagaimana pandangan orang Aceh di tempat lain, warga kedua desa tersebut beranggapan bahwa status sebuah keluarga sejahtera dan bermartabat sering diukur apabila sudah mampu memiliki rumah atau tempat tinggal menetap sendiri, tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Rumah tempat tinggal ini merupakan simbol ketentraman lahir dan batin. Oleh karena itu tempat tinggal harus diperhatikan secara baik, pengaturan ruang, dan kelengkapan peralatan rumah juga harus memadai. Sebab suasana tempat tinggal yang aman dan sehat dapat mendatangkan keharmonisan dan ketentraman bagi kehidupan seluruh keluarga. Terjadinya keharmonisan Interaksi sosial antara sesama warga lebih disebabkan karena nilai yang mereka anut, pandangan hidup dan agama serta ras relatif sama. Hubungan sosial berlangsung antar warga desa cukup baik karena didasarkan pada rasa saling membutuhkan dan nilai-nilai agama. Setiap

ada pekerjaan yang bersifat sosial mereka kerjakan secara bersama, seperti gotong royong, kegiatan perkawinan dan upacara adat lainnya. Demikian juga kalau ada warga yang ditimpa musibah mereka bantu meringankan secara bersama, dan saling berbagi rasa, memberi pertolongan berupa tenaga dan harta benda (H. M. Zainuddin, 1961).

Warga di kedua desa ini sangat terbuka terhadap orang lain dari luar kelompoknya. Mereka sudah sejak lama berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompok dan desanya, terutama dengan para pedagang, baik yang datang ke desa mereka ataupun mereka sendiri yang pergi ke luar desanya terutama ke ibukota kecamatan telah berlangsung sejak lama. Bentuk interaksi tersebut berlangsung melalui jual beli dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan interaksi sosial antar sesama warga melalui anjangsana, pesta perkawinan, pesta adat, acara kematian, menyambut hari-hari besar Islam, dan juga melalui jual beli. Kegiatan interaksi antara sesama warga terlihat akrab dalam kegiatan kebersamaan yang ditunjukkan oleh solidaritas yang tinggi, baik dalam upacara perkawinan lebih-lebih dalam peristiwa musibah. Karena semua anggota masyarakat memeluk agama Islam, maka hubungan antar kepercayaan atau agama berlangsung harmonis, tanpa adanya konflik. Hubungan persaudaraan semakin diperkuat oleh tali persaudaraan seiman dan seagama.

Prinsip saling menolong secara resiprositas, penghormatan kepada senior dan azas musyawarah-mufakat merupakan nilai-nilai yang mampu memfasilitasi warga desa mempertahankan keharmonisan hubungan sosial dengan baik, sehingga terbentuknya solidaritas sosial desa yang masih mengental. Warga desa berusaha menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai sebagaimana terlihat dalam berbagai upacara daur hidup, aktivitas pertanian, dan proses pengambilan keputusan. Adanya perbedaan penghasilan/pendapatan di antara warga desa seringkali juga menunjukkan perbedaan status sosial ekonomi di antara mereka. Meskipun dapat diamati secara spintas ada juga golongan yang dianggap mampu, golongan sedang dan golongan yang kurang mampu. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, sehingga tidak pula membawa pengaruh penting terhadap keharmonisan atau keretakan dalam hubungan sosial. Antar anggota masyarakat saling menghormati, dan saling membantu.

Dalam hal perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dianggap cukup umur untuk masa perkawinan (*baliq*), yaitu umur 14-16 tahun, maka seorang laki-laki bebas memilih jodohnya untuk kawin atau berkeluarga. Perkenalan dan hubungan muda-mudi harus melalui orang tua, tidak ada tempat khusus untuk melangsungkan hubungan muda-mudi sebelum ada ikatan yang sah. Proses peminangan atau pelamaran, ada yang langsung dilakukan pihak laki-laki melalui orang tua gadis yang bersangkutan. Ada juga melalui pertemuan para orang tua dari ke dua belah pihak. Pada umumnya masih dilakukan menggunakan jasa "*seulangke*" (penghubung). Dalam acara peminangan tersebut mahar dibawa berupa emas yang dibayar oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Proses perni-

kahan perkawinan dilakukan secara adat yang mengacu pada hukum syari'ah Islami. Ijab kabul pernikahan dilaksanakan di depan penghulu atau *Teungku* (KUA), bersama para orang tua ke dua belah pihak, yang disaksikan oleh kaum kerabat dari kedua mampelai.

3. Kepemimpinan

Pemimpin pada komunitas kedua desa ini hanya mengenal pemimpin formal, yaitu Kepala Desa yang disebut dengan Geusyik Gampong. Seperti desa lainnya di seluruh Aceh, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan mengikuti mekanisme pemerintahan formal. Tahap pertama calon kepala desa ditetapkan oleh masyarakat sebanyak lima orang bakal calon. Kelima calon tersebut dikirim ke kantor camat untuk ditetapkan tiga orang calon tetap. Setelah tiga calon kepala desa ditetapkan oleh camat, kemudian turun lagi ke desa untuk selanjutnya dikirim ke kantor bupati melalui camat untuk ditetapkan sebagai calon tetap. Sebelum disahkan, kepada ketiga calon tersebut diberikan tes yang selanjutnya disahkan dan dikirim ke desa kembali untuk dipilih oleh masyarakat.

Menurut masyarakat, pemimpin yang dianggap baik adalah yang mengerti dan mau menjelaskan petunjuk pemerintah. Bagi mereka, pemimpin itu boleh dijabat oleh siapa saja, sesuai hasil pemilihan warga asalkan pemimpin tersebut mendengarkan masalah dan keluhan warganya. Pemimpin harus bertanggung jawab, bersikap demokratis, jujur dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dalam kegiatan keagamaan, Imam Mesjid berfungsi sebagai pimpinan spiritual, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

4. Upacara Adat dan Agama

Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup meliputi upacara perkawinan, kematian dan kelahiran. Seperti telah dikemukakan bahwa upacara adat perkawinan berlangsung terutama di rumah pengantin wanita. Untuk memeriahkan pesta perkawinan ditampilkan berbagai kesenian lokal seperti tari ratoh, rapai geleng, barzanji dan hikayat. Dalam upacara kelahiran dilakukan aqiqah berupa penyembelihan seekor kambing, sebagai kenduri untuk memberi nama dan mencukur rambut bayi yang baru lahir. Biasanya pada hari kenduri kerabat dan famili dekat, dan penduduk desa lainnya diundang untuk menghadiri upacara. Pada saat musibah kematian semua warga tidak melakukan kegiatan sampai selesai upacara penguburan. Mereka berkumpul di rumah duka untuk melayat dan mengikuti prosesi sampai kegiatan penguburan selesai. Di rumah duka dilakukan kenduri yang intinya adalah pembacaan do'a selamatan (samadiyah) pada malam hari mulai malam pertama sampai malam ketujuh, selanjutnya pada hari ke 40 dan hari ke 100.

Upacara adat misalnya ketika memulai usaha, seperti ingin turun ke sawah mereka melakukan kenduri bersama, masing-masing keluarga biasanya menyembelih ternak, paling kurang ayam untuk dimakan bersama-sama setelah membaca do'a bersama. Maksud dari upacara kenduri tersebut adalah agar memperoleh hasil yang baik semoga dijauhi dari segala gangguan dan marabahaya. Sebagai pemeluk Islam, masyarakat Adan pada umumnya juga melakukan upacara keagamaan yang selalu diperingati secara mariah, terutama pada saat memperingati hari-hari besar Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan upacara hari-hari besar Islam lainnya.

5. Agama dan Kepercayaan

Seperti halnya orang Islam lain di Aceh, warga di kedua desa ini melaksanakan berbagai ritual peribadatan, kajian keislaman, baik di mesjid maupun di pesantren. Pada hari Jumat dilakukan shalat Jum'at bersama di mesjid desa. Pada bulan Ramadhan mereka melaksanakan ibadah puasa. Mesjid biasanya difungsikan untuk kegiatan shalat lima waktu dengan berjamaah dan kegiatan pendidikan agama, terutama pengajian untuk anak-anak. Masyarakat di kedua desa ini juga masih percaya adanya roh halus, ada yang baik dan ada pula yang jahat. Bagi orang yang telah meninggal dunia (mati), rohnya tetap masih hidup dan kembali kepada Allah SWT, dan untuk selanjutnya akan dibangkitkan pada hari akhirat. Mereka percaya bahwa makhluk halus seperti jin dan setan. Sesuai dengan konsep Islam mereka mengaku bahwa iblis, setan dan jin ada dalam kehidupan di sekitar mereka. Mereka yakin bahwa iblis dan setan selalu mengganggu manusia untuk tidak taat kepada perintah Allah SWT. Sedangkan jin ada yang jahat, tetapi ada pula yang baik, dan jin yang baik disebut jin Islam. Musibah atau gangguan serta penyakit yang terjadi pada manusia pada dasarnya menurut warga di kedua desa ini adalah merupakan kehendak Allah SWT. Namun masih ada juga warga, terutama orang tua lanjut usia yang dikaitkan dengan kedatangan makhluk halus seperti jin dan roh-roh jahat lainnya, setan dan iblis. Dengan demikian musibah tersebut bisa terjadi karena dianggap perilaku manusia yang telah jauh menyimpang. Karena itu menurut mereka jalan yang paling baik adalah masing-masing berdo'a kepada Allah SWT sambil berikhtiar dengan berperilaku baik.

Nilai-nilai agama Islam yang mereka anut mewarnai hampir semua aspek kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali generasi muda juga menaati dan patuh terhadap ketentuan syari'at yang berlandaskan Islam. Sebagai salah satu manifestasi ketaatan mereka terhadap ritual ke-Islaman, mereka selalu membuat upacara-upacara; seperti memperingati hari-hari besar. Upacara penyembelihan hewan korban dan sampai saat ini secara rutin selalu diadakan. Pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW misalnya, mereka melakukan kenduri bersama dengan menyembelih hewan kerbau, kambing, ayam dan lauk-pauk lain sebagai pelengkap santapan secara bersama-sama. Tanpa adanya penyembelihan ternak/unggas, rasanya belum lengkap untuk melangsungkan kegiatan

upacara. Upacara-upacara adat dari sejak kehamilan sampai kelahiran bayi masih berlaku meskipun dilaksanakan secara sederhana.

6. Kesehatan

Secara umum kondisi lingkungan masih alami dan udara di desa relatif bersih. Dengan topografi desa yang dekat dengan hutan serta aliran sungai yang jernih maka desa ini tergolong sangat sehat sebagai tempat pemukiman. Tanggungjawab masyarakat dalam memelihara lingkungan terlihat sangat baik. Dalam pengobatan mereka cenderung berobat secara tradisional, hal ini disebabkan Puskesmas terletak di pusat kecamatan yang agak jauh dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal kesehatan diperoleh keterangan bahwa penyakit yang sering diderita dan menimpa warga pada umumnya adalah malaria, diare, penyakit kulit dan gatal-gatal, serta penyakit mata. Sementara untuk melahirkan sebahagian besar masih memanfaatkan tenaga bidan kampung yang belum terlatih secara medis. Proses kelahirannya biasanya dilakukan di rumah sendiri, karena biaya lebih murah. Kalau berobat secara medis, obat-obatnya sulit didapat, harganya tidak terjangkau, keuangan yang terbatas, tempat tinggalnya jauh, serta pengetahuan dan pemahaman masih rendah. Hanya sebagian kecil saja di antara warga yang menggunakan tenaga medis di Puskesmas. Makanan utama yang diberikan kepada bayi yang baru dilahirkan adalah ASI dan *pisang wak* (pisang monyet). Jumlah anak yang diinginkan, pada umumnya masih menganut filosofi “banyak anak, banyak rezeki”. Hanya sebagian kecil di antara warga ada yang menginginkan jumlah anak mereka antara 2-4 orang saja. Diperoleh keterangan bahwa angka kelahiran rata-rata berkisar antara 2 sampai 3 orang bayi per-bulan, dan dapat diperkirakan mencapai antara 20-26 orang bayi per-tahun.

7. Bahasa

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh warga di kedua desa ini adalah bahasa Aceh, pemakaian Bahasa Indonesia terutama digunakan oleh sebagian warga yang merasa mampu atau memahaminya pada saat ada tamu yang berasal dari luar Aceh. Bahasa Indonesia dikenal warga melalui pergaulan dan pendidikan formal di sekolah.

8. Peralatan dan Pelengkapan Hidup

Rumah merupakan kebutuhan hidup yang memiliki nilai penting, selain pakaian dan perhiasan yang mereka miliki. Bentuk rumahnya sama dengan bentuk rumah yang dimiliki masyarakat Aceh pada umumnya, yaitu berbentuk panggung bersegi empat, ada yang semi permanen, ada pula yang masih berbentuk gubuk berlantaikan tanah. Sedikit sekali ditemukan rumah yang berbentuk permanen. Bahan pembuatan rumah terdiri dari papan sebagai dinding dan jendela, sedangkan atap umumnya masih daun rumbia, secara umum dapat dikatakan bahwa

bentuk rumah sangat sederhana. Dari segi kesehatan, kondisi rumah mereka belum memenuhi persyaratan kesehatan. Ada rumah/gubuk sangat kecil, tidak teratur, bahkan tidak memiliki kamar, sedangkan halamannya hampir tidak ada. Fungsi rumah bagi mereka sebagai tempat meneruskan keturunan dan tempat berkumpul keluarga batih ayah, ibu dan anak. Selain itu rumah juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari keganasan alam dan makhluk lainnya. Rumah juga sebagai tempat berkomunikasi, hubungan interaksi antar keluarga dan kerabat, dan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan agama, termasuk sosialisasi nilai-nilai yang berlaku bagi anggota keluarganya (Manyambeang, 1988).

Sebagaimana orang Aceh pada umumnya, pakaian mereka terbuat dari kain. Cara berpakaian sama dengan berpakaian masyarakat umumnya, yakni menutupi sebagian besar anggota tubuh sesuai dengan Syariat Islam. Sedangkan bagi kaum laki-laki tidak menggunakan perhiasan. Bagi kaum hawa, perhiasan yang dipakai ada yang menggunakan kalung, ada yang memakai cincin, dan memakai anting-anting. Bahan perhiasan umumnya terbuat dari emas (Rusdi Sufi, dkk, 2002). . Pemakaian perhiasan ini, menurut keterangan sebahagian warga tidak ada maksud untuk memamerkan kekayaan, akan tetapi sekedar perlengkapan untuk persiapan/simpanan hari tua, atau jika sewaktu-waktu diperlukan untuk berbagai kebutuhan keluarga.

Peralatan dan perlengkapan yang dimiliki masyarakat meliputi alat-alat pertanian yang ada terdiri dari cangkul, skrup, pacul, sabit dan parang, alat-alat penangkapan ikan yang dimiliki warga meliputi pancing, jala dan bubu. Sedangkan perlengkapan rumah tangga terdiri dari; lemari, meja makan, kursi tamu, dan alat masak-memasak di dapur.

E. Sistem Pengetahuan dan Pendidikan

Pengetahuan yang menonjol dalam masyarakat di kedua desa ini adalah pengetahuan di bidang pertanian. Pengetahuan pertanian dimaksud merupakan pengetahuan sederhana dalam usaha tani, bukan pengetahuan pertanian modern. Dalam bertani mereka sudah memahami dan menentukan waktu-waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta membasmi penyakit atau hama. Pengetahuan tersebut diperoleh secara tradisi atau turun-temurun dan bukan merupakan pengetahuan modern dalam pertanian.

Kedua desa ini belum memiliki SD. Anak-anak usia sekolah bersekolah di desa tetangga. Umumnya anak-anak usia sekolah mengikuti pendidikan di lembaga ini. Meskipun demikian guru yang ditempatkan di sekolah tersebut masih sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar kurang berjalan lancar. Perhatian orang tua untuk pendidikan relatif cukup tinggi, hal ini ditandai dengan tingginya partisipasi orang dalam mendorong dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun karena kondisi ekonomi ada juga sebagian warga anaknya terpaksa harus *drop-out* dan kemudian membantu orangtua bekerja sebagai petani

F. Kebijakan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat disimpulkan tentang peluang, kendala, potensi dan aspirasi atau kebutuhan komunitas setempat. Dengan memahami masalah tersebut maka selanjutnya dapat dikemukakan pula model dan kebijaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat sebagai mana diuraikan berikut ini.

1. Potensi Pemberdayaan

Setelah dipelajari secara mendalam, potensi untuk pemberdayaan KAT Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat dapat merencanakan, pembiayaan pembangunan secara swadaya untuk pembangunan fasilitas publik dalam wilayah KAT sesuai dengan UUPA.
- b. Aliran sungai yang ada di desa tersebut cukup potensial sebagai sumber air untuk pertanian, perikanan dan juga untuk berbagai keperluan hidupnya.
- c. Lahan yang tersedia cukup potensial untuk pertanian tanaman padi tanaman hortikultura, dan perikanan darat.
- d. Rasio luas lokasi dengan jumlah penduduk yang memungkinkan pembangunan.
- e. Badan jalan untuk menuju desa sudah ada.
- f. Jaringan listrik belum tersambung sampai ke desa ini, akan tetapi baru sampai di desa tetangga.
- g. Kemampuan penduduk untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup cukup tinggi.
- h. Desa ini sudah memiliki organisasi pemerintahan desa.
- i. Solidaritas sosial antar warga telah terjalin sejak lama.
- j. Lahan dan hutan desa tergolong hutan produksi yang cukup subur.
- k. Semangat, tekad dan kesiapan warga untuk mendapat pembinaan cukup tinggi.

2. Hambatan Pemberdayaan

Hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan KAT Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

- a. Kemampuan PAD Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat masih relatif rendah untuk membiayai keperluan pembangunan terutama

- infrastruktur perekonomian secara cepat
- b. Hubungan transportasi antara desa dengan kota kecamatan atau pusat pertumbuhan ekonomi kurang lancar, karena badan jalan belum layak untuk dilalui oleh kendaraan roda empat.
 - c. Pengetahuan dan teknologi produksi masih tradisional
 - d. Masih ada warga yang tidak mempunyai lahan pemukiman dan lahan produksi.
 - e. Ada warga yang masih mendiami rumah yang tidak layak huni
 - f. Tidak ada sarana kesehatan
 - g. Masalah status kepemilikan tanah di calon lokasi pemukiman.

3. Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga calon binaan dan pengamatan langsung dilapangan maka aspirasi dan kebutuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Bate Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Masing-masing KK menginginkan lahan seluas 2 ha yang lokasinya berada di sebelah selatan desa yang berjarak lebih kurang 2 km. Apabila calon lokasi ini dibuka maka proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat terutama dari segi ekonomi akan cenderung meningkat, pada gilirannya dapat meningkatkan pula kesejahteraan hidup masyarakat
- b. Pembangunan rumah yang layak
- c. Modal usaha untuk menggarap lahan pertanian,
- d. Bantuan sarana produksi pertanian seperti; benih, obat-obatan dan pupuk
- e. Bimbingan penyuluhan dan latihan ketrampilan mengenai cara bercocok tanam, berkebun dan cara memelihara ikan air tawar secara teknis dan bernilai ekonomis tinggi.
- f. Bimbingan penyuluhan tentang lingkungan hidup, pemerintahan desa dan penyuluhan agama

4. Model Pemberdayaan

Berdasarkan kenyataan diatas maka model pemberdayaan yang tepat diterapkan pada kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Mikro:

1. Pembinaan berbentuk insitu sebanyak 100 unit rumah bagi mereka yang belum ada rumah atau rumah yang tidak layak huni
2. Pembangunan Balai Sosial serba guna untuk pertemuan warga dan kebutuhan sosial lainnya.
3. Memberikan bantuan dana stimulus bagi warga dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

4. Menyediakan peralatan kerja bibit, pupuk dan obat-obatan untuk pertanian
5. Melakukan pendampingan selama 3 tahun
6. Memberikan penyuluhan tentang teknologi usaha produksi, pengolahan dan pemasaran, lingkungan, pemerintahan agama dan kesehatan
7. Membangun sarana kesehatan dan melengkapi tenaga para medis/bidan desa
8. Membentuk organisasi kelompok tani.

b. Pembinaan Makro:

1. Percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk menghubungkan desa dengan pusat kota kecamatan.
2. Pembuatan perda yang memberi jaminan hukum untuk melindungi pemukiman dan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.
3. Membangun hubungan kemitraan antara warga binaan dengan berbagai instansi dan dengan lembaga kemasyarakatan.

G. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas maka di bawah ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penting.

1. Kesimpulan

- a. Semangat dan keinginan penduduk untuk memperbaiki kualitas kehidupan cukup tinggi. Kondisi ini menjadi modal utama untuk pemberdayaan KAT Desa Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dan desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kedua desa ini sudah memiliki pranata sosial dan sudah terorganisir secara baik, terutama untuk berjalannya sistem pemerintahan desa dan berjalannya hubungan sosial serta hubungan persaudaraan antar warga yang dilandasi pada nilai-nilai keislaman yang kuat.
- c. Lahan pemukiman dan hutan desa tergolong lahan produksi yang cukup subur.
- d. Kesiapan warga untuk mendapat pembinaan cukup tinggi.

2. Rekomendasi

- a. Berdasarkan potensi yang dimiliki, baik modal fisik (*physical capital*) maupun modal sosial (*social capital*) maka masyarakat di 2 (dua) desa tersebut sangat pantas untuk mendapat pemberdayaan secara terencana dan terpadu oleh

- berbagai elemen masyarakat. Terutama oleh jajaran Departemen Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Aceh pada Tahun 2010.
- b. Lahan lokasi pembinaan KAT menurut masyarakat dan dinas terkait merupakan milik masyarakat dan bila dilihat dari segi potensi kesuburan memenuhi syarat sebagai lokasi pembinaan.
 - c. Perlu dijalin hubungan kemitraan yang lebih intensif dengan berbagai instansi terkait untuk memperoleh sinergi yang kuat dalam pemberdayaan agar diperoleh hasil yang maksimal.

Referensi

- Abdul Kadir Manyambeang, (1988). **Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan (Keuchik dan Keujruen Blang dalam Masyarakat Aceh)**. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Pustaka Grafika Kita. Jakarta.
- Depsos RI (2003). **Pedoman Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**, Jakarta.
- (2003). **Pedoman Kerja Petugas Lapangan (Pendamping Sosial) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**, Jakarta.
- (2006). **Majalah Pikat (Pusat Informasi Komunitas Adat Terpencil)**, Jakarta.
- (2005). **Profil Keberhasilan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pada 8 Provinsi**, Jakarta.
- H. M. Zainuddin, (1961). **Tarich Atjeh dan Nusantara**. Pustaka Iskandar Muda. Medan.
- Nasir Abdullah (2006). **Paradigma Baru Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil**, Majalah PIKAT (Pusat Informasi Komunitas Adat Terpencil) Depsos RI, Jakarta.
- Profil Desa Batee Meutudong Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya**
- Profil Desa Alue Bilie Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat**
Tahun 2009.
- Rusdi Sufi, dkk, (2002). **Adat Istiadat Masyarakat Aceh**, Dinas Kebudayaan Provinsi NAD.